

**KEJUTAN GOYANG
SADBOR DAN MAKAN
BERGIZI GRATIS
PENDIDIKAN POLITIK
CEGAH POLARISASI
DAN HOAKS
KESEJAHTERAAN DESA
INDIKATOR KEMAJUAN
INDONESIA**

**HATI-HATI TANGANI
LAPORAN
PELANGGARAN
KEMBANGKAN UMKM
KE KANCAH
INTERNASIONAL
KENDALIKAN INFLASI
JELANG NATARU
PEMERIKSAAN KESEHATAN
GRATIS JALAN MENUJU
INDONESIA SEHAT
KOMINFO-KOMDIGI HINGGA
DESK JUDI ONLINE**

**MENGHADAPI
TANTANGAN
SEGERA
KEJAR TARGET
PERTUMBUHAN
EKONOMI
8 PERSEN**

**PILGUB SUMSEL
RASA PILPRES
SETOP BANSOS
SEBELUM
MASA COBLOS
SIMULASI MITIGASI
BENCANA BANJIR
BERHARAP EKONOMI
KREATIF MENGHELA
PERTUMBUHAN
PROFIL DENI VICTORIA**

PRABOWO BERTINDAK RAKYAT SENANG



Rp75.000,-

info indonesia

www.infoindonesia.id Network

INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **info** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia





LAPOR MAS WAPRES

PENGADUAN:

LANGSUNG DATANG KE ISTANA WAPRES 📄
SENIN - JUMAT, JAM 08.00 - 14.00 WIB

KONTAK KE WHATSAPP 📄

08111 704 2207

ALAMAT 📍

ISTANA WAKIL PRESIDEN RI,
JLN. KEBON SIRIH NO. 14, JAKARTA PUSAT

EDISI
BULAN
NOVEMBER
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian dan lembaga. Kondisi politik dan keamanan yang menungjang (kondusif) memang syarat mutlak untuk melaksanakan program pemerintahan.



22

INFO BAWASLU

Setiap tahapan dalam Pilkada 2024 memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda berdasarkan geografis dan psikologi pemilih.



30

INFO SUMSEL

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, serta seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bumi Sriwijaya melakukan koordinasi terkait upaya untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 tahun ke depan.



86

INFO PILKADA

Euforia Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 terus meluap di rasakan publik layaknya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia beberapa waktu lalu.



78

INFO NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai dihelat. Surat Edaran resmi terkait hal itu mulai diterbitkan dan diedarkan pada 13 November 2024.



80

INFO MUBA

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sepakat untuk menjaga netralitas mereka di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Selain itu mereka juga berkomitmen untuk menjaga Kabupaten Muba menjadi tempat yang aman, damai dan zero conflict.



91

INFO KHUSUS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP-JMN) 2020–2024. Poinnya antara lain pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target. Bagaimana ke depannya?

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

38 INFO PALEMBANG

82 INFO EKONOMI

84 INFO ISTANA

86 KAJI

46

INFO PROFIL

Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, membawa visi misi terkait keberlanjutan menuju 'Indonesia Emas 2045'.



AGENDA

Dinamika memang penting. Namun, pada dinamika melekat statika, sesuatu yang statis, cenderung ajeg. Toh baik dinamika maupun statika tak mungkin mengelak dari perubahan.

Begitulah. Ketika kita menyebut dinamika politik di Indonesia, maka statika politiknya terletak pada lembaga-lembaga politik yang bertingkat-tingkat mulai dari pusat hingga pelosok negeri. Juga melibatkan perorangan sebagai aktor, pemain, tokoh, maupun figur dengan peran masing-masing. Sedangkan lembaga mulai dari keluarga, organisasi sosial terkecil, hingga lingkungan tetangga, ormas, dan begitu banyak jumlah lembaga formal maupun informal, jumlah pemangkunya, skala cakupannya (lokal, nasional, regional, hingga global).

Keluarga sudah dapat menjadi lembaga politik terkecil. Sama seperti keluarga juga menjadi unit terkecil ekonomi. Pada titik inilah dengan mudah kita melihat hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik. Mulai dari tingkat keluarga, keluarga luas, keluarga besar, hingga kemudian menjadi lembaga yang lebih besar hingga ke tingkat global. Dengan masing-masing figur menjalankan perannya.

Dengan pemahaman itu, kita dapat memisahkan dinamika politik lokal, nasional, regional, maupun global yang saling terkait satu sama lain dalam kekentalan masing-masing. Pada perkembangan dinamika itu pula kita dapat melihat betapa Prabowo Subianto sebagai Presiden sibuk luar biasa. Kita lihat saja beberapa kilasan kegiatan Presiden sepekan saja antara 1 hingga 7 November 2024.

Pada Jumat malam, 1 November 2024 berlangsung pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil, salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Pada siang harinya, Presiden juga bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik. Dari dua pertemuan itu saja kita dapat memahami secara mudah kaitannya dengan dinamika politik lokal hingga nasional.

Keesokan harinya, Sabtu, 2 November 2024, Presiden menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional. Di cara itu juga Prabowo mengemukakan agendanya melawat ke luar negeri menghadiri undangan kepala negara maupun forum internasional seperti pertemuan negara-negara G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi APEC, forum ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Mulai terlihat di acara GSN itu kaitan antara dinamika politik lokal, nasional, hingga global.

Banyak lagi agenda lain Presiden Prabowo setelah 2 November. Kita sebut saja yang masih berkaitan dengan dinamika politik semisal Rapat Kabinet Paripurna pada Rabu, 6 November 2024. Pada hari yang sama, Presiden juga menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dari pertemuan itu, kedua negara menyepakati kerja sama di lima bidang penting. Tentulah dua agenda Presiden itu kait-mengait dengan dinamika politik global hingga lokal.

Di tengah banyak agenda Presiden itu, meluas pula informasi pemberantasan judi online yang terkendala oleh belasan pegawai Kementerian Komunikasi Digital yang khianat terhadap amanah yang mereka emban. Ini disrupti terhadap dinamika positif di awal November 2024. Pada titik inilah, masih dalam masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kita tegaskan pemerintah yang bersih adalah sebuah keharusan. Dinamika maupun statikanya. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



MENGHADAPI TANTANGAN SEGERA

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian dan lembaga. Kondisi politik dan keamanan yang menunjang (kondusif) memang syarat mutlak untuk melaksanakan program pemerintahan.

Rapat baru saja usai Senin siang, 4 November 2024 itu. Usai rapat koordinasi kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini, Menko Polkam Budi Gunawan beserta jajaran menteri, wakil dan para pejabat terkait mengumumkan pembentukan tujuh satuan kerja itu. Suasananya serius sekali.

Selanjutnya BG menguraikan, tujuh desks yang telah disiapkan memiliki leading sector masing-masing. Pertama, desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan leading sector Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua, desk pencegahan penyelundupan dengan leading sector dari Kemenko Polkam.

"Ketiga, desk pemberantasan narko-

cyber dan perlindungan data dengan leading sector Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menko BG menambahkan, desk-desk tersebut langsung tancap gas melaksanakan tugasnya, termasuk pencegahan korupsi, judi online, hingga penyelenggaraan pilkada yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo.



"Baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan badan-badan yang terkait, melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Menko Polkam yang namanya kerap diringas sebagai BG ini.

ba. Keempat, desk penanganan judi online dengan leading sector Polri. Desk kelima adalah desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara," ucapnya.

Keenam, desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan leading sector Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketujuh, desk keamanan

"Ketujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar sehingga ekonomi kita tumbuh, PDB kita juga meningkat dan ujungnya adalah perwujudan kes-

kejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, ketujuh desk itu akan bekerja dengan tugasnya masing-masing selama tiga bulan untuk mendorong percepatan program prioritas pemerintahan. Namun, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.

“Mulai hari ini, insya Allah semua langsung action bekerja di tujuh desk



ini. Oleh karenanya, kami semua mohon doa dan dukungan,” kata Pak Menko yang berpengalaman 10 tahun menjadi Kepala Badan Intelijen Negara itu.

Nah, tiga hari kemudian, BG mengemukakan lagi tujuh desks itu. Kali ini di depan para pejabat tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tentu saja agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga

yang baru terbentuk itu juga berlanjut di tingkat pemerintahan hingga pelosok.

Berbicara dalam Panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024, Menko Polkam Budi Gunawan sampai menyebut Piagam Madinah dalam presentasinya. Dalam kesempatan itu, BG menyampaikan materi berjudul “Pengarahannya Bidang Politik dan Keamanan”.

Dia mengemukakan pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur keruku-

Dia mengemukakan pula, menjaga stabilitas di setiap wilayah adalah tanggung jawab bersama, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercakup dalam 8 Astacita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi. “Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujarnya.

Mengutip Peraih Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu yang menulis



nan antara kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku lainnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah. Pelajaran utamanya, stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.

“Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,” ungkap BG

buku penting *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Menko Budi menjelaskan bahwa jika negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka akan muncul otoritarianisme. Sebaliknya, jika negara lemah sementara masyarakatnya kuat, yang terjadi adalah anarki. Namun, jika negara dan masyarakat sama-sama kuat, maka akan tercipta kesejahteraan.

Oleh sebab itu, BG mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan institusi yang kuat, terutama dalam bidang pelayanan publik. Terkait dengan itu, ia

menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah:

Pertama, penting untuk terus membangun dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketiga, berhati-hati dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Keempat, memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi. Kelima, memastikan pelaporan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif. "Kolaborasi antara pemerintah pusat,

tama masa kerjanya karena pemerintah berupaya memastikan pilkada berjalan aman, lancar, jujur, dan adil (jurdil). Kecuali itu, Desk Pilkada itu dibentuk untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang ditunjukkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). "Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI untuk tahun 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23," kata Budi Gunawan.

Data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI mengenai Indeks Kerawanan Pilkada 2024 menunjukkan sebanyak 21 daerah teridentifikasi rawan, dengan rincian 15 daerah mempunyai tingkat kerawanan tinggi dan enam daerah

sedang, ancaman konflik mencakup konflik yang dipicu rivalitas antarpasangan calon, terutama yang petahana (incumbent) dan nonpetahana, kemudian politisasi SARA.

Dalam pada itu, masih di Rakornas Sentul, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antar-intelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparannya, Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital. Ia mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Herindra menyebut fenomena ini



Ketiga, desk pemberantasan narkoba. Keempat, desk penanganan judi online dengan leading sector Polri.

sebagai "penyakit" yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah. "Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua," kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada. Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Menurut dia, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman. "Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya," ujar Herindra.

Ia menjelaskan, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap was-



pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama," ungkap Budi.

Pesan Menko BG ini relevan pula dengan agenda politik Pilkada serentak yang terjadwal pada Rabu, 27 November 2024 yang masih berada dalam rentang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Terkait desk Pilkada dengan leading sector Kementerian Dalam Negeri, Pak Menko mengemukakan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian akan berlintas koordinasi dengan 17 kementerian lembaga termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), juga Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Desk Pilkada menjadi satu dari tujuh prioritas pemerintah dalam 100 hari per-

lainnya dengan tingkat kerawanan sedang. Sebanyak 15 daerah yang tingkat kerawannya tinggi meliputi Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, jenis kerawannya mencakup konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpengukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua.

Sedangkan enam daerah dengan tingkat kerawanan sedang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah yang tingkat kerawannya

pada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

Khusus mengenai Pilkada, Herindra menyampaikan fase-fase kritisnya.

etapan calon. Saat itu, menurutnya, sangat berpotensi adanya sengketa hasil Pilkada dan menimbulkan sengketa calon peserta Pilkada. "Dari beberapa fase tersebut, BIN memetakan adanya beberapa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan. Di antaranya dari faktor eksternal, yaitu masalah radikalisme masih menjadi ancaman kita semua. Tentunya, kita jangan mengabaikan adanya tangan-tangan invisible yang mengganggu terhadap pelaksanaan Pilkada," bebernya.

Terorisme juga menurutnya juga

karena sudah sering dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN untuk mencegah terjadinya konflik," tandasnya.

Nah, rangkaian pembentukan tujuh satuan kerja (desk) lintas kementerian dan lembaga pada awalnya bermula dengan rapat paripurna pertama Kabinet Merah Putih pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam rapat kabinet itu sudah menyebut sejumlah persoalan yang menjadi tantangan segera yang dapat menghambat program kilat quick win 100 hari pertama pemerintahannya.



"Yang pertama pada saat pelaksanaan kampanye. Ini juga banyak gangguan-gangguan, dan ancaman yang berpotensi mengganggu terhadap pelaksanaan pilkada," ujar Herindra

Kedua, sambungnya, terjadi saat minggu tenang. Dia menyampaikan saat masa itulah justru berbagai potensi ancaman terjadi. "Mungkin namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang. Justru banyak mobilisasi yang di situlah peran intelijen. Ada intimidasi, misinformasi, maupun money politics," ungkapinya.

Fase ketiga menurutnya saat pen-

masih menjadi ancaman, meski saat ini tidak terlalu tinggi. Selain itu, masalah siber menjadi perhatian bersama, seperti berita bohong.

"Gangguan yang saya temukan di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi. Jual beli surat suara, penggelembungan suara, money politics maupun bentrok antar pendukung," imbuhnya.

Herindra mengatakan hampir semua wilayah di Indonesia rawan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. "Tapi saya yakin Pilkada ini

"Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Intelijen Negara, fokus. Ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas, inteligensi yang baik, dan bukti-bukti yang kuat, kita bisa segera mitigasi hal ini semua," kata Presiden..

Pada akhir 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, akan segera kelihatan bagaimana hasil mitigasi itu. Pasti jauh lebih banyak yang berharap keberhasilannya. ●

KOMINFO-KOMDIGI HINGGA DESK JUDI ONLINE

Dari tujuh satuan kerja bentukan Kementerian Politik dan Keamanan, Desk Judi Online sedang dan akan menjadi perhatian publik luas. Harap maklum, sesuatu yang selama ini tampak senyap dan tersembunyi, meletup terbuka dan sangat boleh jadi mengejutkan.

Pantas belaka menyebutnya sebagai mengejutkan. Kejutannya, lembaga negara –dalam hal ini Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang seharusnya memberan-

tas perjudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya jaringan internet, justru terlibat dalam melindungi kelangsungan judi online itu melalui sejumlah personelnnya yang mengeruk dana dari kegiatan perlindungan tadi.

Bahkan lebih dari sekadar terkejut, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid mengakui situasi kantornya sempat mencekam saat polisi menggeledah Kantor Kementerian Komdigi terkait kasus judi online yang melibatkan 11 oknum pegawainya. Terlebih, sambungnya, jumlah polisi yang datang cukup banyak sekitar 40-50 orang. “Jadi di dalam itu suasananya mencekam pasti, Pak,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, Selasa, 5 November 2024.

Toh Meutya menegaskan komitmen bahwa Komdigi akan dan sudah terbuka terhadap seluruh upaya pengembangan penyidikan. “Berapa kalipun

kepolisian harus datang, berapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kami, kami membuka pintu selebar-lebarnya,” ujar Bu Menteri yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024.

Dari sisi mitra Komdigi, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, justru mengemukakan tidak terkejut dengan dugaan keterlibatan ASN dalam kasus judi online. Ia mengaku telah lama memperingatkan adanya oknum di Kementerian Kominfo (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) yang terlibat, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Menkominfo periode lalu, Budi Arie Setiadi.

“Saat itu, saya sudah identifikasi kemungkinan keterlibatan ASN atau pegawai Kominfo. Tapi tidak mendapat perhatian dari Menteri Budi Arie,” ujar TB Hasanuddin, Selasa, 5 November 2024.

Menurut dia, Kominfo memiliki we-



wenang untuk memblokir situs judi online, sehingga dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas tersebut sangat disayangkan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini, kasus ini sudah terbukti, dengan polisi menetapkan belasan tersangka, termasuk 11 pegawai Komdigi.

Sebelumnya, polisi menemukan bahwa oknum pegawai Komdigi yang seharusnya bertugas memblokir situs-situs judi justru 'membina' situs-situs tersebut dengan imbalan Rp 8,5 juta per situs. Dari lebih dari seribu situs yang mereka lindungi, mereka meraup keuntungan hingga Rp 8,5 miliar per bulan.

Tambahan data, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa kerugian negara akibat judi online mencapai Rp 600 triliun per Maret 2024, dengan 168 juta transaksi dan perputaran dana hingga Rp 327 triliun. Sedangkan berdasarkan data Drone Emprit, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah pemain judi online sebanyak 201.122 orang, jauh melampaui negara-negara lain seperti Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Rusia.

Dengan latar itu, TB Hasanuddin meminta Menteri Komunikasi dan Digital yang baru, Meutya Hafid, untuk melakukan pembersihan internal dan memperkuat komitmen pemberantasan judi online. Sebagai mantan Ketua Komisi I DPR, Meutya diharapkan memiliki semangat yang sama dalam memberantas praktik ilegal ini.

"Harapan kita sekarang ada pada menteri yang baru, untuk membersihkan Komdigi dari segala bentuk keterlibatan dalam judi online," tegasnya. Ia juga mendesak pihak kepolisian tidak ragu dalam menangani kasus ini dan menindak tegas semua yang terlibat.

Sejauh ini polisi sebenarnya bukan ragu. Terlebih setelah Menko Polkam Budi Gunawan yang berlatar jenderal polisi sudah membentuk tujuh desk termasuk yang menangani judi online dengan leading sector (badan penghelat) Polri. Yang jelas, proses tindakan penegakan hukum (apalagi kelihatan terorganisir) memang memerlukan waktu untuk memetakan cakupan jaringannya dan pembuktiannya.

Nah, dalam hal ini, pengungkapan keterlibatan pegawai Komdigi justru berlangsung sebelum peluncuran tujuh

desk oleh Kemenko Polkam pada Senin, 4 November 2024. Sedangkan tiga hari sebelumnya, Jumat, 1 November 2024, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya (Polda Metro Jaya) menggeledah satu rumah toko (ruko) di kawasan Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ruko itu diduga menjadi kantor pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat judi online. Polisi turut membawa beberapa tersangka saat penggeledahan yang dipimpin oleh Direktur Reserse

Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Kombes Wira mengungkapkan pula, tersangka AK sebenarnya gagal dalam seleksi penerimaan tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negara yang sifatnya terbatas di kementerian itu pada akhir 2023. Namun, justru AK ini yang justru mengendalikan Kantor Satelit yang digunakan untuk melindungi situs judi online dengan imbalan uang.

"Artinya, bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk



Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. "Berdasarkan keterangan para tersangka, kantor tersebut dikendalikan oleh tiga orang tersangka dengan inisial AK, AJ, dan A," ungkap Kombes Wira Satya.

Sedangkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menambahkan, para tersangka pula yang menentukan pilihan lokasi. "Mereka, menyewa mencari lokasi ini sendiri sebagai kantor satelit," ujar

mengatur pemblokiran website perjudian online," ujar Wira.

Ia mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman secara intensif untuk mengetahui alasan AK yang tidak lulus seleksi tetap dapat bekerja di Komdigi. "Khususnya, bekerja sebagai tim pemblokiran website judi online," ucap Wira.

Apa yang dikemukakan oleh Kombes Wira tentang AK ini menyulut tuduhan bahwa rekrutmen AK meru-

• INFO UTAMA

pakan kesengajaan yang melibatkan para petinggi Kementerian Kominfo tak terkecuali Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi, yang pada Kabinet Merah Putih menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Budi Arie sendiri menjelaskan, perekrutan AK itu dimulai saat Kemenkominfo kekurangan sumber daya untuk memberantas situs judi online di Indonesia pada Juli 2023. Menurut dia, kekurangan di Kominfo itu bisa terjadi antara pihaknya memiliki keterbatasan alokasi anggaran untuk menambah sumber daya di Kominfo.

Kemudian, untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya melalui Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika melakukan proses rekrutmen. "Untuk mengatasi kekurangan SDM dilakukanlah rekrutmen petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non-pegawai Kominfo," ujarnya, Minggu, 10 November 2024.

Tim tersebut awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Namun, menurut Budi, jumlah tersebut belum bisa memenuhi target pemberantasan judi online. Selanjutnya, dalam masa rekrutmen itu, terdapat sejumlah pihak yang mengajukan diri, salah satunya sosok berinisial T.

T ini, kata Budi, mengajukan sejumlah nama hacker muda yang ingin mengabdikan diri untuk memberantas situs perjudian online. Dari nama yang diajukan T itu ada inisial AK. "Munculah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda antijudol. Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men-take down 50.000 sampai 100.000 per hari," sambung Budi.

Atas kepiawaian AK, Budi menyetujui AK diterima dalam tenaga pengawasan dan penindakan atau tim pemberantasan situs judi online di bawah Direktorat Pengendalian. "AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama," ungkapnya.

Kecuali itu Budi mengaku sebagai korban persekongkolan bandar judi sehingga difitnah terlibat dalam upaya perlindungan situs judi online agar tidak diblokir. "Nama saya dikait-kaitkan dan di-framing dengan aktivitas haram

yang dilakukan T yang sebenarnya jauh panggang dari api," kata Budi.

Ia menyatakan tidak mengetahui para mantan bawahannya melakukan aktivitas melindungi situs judi online bersama seseorang berinisial T dan AK. Karena pengawasan langsung dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika). "Tenaga pengawasan dan penindakan (takedown) bekerja

dan diawasi di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah menteri," kata Budi.

Budi mengatakan, dengan mencautnya kasus ini, justru dirinya merasa dibohongi. Karena rupanya di masa kepemimpinannya, para bawahannya melakukan praktik haram melindungi bandar judi, yang kemudian diungkap oleh Polda Metro Jaya usai dirinya tak lagi menahkodai kementerian tersebut.



"Tidak ada kaitan aktivitas melindungi situs judol dengan saya. Saya justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi," kata Budi.

Toh kepolisian masih terus mendalami kasus judi online yang melibatkan para pegawai Komdigi itu. Perkembangan terbaru, Polda Metro Jaya menangkap dua orang lagi yang terkait judi online ini.

"Atas kerja keras daripada rekan-rekan tim penyidik di lapangan bahwa pada 9 November 2024, tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN," kata Kombes Wira Satya Triputra di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Minggu, 10 November 2024.

Selain MN, polisi juga menangkap seorang lain berinisial DM. Dalam hal ini MN berperan sebagai penghubung dari bandar judi dengan para tersangka lain dan DM sebagai pembantu.

"Jadi saya ulangi lagi, bahwa peran MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya, supaya tidak diblokir," sebutnya.

Belum dijelaskan detail terkait latar belakang dari dua tersangka tersebut. Wira mengatakan bahwa para tersangka itu bukan pegawai Komdigi. "Dari luar, orang luar," katanya.

Namun, tambahan dua tangkapan ini akan lebih memudahkan pemetaan figur-figur yang terlibat. Dari penelusuran sejauh ini, penyelidikan dan penyidikan polisi membiarkan jaringan ini berkomunikasi melalui berbagai saluran untuk sementara waktu sambil memetakan siapa yang berada di dalamnya dan berperan sebagai apa.

Begitulah awal mula terungkapnya kaitan antara para bandar judi online dengan pegawai Kominfo yang terlibat. Setidaknya sejak pertengahan 2024.

Sejak Juni 2024, serangkaian pengungkapan operator judi online di berbagai kota besar Indonesia seperti Jakarta, Medan, dan Semarang sudah berlangsung. Malah di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terungkap pelaku TCA yang menampung deposit para pemain

hingga Rp365 miliar di lima rekening bank.

TCA ditangkap di sebuah hotel Tasikmalaya pada akhir Juni 2024. Dari Tasikmalaya semula TCA hendak menuju Kamboja untuk menemui istri dan adik iparnya yang mengoperasikan judi online di sana.

"Pada Rabu 26 Juni sekitar jam 04.30 WIB, telah dilakukan pengamanan atau penangkapan terhadap tersangka di sebuah hotel di Tasikmalaya Kota. Kemudian, dia dibawa ke Polres Ciamis," ucap



Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast di Mapolda Jabar, Kamis, 27 Juni 2024.

Sedangkan yang beroperasi di Jakarta, Medan, dan Semarang terungkap saat Bareskrim Polri melimpahkan sembilan tersangka pelaku judi online beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Penyidik Kasubnit Unit 3 Subdit I Direktorat TP Cyber Bareskrim Polri, AKP Bambang Meiriawan mengatakan, para tersangka

beroperasi di tiga wilayah hukum yang berbeda yaitu Semarang, Jakarta dan Medan.

Mereka adalah para karyawan yang berperan melakukan pembuatan rekening untuk memudahkan transaksi situs judi online 1Xbet. "Selain itu mereka berperan melakukan transaksi baik penerimaan, pengumpulan, maupun pengiriman uang hasil transaksi judi dalam situs tersebut," ungkap Bambang, di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, Kamis, 27 Juni 2024

AKP Bambang mengemukakan pula, untuk kasus ini Bareskrim masih membidik dua buron yang berperan sebagai bandar di luar negeri. "Meski servernya di Filipina dan Kamboja, aktivitas judinya di Indonesia sehingga bertentangan dengan peraturan hukum kita yang melarang segala bentuk aktivitas perjudian," ucapnya.

Nah, dari rangkaian pengungkapan kasus dan perkara sejak awal Juni 2024 itulah terendus komunikasi para bandar dengan pegawai Kementerian Kominfo. Alhasil, pada akhir Oktober 2023, Bareskrim Polri membekuk salah seorang pegawai di Kementerian Komdigi terkait kasus judi online.

"Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis, 31 Oktober 2024.

Brigjen Truno mengaku belum bisa menjelaskan peta jaringan ini secara gamblang karena dalih masih pengembangan kasus. "Penyidik Polri masih bekerja. Jadi, tunggu hasil penyidikannya," kata dia.

Toh keesokan harinya, Jumat, 1 November 2024 berlangsunglah penggerebekan Kantor Satelit Komdigi di Bekasi. Selanjutnya, pada Senin, 4 November 2024, Desk Judi Online bersama enam desk lainnya meluncur dari Kantor Menko Polkam. Dengan masa kerja tiga bulan dan dapat diperpanjang. Kita tunggulah hingga 100 hari. ●



KEJUTAN GOYANG SADBOR DAN MAKAN BERGIZI GRATIS

Goyang sadbor sudah viral di media sosial TikTok. Bintangnya adalah Gunawan Sadbor TikTok (TikToker) yang terjerat kasus promosi judi online. Apa kaitannya dengan makan bergizi gratis? Masa depan bangsa menjadi taruhannya.

Cukup beruntung Gunawan Sadbor. Meski masih berstatus tersangka dan sempat menjadi tahanan selama beberapa malam, penahanannya ditanggihkan.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengemukakan, polisi telah menangguhkan penahanan TikToker Gunawan Sadbor. Selanjutnya yang bersangkutan mendapat peran baru sebagai duta antijudi daring atau online.

"Sementara Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk antijudi online," kata Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Kapolri Sigit mengatakan bahwa

penangguhan penahanan dan pengangkatan Gunawan Sadbor sebagai duta antijudi daring merupakan jawaban Polri terkait pertanyaan masyarakat atas penangkapan TikToker tersebut. Ia menjelaskan, Polri tidak tebang pilih dalam memberantas kasus judi daring karena dari penangkapan Gunawan Sadbor, Polri juga berhasil mengamankan dua orang yang ada di belakangnya.

"Dari Gunawan Sadbor ini kami kembangkan dan kami menangkap dua tersangka selaku marketing yang memberi hadiah," tuturnya.

Sebelumnya, Satuan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi mengungkap peran TikTok terkenal Gunawan Sadbor, 38, warga Kampung Jawa Barat, dalam kasus

promosi situs judi daring.

"Gunawan berperan membantu kepada tersangka utama AS, 39, dengan cara memfasilitasi dan menyediakan akun TikTok @sadbtor86 untuk siaran langsung sekaligus mempromosikan situs web judi daring Flokitoto," kata Kapolres Sukabumi AKBP Samian saat konferensi pers di Mapolres Sukabumi, Senin, 4 November 2024.

Menurut Samian, pada kasus promosi judi daring ini, pihaknya menetapkan dua orang tersangka, yakni AS sebagai pelaku utama yang mempromosikan situs judi daring dan Gunawan Sadbor berperan memfasilitasi promosi tersebut melalui akun TikTok, @sadbtor86.

Kapolres menambahkan kasus ini bisa terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang melihat kegiatan promosi situs judi daring di akun @sadbtor86 saat siaran langsung. Mendapat laporan tersebut, Tim Patroli Siber Polres Sukabumi kemudian melakukan penyelidikan dan memantau aktivitas akun milik Gunawan Sadbor yang ternyata sudah aktif setidaknya sejak Oktober 2024 dengan menampilkan tarian Goyang Sadbor alias goyang ayam patuk karena menirukan gerakan unggas ini.

Lelaki yang pernah menjadi penjahit keliling itu menari maju mundur kemudian disawer oleh penontonnya. Gerakan sederhana itu rupanya menarik banyak penonton sehingga Sadbor membuka donasi (gift) untuk para penonton yang menyukai tayangannya. Alhasil, ia bisa meraih Rp 400 sampai Rp 500 ribu dari gift (saweran) penonton. Keberhasilan Sadbor kemudian diikuti oleh warga sekampung. Maka Bojongkembar pun viral sebagai Kampung TikTok dengan sekitar 300-an warga desa tersebut menayangkan siaran langsung setiap hari.

Popularitas gerakan ayam mematauk, sadbor, dan Kampung TikTok itu rupanya dimanfaatkan oleh penyelenggara judi online dengan meminta (request) promosi judi online melalui tayangan audio visual TikToker yang ditonton banyak netizen. Saweran dari penonton biasanya memang disebut sumbernya dari mana. Nah, pada saat menyebut situs judi online seperti Flok-

itoto itulah terendus promosi melalui tayangan sadbor.

Lebih dari itu, ada warganet yang mengadukan promosi judi online itu ke polisi hingga Gunawan Sadbor ditangkap. "Aduan itu kemudian ditindaklanjuti dengan patroli siber Satreskrim Polres Sukabumi bersama Dit Siber Polda Jabar dan di-backup Dit Siber Bareskrim Mabes Polri. Kita dapatkan ternyata ada gift-gift yang diberikan oleh penyedia website judi online,"

puluhan hingga ratusan ribu yang juga mempromosikan judi online.

Toh Kapolri menjawabnya dengan menanggukkan penahanan Gunawan Sadbor dan memberi peran sebagai duta antijudi online. Tapi, apa hubungannya dengan makan bergizi gratis? Titik temunya adalah Kabupaten Sukabumi. Kabupaten ini mencerminkan persoalan kompleks antara kemiskinan, gejala mengemis online juga judi daring, dan uji coba makan bergizi gra-



ujar AKBP Samian, Selasa, 5 November 2024.

Nah, itulah yang mengundang tanggapan bahwa penangkapan Sadbor menunjukkan hukum tajam ke masyarakat lapisan bawah, namun tumpul ke lapisan menengah dan atas. Ini berkaitan dengan sejumlah pesohor yang pernah mempromosikan judi online namun tak pernah diproses oleh polisi. Begitu pula para pegiat media sosial dengan jumlah pemirsa di atas

tis untuk mencukupi nutrisi warga dan akhirnya menunjang pertumbuhan fisik serta kecerdasan.

Sebagian kompleksitas itu pernah diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan sebelum menjabat Kepala Negara. Ia mengisahkan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan uji coba program makan siang gratis untuk anak di daerah-daerah. Prabowo mengatakan anak-anak mengonsumsi makanan yang disajikan, namun lauk-

ya dibawa untuk keluarga di rumah.

Prabowo mengatakan program makan siang gratis ini dilaksanakan karena berdasarkan data yang diperolehnya, hampir 25 persen anak-anak di Indonesia tidak makan pagi. "Memang benar program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa, hampir 25 persen tidak makan pagi tiap hari," kata Prabowo saat menggelar acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa

dang dibungkus dibawa ke rumah untuk keluarganya. Ini dua jam dari Ibu Kota, saya tidak rela negara saya begini. Bagaimana saudara-saudara kalau pemimpin elite Indonesia masih cek-cok di antara kita hanya rebutan kursi, padahal faktanya kondisi anak-anak kita seperti ini," kata Prabowo.

Persoalan kurang gizi di tengah keluarga di Sukabumi itu tentu erat kaitannya dengan rendahnya daya beli, bahkan kemiskinan. Masalah ini semakin kompleks dengan perkem-

kasihan masyarakat ganti memberikan amal karitatifnya," jelasnya, dikutip dari rilis laman Universitas Airlangga, Kamis, 19 Januari 2023.

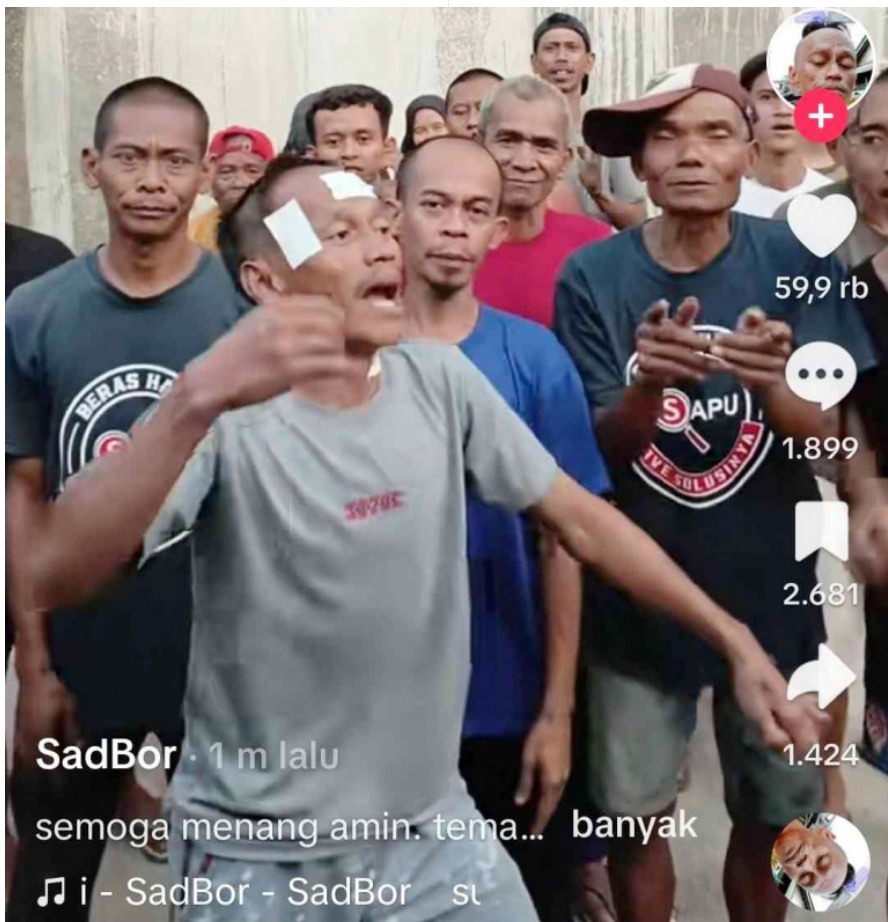
Prof Bagong juga mengecam kreator konten yang mencoba mengeksploitasi orang tua mereka. Dia menyebut, ada banyak anak muda di belakang layar yang berperan, terutama untuk mengoperasikan media sosial tersebut. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair ini menilai bahwa pemerintah harus bisa melakukan perang wacana. Pasalnya, 'pengemis' online tidak dapat ditindak seperti pengemis pada umumnya dengan dukungan dinas sosial atau Satpol PP.

Ia mengemukakan, biar masyarakat yang menghakimi tindakan tersebut dengan cara tidak menyumbang maupun menonton konten 'ngemis' online. Dia berpesan supaya pemerintah dan masyarakat bersikap adil serta tidak memberi stigma negatif terhadap orang miskin. Alasannya, banyak juga masyarakat miskin yang butuh bantuan sehingga terpaksa mengemis.

Penindakan keras menurutnya justru perlu diterapkan kepada orang yang memanfaatkan orang miskin demi kekayaan pribadi. Guru besar sosiologi ekonomi ini menekankan perlunya memilah karena masyarakat tidak bisa menghakimi semuanya salah. "Harus dilihat siapa yang melakukan karena dia butuh hidup, itu tidak masalah. Ini kan sama seperti artis yang membuka donasi terbuka, kan sama. Lah kenapa kalau artis tidak kecam, orang miskin dikecam," ujarnya.

Sedangkan sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono. Kartono menilai perilaku mengemis online terjadi karena pertemuan dua hal, pertama, yaitu perkembangan TIK berupa sosial media. Sementara faktor lainnya adalah tingkat kemiskinan warga Indonesia. Perkembangan IT tadi kata Drajat dimanfaatkan secara kreatif oleh orang-orang tertentu untuk mendapat penghasilan. Dalam hal ini orang-orang yang merelakan dirinya untuk dikasihani atau mengemis.

"Dalam sosiologi mereka diistilahkan sedang manajemen peran atau menyeting dirinya untuk dikasihani



Barat, Sabtu, 2 Maret 2024..

Menurut dia, uji coba program makan siang gratis salah satunya dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi tepatnya berada di Kampung Cikembang. "Kita sudah mulai program uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi tepatnya di Kampung Cikembang, dua jam dari Ibu Kota," kata dia.

Dalam uji coba tersebut, 3.000 siswa mendapat makan siang gratis. Prabowo menceritakan anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut membawa pulang lauknya. "Kenyataan, bahwa anak-anak itu makan tapi lauknya ka-

bangsan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa gejala untuk meningkatkan penghasilan melalui upaya mengemis online memanfaatkan media sosial seperti TikTok sebagaimana tayangan Gunawan Sadbor itu.

Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga Bagong Suyanto mengemukakan, substansi para pengemis online tidaklah berbeda, yakni meminta belas kasihan orang agar memperoleh sesuatu. "Jadi mengemis ini tidak mudah, makin banyak saingan. Sehingga mereka perlu berkreasi untuk mendapatkan belas

karena telah miskin, menunjukkan kesengsaraan dan lainnya,” kata Drajat, Senin, 23 Januari 2023.

Ia menilai peluang kreativitas kemiskinan tersebut dibantu dengan teknologi baru yang menggambarkan pengemis tidak sekadar pasrah. Mereka dianggap kreatif dengan memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari manajemen kesan untuk mendapatkan perhatian. Namun, kreativitas itu memberikan dampak luas terhadap masyarakat secara umum dan juga bangsa karena disiarkan secara online. Antara lain, bangsa pengemis online sekaligus dermawan yang mencerminkan kemungkinan ketimpangan lebar antara yang super kaya dan super miskin.

Tambahan pula, fenomena ini juga akan berdampak langsung terhadap dunia sosial. Meskipun sebagian orang melihat gejala ini sebagai sebuah hiburan semata, ketika semakin banyak yang melakukan hal tersebut maka akan ada risiko normalisasi perilaku yang sebenarnya jauh dari positif dan produktif. Sebut saja misalnya, warga desa yang lebih memilih menjadi pengemis gift online daripada menjadi petani atau nelayan maju dengan bantuan TIK.

Pada titik inilah negara menjadi tumpuan untuk mengatasi banyak persoalan yang saling terkait tadi. Dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengajak seluruh jajaran kepala daerah untuk menjalankan program Astacita di wilayah masing-masing.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga. Sehingga visi dan misi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dalam delapan Astacita berjalan dengan baik,” kata Budi Gunawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, kepala daerah merupakan sosok yang sangat berperan dalam memajukan wilayah lantaran mengetahui kebutuhan dan kelebihan

wilayah masing-masing. Dengan pengetahuan tersebut, kepala daerah dapat dengan mudah mengimplementasikan program kerja pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menko Polkam yang kerap disingkat dengan BG itu menambahkan, salah satu program Astacita yang harus diterapkan di daerah yakni swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. “Sebagai pimpinan di daerah peran Bapak dan Ibu sekalian sangat-

membaik,” kata dia.

Berdasarkan hasil penelitian itu, Budi yakin program makan bergizi pemerintah dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut, dengan adanya rakor ini, Budi berharap seluruh kepala daerah memiliki semangat yang sama dalam menjalankan program Astacita hingga pelosok daerah Indonesia.

Tapi, saat TIK dalam bentuk media sosial semakin meluas hingga



lah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” kata Budi Gunawan.

Budi pun mengambil contoh program makan bergizi gratis. Menurut dia, program tersebut harus diberlakukan agar masyarakat mengalami perbaikan gizi sehingga IQ atau daya pikir pun menjadi meningkat. “Hasil riset yang dilakukan oleh James R. Flynn di 72 negara, memperlihatkan bahwa dalam durasi 72 tahun. Dari 1948-2020 IQ masyarakat dunia ini naik menjadi 2,2 poin karena pemenuhan gizi yang

pelosok, bayangkan sulitnya mencapai swasembada pangan, memperbaiki kualitas gizi dan selanjutnya sumber daya manusia, namun warganya enggan menjadi petani dan nelayan yang maju memanfaatkan teknologi itu.

Malah lebih memilih kegiatan mengemis online juga mempromosikan judi daring. Tambahan pula yang termakan oleh promosi judi online hingga kecanduan bertaruh, juga menggunakan TIK. Yang beruntung seperti Gunawan Sadbor pasti jauh lebih sedikit. ●

KABINET MASKULIN PRABOWO

Jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia relatif setara, tetapi representasi perempuan yang menduduki jabatan publik sangatlah minim. Sosok perempuan yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih Prabowo pun hanya 5 dari total 53 menteri dan kepala lembaga (9,43 persen). Posisi sisanya diduduki oleh laki-laki.

Sebagai perbandingan, persentase rata-rata pemimpin perempuan setingkat menteri di negara OECD adalah 35,7 persen. Padahal, selama masa kampanye, Prabowo berjanji untuk mendorong kesetaraan dan keterwakilan perempuan di pemerintahan.

Melihat proporsi gender di kabinet saat ini, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada komitmen serius dari pemerintah dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah publik. Janji kampanye hanyalah sebuah komitmen omon-omon yang tidak terealisasi, bahkan sejak hari pertama pelantikan presiden dan kabinetnya.

Ini adalah dampak dari politik transaksional dan bagi-bagi kue kekuasaan. Masalahnya, pemimpin partai didominasi oleh laki-laki. Maka, posisi menteri jatah partai juga lebih besar kemungkinannya untuk diberikan kepada laki-laki pula.

Oleh karena itu, tuntutan tanggung jawab ini tidak bisa hanya diarahkan ke Prabowo selaku presiden, tetapi juga kepada partai sebagai mesin politik yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki kader-kader perempuan berkualitas di partainya. Yaitu, agar partai tidak hanya mengajukan orang-orang yang dekat dengan elite partai dan kompetensinya patut dipertanyakan.

Beberapa hal dapat menjadi penyebab minimnya representasi perempuan di parlemen dan eksekutif. Pertama, politik seringkali dinilai sebagai ranah pekerjaan milik laki-laki dan bidang kerja yang maskulin. Anggapan ini kemudian menciptakan ketidakadilan sistematis yang membuat perempuan jadi termarginalkan dari sistem dan budaya politik. Akhirnya, secara tidak langsung hal ini membuat perempuan semakin enggan untuk masuk ke pekerjaan di bidang politik.

Kedua, hal ini secara erat berkaitan dengan nilai-nilai patriarki yang "mengharuskan" seorang pemimpin adalah laki-laki. Contoh, dalam kampanye Pilkada 2024, calon bupati dan wakil bupati Sleman, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa, memasang baliho dalam bahasa Jawa yang bertuliskan "Milih imam (pemimpin) kok perempuan, jangan ya dik ya! Imam (pemimpin) itu harus laki-laki".

Ucapan seksis juga dilontarkan oleh calon wakil gubernur Banten, Dimiyati Natakusumah, saat debat cagub-cawagub, "... karena itu, wanita jangan terlalu dikasih beban berat, apalagi jadi gubernur. Itu berat. Maka, laki-lakilah yang harus membantu memaksimalkan Banten ini maju."

Oleh:
Cantyo Atindriyo Dannisworo
Dosen Fakultas Psikologi
Universitas Indonesia

Implikasi

Pesan-pesan tersebut secara tidak langsung ingin mengurung perempuan agar tetap berada di ranah domestik dan membatasi ruang untuk berkontribusi di ranah publik. Seksisme dan diskriminasi

ini berdampak terhadap semakin lebarnya jurang kesetaraan gender dan berkurangnya rasa aman bagi perempuan untuk bekerja di bidang politik.

Dampak lain yang dapat terjadi atas minimnya representasi perempuan adalah isu-isu perempuan, seperti kekerasan seksual, kesejahteraan ibu dan anak, dan kerja keperawatan tidak dapat ditangani dengan baik dan responsif. Tidak ada kepedulian dari pemerintah terhadap isu-isu ini karena sosok pemimpin laki-laki tersebut kemungkinan tidak pernah terdampak sama sekali atas masalah-masalah yang dialami oleh perempuan.

Minimnya representasi perempuan juga akan menguatkan seksisme dalam ranah jabatan publik. Perempuan dianggap sebagai "makhluk asing" yang tidak memiliki kapabilitas cukup di posisinya.

Salah satu contohnya adalah ucapan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat berbicara mengenai pergantian menteri "... karena kemungkinan besar menlu yang akan datang adalah laki-laki, mestinya lebih berani daripada Bu Menlu (Retno Marsudi)."

Seksisme di ranah politik ini akan semakin mempertebal atap kaca (glass-ceiling atau tembok hambatan yang tidak terlihat) bagi perempuan untuk menembus posisi-posisi pemimpin di berbagai kementerian dan lembaga. Secara lebih luas, hal ini juga berpotensi memberikan dampak buruk untuk persepsi kepemimpinan perempuan secara umum di masyarakat.

Pemimpin dengan kualitas feminin

Riset membuktikan bahwa seseorang yang hanya memiliki kualitas maskulin secara berlebihan memiliki konsekuensi negatif. Misalnya lebih mungkin untuk berperilaku agresif dan cenderung memiliki sikap permusuhan terhadap orang lain yang lebih tinggi.

Dalam teori gender, seseorang dianggap lebih sehat secara mental dan memiliki karakteristik yang positif jika ia memiliki kualitas maskulin dan feminin yang setara, atau disebut androgin.

Penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang androgin terbukti dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dalam menghadapi situasi krisis. Secara perilaku, pemimpin androgin bisa menjadi seseorang yang tegas, tetapi juga tetap bisa menunjukkan kepedulian dan empati.

Di dalam konteks formasi kabinet, perlu adanya kombi-

nasi antara sosok maskulin dan feminin yang cukup setara di dalamnya agar pemerintahan dan kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.

Adanya keseimbangan proporsi laki-laki dan perempuan dalam sebuah tim juga berdampak positif dalam performa, inovasi, dan kreativitas kerja. Hal ini tentu akan berpengaruh baik pada implementasi kebijakan dan implikasi langsungnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Perempuan juga telah terbukti menunjukkan kepemimpinan yang lebih efektif dalam situasi krisis. Misalnya, kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang dipuji oleh banyak pihak karena mendahulukan keselamatan nyawa penduduknya dan menggunakan pendekatan yang humanis dalam mengatasi situasi krisis.

Selain itu, representasi perempuan sebagai pemimpin

pakan hak prerogatif presiden. Namun, berkaca pada kabinet yang baru terbentuk ini, muncul pertanyaan, apakah perlu ada upaya afirmasi untuk memastikan keterwakilan perempuan di eksekutif seperti aturan yang sudah ada untuk lembaga legislatif?

Meski sudah diatur untuk memiliki jumlah pencalonan anggota legislatif perempuan di DPR dan DPRD sebanyak 30 persen, jumlah anggota legislatif perempuan selama 2018-2023 masih di bawah 23 persen. Adanya aturan belum tentu menjamin terpenuhinya keterwakilan perempuan, tetapi hal ini dapat menjadi satu langkah afirmasi awal untuk mengikat komitmen pemerintah.

Selain itu, presiden juga perlu untuk memastikan bahwa ada sosok di kabinet yang dapat merepresentasikan kelompok dan gerakan perempuan sebagai upaya untuk mendorong dan mengawal kebijakan pro perempuan yang ada.



dapat menjadi role model positif untuk anak-anak. Hal ini sangat penting bagi anak, khususnya anak perempuan, untuk menyadari bahwa perempuan bisa dan mampu untuk menduduki jabatan publik sehingga aspirasi anak dapat tumbuh dan lahir pemimpin-pemimpin perempuan di masa depan karena anak-anak terinspirasi dari contoh konkret yang mereka lihat.

Mengikat komitmen

Benar bahwa pemilihan menteri dan kepala lembaga meru-

Bangsa ini sama sekali tidak kekurangan sosok perempuan yang mumpuni dalam berbagai bidang sehingga ini adalah masalah komitmen dan political will.

Rakyat berhak bertanya dan menuntut pemerintah untuk memenuhi janji-janji dalam isu kesetaraan gender. Prabowo masih memiliki kesempatan untuk merombak kabinet maskulinnya menjadi kabinet yang penuh keragaman sehingga 'bhineka' kembali memiliki makna dan tidak hanya menjadi sebuah tulisan tanpa arti yang terpampang di setiap ruang rapat kementerian. ●



ANTISIPASI KERAWANAN PILKADA

Setiap tahapan dalam Pilkada 2024 memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda berdasarkan geografis dan psikologi pemilih.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, menyatakan, karena setiap tahapan memiliki kerawanan, maka dari itu perlu adanya antisipasi yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu.

"Setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi," kata Lolly, Kamis, 7 November 2024.

Lolly menjelaskan, kerawanan dapat terjadi karena adanya dinamika politik di masyarakat. Kerawanan juga bisa diakibatkan kondisi sosial politik di masyarakat. Sebab, pemilihan di setiap tingkatan memiliki dinamika yang berbeda-beda.

"Kerawanan pemilihan juga disumbang oleh kondisi sosial politik yang terjadi mulai dari level nasional hingga daerah," jelas mantan Anggota Bawaslu Jawa Barat ini.

Maka dari itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI ini meminta agar jajaran pengawas untuk lebih peka terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Lolly mengingatkan agar pengawas Pemilu harus terus mengawasi dan mengawal seluruh proses tahapan Pilkada 2024.

"Jika tidak dijaga dan dikawal dengan baik, besar peluang hal ini memberi pengaruh terhadap penyelenggara Pilkada 2024," kata mantan Redaktur Berita Pers Mahasiswa Suaka Sunan Gunung Djati itu.

Dalam buku 'Inovasi Pengawasan Pemilu 2024, Refleksi Kinerja Seorang Pengawas Pemilu' yang ditulis Lolly pada 2024, disebutkan, ada empat dimensi indikator dalam Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang disusun Bawaslu jelang perhelatan Pilkada 2024.

Pertama, dimensi sosial politik yang meliputi sub dimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara. Kedua, dimensi penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas sub dimensi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan Pemilu.

Ketiga, dimensi kontestasi yang terdiri atas sub dimensi hak pilih, kampanye calon. Keempat, dimensi partisipasi yang meliputi sub dimensi partisipasi memilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

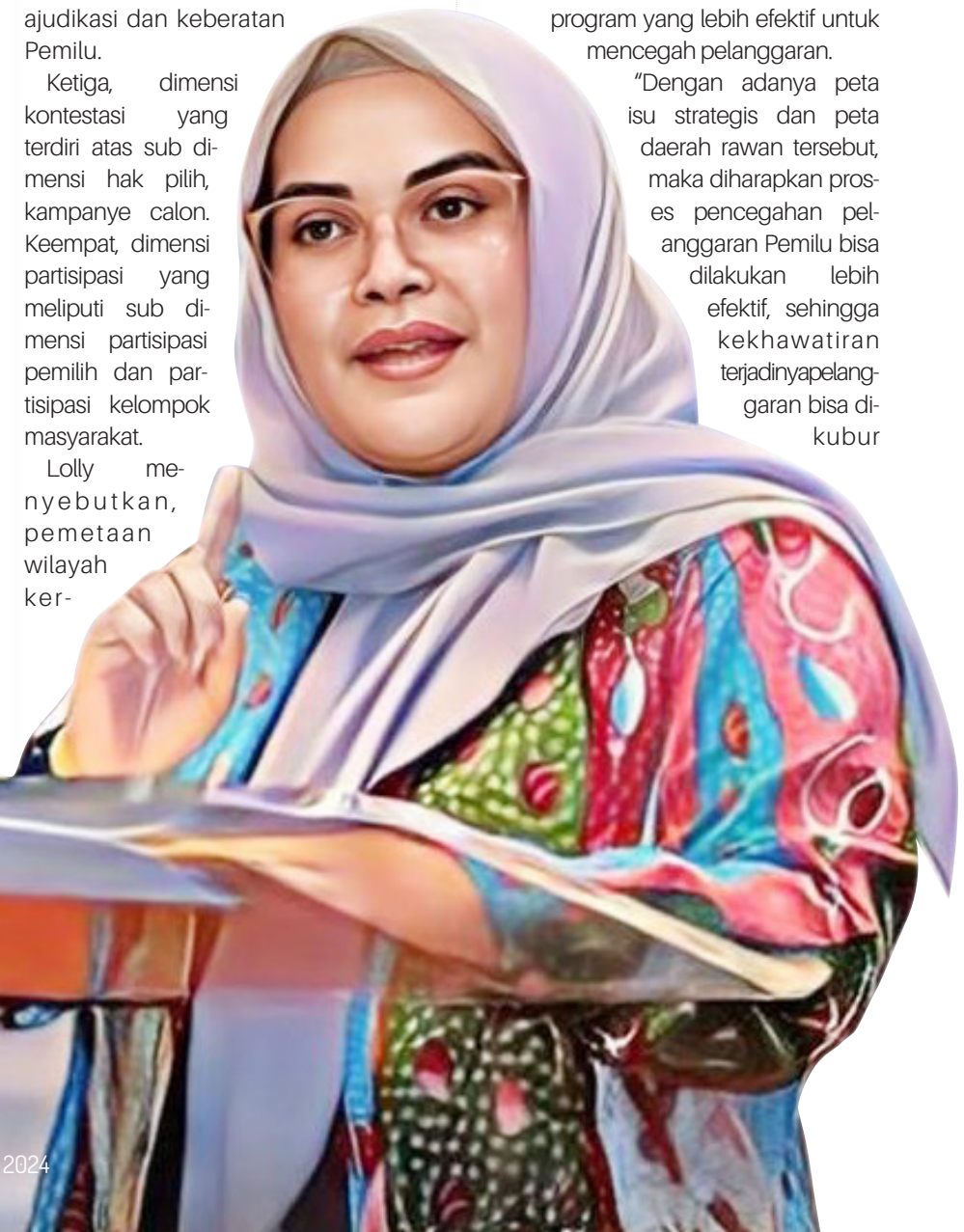
Lolly menyebutkan, pemetaan wilayah ker-

awanan ini untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran di Pilkada 2024. Selain itu, juga untuk menyusun program pencegahan.

"Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan pemilihan, dan menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan. Hasil pemetaan IKP ini menjadi mitigasi awal untuk melakukan strategi pencegahan," tulis Lolly dalam bukunya.

Lolly berharap, dengan adanya IKP ini, pengawas pemilu bisa membuat suatu program yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran.

"Dengan adanya peta isu strategis dan peta daerah rawan tersebut, maka diharapkan proses pencegahan pelanggaran Pemilu bisa dilakukan lebih efektif, sehingga kekhawatiran terjadinya pelanggaran bisa dikubur





Pemilu Tahun 1955

Pemilu nasional pertama di Indonesia dilaksanakan sebanyak dua kali untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 25 Desember 1955.

Melansir laman Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, pemilu tahun 1955 menggunakan sistem proporsional. Artinya, kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbang perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut. Oleh karenanya, sistem itu disebut sebagai sistem berimbang. Sebab, wilayah negara adalah daerah pemilihan, akan tetapi karena terlalu luas maka dibagikan berdasar daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi melalui perbandingan jumlah penduduk.

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden di mana UUD 1945 dijadikan sebagai Dasar Negara, serta penggantian Konstituante dan DPR hasil pemilu dengan DPR-GR.

dalam-dalam," tulis Lolly.

Pemetaan IKP juga memperlihatkan kompleksitas kendala yang akan dihadapi Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan politik uang.

Kendala pertama adalah modus pemberian politik uang makin beragam, apalagi mulai ada metode politik uang secara elektronik. Kedua, bukti dan sanksi dalam laporan politik uang tidak mendukung upaya pembuktian. Ketiga, regulasi belum optimal dalam menjerat pelaku politik uang. Keempat, masyarakat memiliki sikap permisif terhadap praktik politik yang di masyarakat.

"Dalam penyelenggaraan pemilu di masa-masa mendatang, modus yang akan digunakan dalam praktik politik uang lebih beragam dibandingkan pemilu-pemilu di masa yang lalu. Misalnya, memberi secara langsung (cash dan voucher), memberi barang atau memberi janji," tulis Lolly.

Dalam mencegah politik uang pada perhelatan pemilihan, Bawaslu meng-

gerakan pengawasan partisipatif. Lolly menyampaikan, pengawasan partisipatif harus menjadi spirit yang terus digaungkan dan diimplementasikan. Sebab, pengawasan partisipatif menjadi salah satu andalan program kerja pengawas pemilu.

Lolly mengatakan, peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu Bawaslu melakukan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi jalan-



Kerawanan pemilihan juga disumbang oleh kondisi sosial politik yang terjadi mulai dari level nasional hingga daerah.

nya seluruh tahapan pemilihan.

"Peran serta masyarakat yang efektif dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu," tulis Lolly.

Selain itu, Bawaslu perlu memberikan perhatian lebih besar untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu, di mana ada beberapa langkah yang mesti dilakukan.

Pertama, membuat terobosan di bidang regulasi untuk memudahkan masyarakat terlibat dalam pengawasan Pemilu.

Kedua, menyediakan ruang digital yang interaktif, sehingga dapat membentuk komunitas digital bagi kelompok masyarakat yang memiliki concern di pengawasan pemilu.

Ketiga, meningkatkan informasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif dan tata cara pengawas pemilu.

Keempat, merespons setiap aduan masyarakat dan memberikan akses informasi tentang perkembangan laporan masyarakat kepada Bawaslu. •

HATI-HATI TANGANI LAPORAN PELANGGARAN

Bawaslu RI baru saja merilis data terkait penanganan pelanggaran selama tahapan Pilkada Serentak 2024. Seperti apa hasilnya?

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, menjelaskan, setidaknya ada ribuan laporan yang telah diterima dan ratusan temuan dugaan pelanggaran pada masa kampanye hingga 30 Oktober 2024.

"Diterima, temuan (sebanyak) 239, laporan 1.045," kata Puadi, Rabu, 5 November 2024.

Puadi mengatakan, dari jumlah tersebut, beberapa laporan sudah diregistrasi oleh Bawaslu untuk nantinya ditindaklanjuti. Dalam hal ini, Bawaslu harus memastikan dokumen pelaporan harus memenuhi syarat formil dan materil.

Selain itu, terkait dengan temuan ini, Bawaslu harus melakukan penelusuran dan tidak lanjut terlebih dahulu sebelum dilakukannya adjudikasi.

"Registrasi, temuan 228, laporan 491," kata Puadi.

Sementara itu, ada beberapa laporan yang tidak diregistrasi karena belum memenuhi syarat formil dan materil. Maka dari itu, harus ada perbaikan dokumen dari pelaporan.

"Tidak diregistrasi, temuan 2, laporan 480," jelas Puadi.

Puadi mengatakan, ada juga beberapa laporan yang belum diregister oleh Bawaslu. Sebab, dokumen laporannya belum lengkap. "Temuan 9, laporan 74," jelas Puadi.

P u a d i
meny-

ampaikan, Bawaslu juga sedang menangani sejumlah temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada 2024. Selain itu, ada beberapa laporan yang telah dinyatakan bukan termasuk dalam pelanggaran.

"Pelanggaran 326 (kasus), bukan pel-

anggaran 323," kata mantan Anggota Bawaslu DKI Jakarta ini.

Puadi menuturkan, ada puluhan temuan ataupun laporan yang saat ini sedang dalam proses penanganan. "Temuan/laporan dalam proses penanganan (sebanyak) 70 (kasus)," kata Puadi.

Puadi juga merinci soal hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu selama tahapan Pilkada 2024.

"Hasil penanganan pelanggaran; administrasi 68, pidana 58, kode etik 70, hukum lainnya 160," sambungnya.

Pelanggaran Netralitas ASN

Puadi juga membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2024. Bawaslu mendapati terdapat ASN yang mengikuti kegiatan kampanye dari pasangan calon yang bertarung di Pilkada.

Setidaknya ada 15 kasus dugaan pelanggaran ASN yang mengikuti kampanye pasangan calon.

"ASN ikut kegiatan kampanye/sosialisasi calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, dan



calon wali kota/wakil wali kota (ada) 15 kasus,” kata Puadi kepada Info Indonesia, Kamis, 31 Oktober 2024.

Kemudian, ditemukan juga adanya ASN yang mengikuti kegiatan politik praktis dengan menggunakan mobil salah satu pasangan calon.

“ASN dan/atau lurah menghadiri kegiatan paslon dan atau menggunakan mobil bertuliskan paslon (ada) 1 kasus,” jelas Puadi.

Selain itu, Bawaslu juga mendapati ASN berkampanye maupun menyosialisasikan pasangan calon di media sosial.

“ASN mengkampanyekan/mensosialisasikan calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, dan calon wali kota/wakil wali kota di media sosial (ada) 8 kasus. ASN memberikan dukungan melalui media sosial/masa kepada pe-

gunakan fasilitas pemerintah dan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

“Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik peserta Pilkada 2024 dan pemasangan APK di tempat yang dilarang,” kata Puadi.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga mencatat ada ASN ikut kegiatan kampanye atau sosialisasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan calon wali kota dan

sosial atau masa kepada peserta pemilu atau bakal calon peserta pemilihan.

Selain itu, kepala desa ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 Huruf B dan J UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“ASN membuat tindakan atau kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu bakal pasangan calon



Hasil penanganan pelanggaran; administrasi 68, pidana 58, kode etik 70, hukum lainnya 160.

serta pemilihan/bakal calon peserta pemilihan (ada) 5 kasus,” terang Puadi.

Selanjutnya, Bawaslu mendapatkan informasi ada beberapa ASN yang bergabung dengan grup pasangan calon.

“ASN bergabung/mengikuti/follow grup atau akun media sosial pasangan calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, dan calon wali kota/wakil wali kota, 3 kasus,” ujar Puadi.

Puadi menambahkan, pihaknya juga mendapati ASN yang ikut serta dalam kegiatan partai politik. “Keterlibatan ASN dalam kegiatan partai politik, 1 kasus,” kata Puadi.

Tren Pelanggaran Hukum

Puadi juga membeberkan sejumlah tren hukum atau dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta Pilkada 2024 selama masa kampanye. Ia mengatakan, ditemukan peserta pemilu yang meng-



wakil Wali kota.

Lalu, kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam pembentukan tim bakal calon/kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang bertentangan dengan Pasal 29 Huruf J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Puadi menyampaikan, terdapat ASN memberikan dukungan melalui media

gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota,” kata Puadi.

Bawaslu juga mendapati ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah peserta pemilu dan ikut kegiatan kampanye atau sosialisasi pasangan calon. “Keterlibatan ASN dalam kegiatan partai politik,” pungkas Puadi. ●

PENDIDIKAN POLITIK CEGAH POLARISASI DAN HOAKS

Polarisasi dalam setiap pesta demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu di Tanah Air. Maka dari itu, penting untuk masyarakat agar mendapatkan pendidikan politik yang baik, terutama menjelang Pilkada 2024.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menjelaskan, pendidikan politik akan menghindarkan masyarakat dari polarisasi di Pilkada 2024. Masyarakat juga perlu untuk diedukasi terkait bahaya dari polarisasi.

Menurutnya, masyarakat dapat mencari hal-hal yang benar dan baik dari pengetahuan dan informasi mengenai kandidat kepala daerah.

Bagja menilai, tahapan kampanye merupakan momentum bagi seluruh kontestan untuk meyakinkan publik dan memaksimalkan segala upaya untuk meningkatkan elektabilitas dengan membangun citra diri serta visi, misi, dan program kerjanya.

Namun, Bagja memandang masih ditemukan pasangan calon kepala daerah yang menggunakan cara-cara tidak bertanggung jawab untuk menarik perhatian masyarakat atau pemilih.

"Namun ada catatannya, terdapat cara-cara tidak bertanggung jawab dalam kampanye pemilihan, yaitu penggunaan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pasangan calon," kata Bagja dalam kegiatan Indonesia Fact-Checking Summit 2024, Kamis, 9 November 2024.

Bagja mengungkapkan, pasangan calon yang menggunakan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks dalam kampanye, ingin mencari keuntungan dari kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, kekacauan tersebut tentunya akan menurunkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024.

"Tujuannya untuk mencari keuntungan di situasi yang kacau untuk menumbuhkan dan menurunkan partisipasi, keyakinan, pendukung pasangan calon lain," jelas anggota Bawaslu dua periode ini.

Bagja mengatakan, cara-cara tersebut akan merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan

untuk menekan praktik-praktik 'kampanye hitam'. Apalagi, saat ini perkembangan teknologi, terutama media sosial, begitu massif. Apabila tidak dicegah, maka akan meningkatkan potensi polarisasi di tengah Masyarakat.

"Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019," ujar mantan Wakil Sekretaris Umum PTKP HMI Cabang Depok periode 2001-2003 ini.

Mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Utrecht ini menyampaikan, polarisasi akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Parahnya lagi, akan mengancam keamanan dan disintegrasi.

"Bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Bagja.

Bagja melihat pada Pemilu 2024, kerja





sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah dan masyarakat sipil seperti Cek Fakta, untuk menurunkan tensi dan politisasi SARA di media sosial berhasil dilakukan.

Dengan demikian, Pemilu 2024 berhasil mereduksi politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial dengan sangat signifikan. Maka dari itu, Bagja memandang perlu ada kerja sama



Tujuannya untuk mencari keuntungan di situasi yang kacau untuk menumbuhkan dan menurunkan partisipasi, keyakinan, pendukung pasangan calon lain.

dari semua stakeholder.

“Oleh sebab itu, Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang bermartabat dan mencip-

takan kontestasi politik dalam demokrasi yang menjadi berkualitas dan berintegritas dan terhindar dari berita hoaks dan ujaran kebencian,” ucap Bagja.

Bagja juga menjelaskan, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus disugahi berbagai macam pendidikan politik yang bertanggung jawab. Maka, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya verifikasi dalam mengisi kualitas demokrasi dalam konteks pemilihan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan perlu kolaborasi bersama.

“Mari terlibat aktif melakukan penga-

wasan melalui pengawasan partisipatif serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat yang benar,” kata Bagja.

Bagja menambahkan, jika masyarakat mendapati dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan untuk langsung melaporkannya ke Bawaslu, sehingga dapat segera dilakukan penelusuran.

“Laporkan kepada kami dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam bentuk misinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial,” tegas Bagja. •





KEJAR TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, serta seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bumi Sriwijaya melakukan koordinasi terkait upaya untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 tahun ke depan.

Pj Gubernur Elen Setiadi mengungkapkan capaian sampai triwulan III jumlah investor 1161, realisasi investasi Januari- September 2024 sebesar Rp 40,44 triliun. Kemudian realisasi investasi PMA Rp. 13.85 triliun dan PMDN Rp. 26.85 triliun di Januari -September 2024.

"Lima besar subsektor realisasi PMA dan PMDN Triwulan I sampai Triwulan III 2024 adalah pertambangan, industri kertas dan percetakan, listrik gas dan air, industri makanan serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan," kata Elen.

Elen menjelaskan Provinsi Sumsel telah membuka pelayanan perizinan ini di mall Palembang Square untuk membantu pengurusan perizinan usaha bagi masyarakat yang akan berinvestasi.

"Kami buka di mall karena itu kunjungan masyarakatnya sangat besar, dimana pelayanan itu dibuka dan ditutup sesuai dengan jam kerja mall," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan pihaknya telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo

Subianto untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 5 tahun ke depan.

"Pak Presiden juga memberikan arahan langsung ke saya bagaimana untuk menciptakan iklim investasi yang baik," ungkapnya.

Dia mengatakan keberadaan PTSP merupakan pintu masuknya bagi investasi ke daerah. Karena itu pelayanan di PTSP harus betul-betul yang terbaik.

"Keberadaan PTSP merupakan kunci utama bagi investasi masuk, karena itu berikanlah pelayanan yang baik," harapnya.

Di kesempatan itu masing-masing Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota Se-Sumsel melakukan diskusi dengan Wamen terkait dengan upaya menarik investor untuk berinvestasi di Sumsel.

Bahas Pembangunan Pelabuhan Baru

Selain melakukan konsolidasi dalam memaksimalkan potensi investasi, Pj Gubernur Elen Setiadi dan Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pembangunan pelabuhan Palembang Baru.

Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan pelabuhan baru ini sudah lama dibahas dan diskusikan, bahkan ini menjadi fokusnya agar dapat diselesaikan.

"Bahwa memang Sumsel punya Sumber Daya Alam (SDA) cuma memang dari data statistik karena tidak ada nilai tambah karena tidak ada hilirisasinya ataupun outlet yaitu pelabuhan laut," ucapnya.

Elen menjelaskan dalam pelaksanaan pelabuhan baru Tanjung Carat sudah dilakukan beberapa penyelesaian, tahap awal diantaranya penyelesaian kawasan hutan seluas 60 hektar yang ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

"Yang sekarang kita kejar bagaimana penyelesaian lahan dan sekarang sudah diturunkan statusnya sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Sekarang kita proses untuk HPLnya, tadi ada itu Kanwil akan membantu menyegerakannya. 60 hektar untuk pembangunan dan 160 hektar untuk kawasan pendukung, tadi juga sekaligus kita membicarakan teknis untuk mengusung KEK, ini berkaitan," katanya.

Elen menilai dengan semua proses yang sudah dilakukan, Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dilakukan ground breaking.

Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu



bu mengatakan, Rakor yang digelar kali ini merupakan hasil komunikasinya dengan bersama Pj Gubernur Sumsel saat rapat terbatas bersama Menko Perekonomian RI beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, jika bicara soal pelabuhan baru ini sudah disandingkan dengan beberapa Menteri. Bahkan pelabuhan baru ini menjadi salah satu inisiasinya sejak tahun 2022.

"Kita benar-benar akan memaksimalkan potensi yang ada di Sumsel. Kami sangat paham kondisi logistik paling utama dan terjadinya tidak

efisien, tentunya kita benar-benar mau konsen pelabuhan ini terealisasi," ujarnya.

Todotua Pasaribu mengaku setuju dengan Pj Gubernur Elen Setiadi untuk mendorong kawasan tanjung carat menjadi kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bukan hanya diperuntukan bagi Sumsel tetapi juga Sumbagsel.

"Kalau pelabuhan ini dibuka saya sangat yakin KEK segala suportingnya sudah sangat siap seperti lumbung energinya," katanya.

Dikatakan pihaknya akan fokus mendorong pelabuhan baru di Sumatera Selatan terealisasi.

"Jika pelabuhan ini terbuka maka akan menjawab semua, kita bisa ekspor segala sumber daya alam dan meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. ●

SIMULASI MITIGASI BENCANA BANJIR

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, memimpin langsung apel dan simulasi mitigasi bencana banjir di Halaman Shooting Range Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.

Dalam apel gabungan yang melibatkan TNI/Polri, Pol PP, dan Instansi terkait tersebut, Pj Gubernur Elen mengatakan, Sumsel baru saja mengalami masa-masa yang cukup berat yang menyita banyak waktu, tenaga, pikiran dan perhatian untuk menanggulangi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Berakhirnya musim kemarau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini adalah kabar baik bagi kita semua,” katanya.

Namun lanjut Elen Setiadi, pasca musim kemarau, saat ini Sumsel memasuki musim penghujan dengan

curah yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan persiapan akan dampak yang ditimbulkan seperti bencana banjir dan tanah longsor.

“Hari ini kita bersama disini adalah salah satu bagian dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya bencana perlu dilakukan dengan penyiapan peralatan dan personil untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan simulasi untuk meningkatkan kemampuan personil serta uji fungsi dari peralatan yang ada.

“Banyak yang harus kita lakukan

seperti perbaikan kondisi lingkungan memperbaiki fungsi daerah atau wilayah resapan air, daerah aliran sungai, atau daerah lereng perbukitan yang gundul atau kritis dan lainnya,” ungkapnya.

Elen menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi seperti dukungan personil dan peralatan dalam penanganan bencana di Sumsel.

“Kita gelar apel sekaligus dapat melaksanakan uji fungsi dari kemampuan personil dan kesiapan peralatan kita masing-masing, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi apa yang menjadi



kekurangan untuk dapat kita sempurnakan lagi,” pungkasnya.

Waspada Bencana di Daerah

Selain melakukan apel siaga Pj Gubernur Elen Setiadi juga memantau ke siapsiagaan di daerah. Salah satunya dengan melakukan peninjauan Posko Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kota Prabumulih. Peninjauan ini dilakukan di Posko BPBD Kota Prabumulih yang berada di Jalan Lingkar Tugu Air Mancur Kota Prabumulih.

Di sela meninjau Posko Karhutla bersama Pj Walikota Prabumulih H. Elman ST. MM, Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan saat ini telah masuk musim penghujan karena itu ia menghimbau baik masyarakat di Kota Prabumulih maupun di 16 kab/kota lainnya di Sumsel untuk mulai mewaspada bencana banjir.

“Alhamdulillah sebelumnya kita berhasil mengatasi Karhutla dan Karhutla kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun kita harus tetap waspada dan antisipasi bahwa bencana tidak menunggu kita siap. Kebetulan sekarang kita sedang masuk musim penghujan salah satu tantangan kita adalah untukantisipasi adanya banjir,” ujar Elen.

Dalam kesempatan itu, Elen Setiadi mengapresiasi Pj Walikota Prabumulih yang telah menempatkan salah satu posko penanggulangan Karhutla dan bencana lainnya di pusat kota Prabumulih.

“Ini tentu akan mendekatkan ke tempat rawan bencana. Sehingga kita harapkan petugas lapangan TNI, Polri, BPBD dan unsur masyarakat bisa lebih cepat melakukan penanganan jika terjadi bencana,” jelasnya.

Lebih jauh Elen juga kembali mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap siaga terhadap bencana yang datang.

“Kita harus tetap siaga karena bencana tidak menunggu kita siap tapi kitalah yang harus siap apabila terjadi bencana,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Elen juga berpesan kepada jajaran Satgas agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Berikan bantuan sebaik mungkin dan segera lakukan pertolongan pertama jika memang diperlukan.



“Silakan hubungi fasilitas kesehatan jika memang dibutuhkan,” tambahnya.

Elen meyakini bahwa para petugas pasti sudah tahu SOP masing-masing. Untuk itu ia menghimbau petugas melakukan tugasnya sebaik mungkin. Begitupun Pj Walikota Prabumulih dimintanya untuk terus melakukan pembinaan, evaluasi serta pengawasan setiap waktu sehingga kewaspadaan

bisa ditingkatkan.

“Sekali lagi saya sebagai Pj Gubernur Sumsel berterima kasih atas partisipasi bapak/ibu petugas dalam melayani masyarakat terutama dalam kebencanaan yang tidak kita inginkan bersama. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Dan semoga Bapak /Ibu diberikan kekuatan dan tetap semangat apapun kondisinya,” pungkasnya. •



KENDALIKAN INFLASI JELANG NATARU

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menggelar rapat koordinasi High Level Meeting (HLM), Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mengantisipasi gejolak ekonomi di daerah.

Kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi lonjakan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025,

Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel Pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumsel sebesar 1,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 1,44 persen dengan IHK sebesar 107,05 dan terendah terjadi di Kota Lubuklinggau sebesar 0,89 persen dengan IHK sebesar 104,61.

Adapun komoditas yang menjadi

penyumbang inflasi meliputi tomat, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan yang juga menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten/kota inflasi di Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2024.

Sedangkan komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota inflasi Sumatera Selatan adalah cabai merah.

"Hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua Bapak/Ibu sekalian, dan saya yakin mulai hari ini kita sudah mengambil strategi kebijakan, karena kita sebulan lagi akan menghadapi Nataru dan kita masih punya ruang yang cukup untuk dilakukan hal-hal yang harus kita dorong dan kita akan koor-

dinasikan," ungkapnya.

Elen mengingatkan para Bupati/Walikota untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, karena pada 27 November mendatang, Provinsi Sumsel akan menyelenggarakan Pemilukada serentak.

Dimana memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelumnya agar daerah waspada dan antisipasikan ketersediaan beras, minyak goreng dan gula pasir, dan sembako lainnya yang dalam peruntukannya digunakan masing-masing paslon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

"Kami juga menghimbau Bupati/walikota dapat meningkatkan ketersediaan pasokan melalui penggunaan



dana BTT yang nanti akan kita bahas khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan khusus beras akan kita lakukan kerjasama dengan Bulog,” imbuhnya.

Elen juga meminta TPID Kabupaten/



Ini dilakukan agar berkesempatan untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025 yang proses penilaiannya dilaksanakan sepanjang 2024.

Kota melakukan upaya melalui strategi Ketersediaan Pasokan, dengan memastikan keberlanjutan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), monitoring kondisi pasokan secara berkala.

Kemudian mendorong sentra baru Lebih komoditas bawang merah dan cabai, dan mendorong optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) khu-

susnya di bidang penelitian pengembangan teknologi dan informasi.

“Keterjangkauan harga dengan cara terus melaksanakan pasar murah secara rutin melakukan pemantauan harga pasar sebagai early warning penetapan target penurunan harga komoditas di atas HET, melakukan optimalisasi dan replikasi toko Penyeimbang, serta membuat kajian mengenai pengelolaan distribusi gabah,” paparnya.

Dia mengingatkan kepada daerah selaku ketua TPID kabupaten/kota agar upaya yang telah dilaksanakan ini dapat terdokumentasikan dan dapat dilaporkan dengan baik dan tepat waktu kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).

“Ini dilakukan agar berkesempatan untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025 yang proses penilaiannya dilaksanakan sepanjang 2024,” terangnya



Dalam rakor berbagai stakeholders menyampaikan berbagai materi terkait langkah maupun strategi dalam mengendalikan inflasi, dimulai dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky Perdana Gozali dalam paparannya membahas rujukan upaya / strategi pengendalian inflasi Sumsel menjelang akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 mendatang.

Dimana berdasarkan diagnosa tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan III Tahun 2024 dan capaian percepatan perluasan digitalisasi daerah di Provinsi Sumsel.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pemanfaatan data dan informasi berita resmi statistik BPS inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Laporan dan penjelasan dari Bulog terkait kondisi stok, harga dan distribusi komoditi yang menjadi penugasan Bulog menjelang akhir tahun dan Natu 2024. ●

KEMBANGKAN UMKM KE KANCAH INTERNASIONAL

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong lebih maksimal agar mampu bersaing di kancah internasional. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memberikan dukungan melalui Semarak UMKM Sriwijaya 2024 yang dibuka Penjabat Gubernur Elen Setiadi.

Pj Elen Setiadi mengapresiasi langkah tersebut karena nilainya mampu mendorong pengembangan UMKM Sumsel tak hanya ke kancah nasional namun juga internasional.

"Prinsipnya kita semua harus mendukung pengembangan UMKM di Sumsel. Sriwijaya adalah kerajaan besar yang begitu luas. Potensi yang kita miliki sangat besar untuk mendorong UMKM kita ke kelas internasional," ujar Elen saat memberikan sambutan.

Untuk mendorong pengemban-

gan UMKM itu kata Elen diperlukan inovasi dan penyelenggaraan kegiatan seperti Semarak UMKM Sriwijaya berkelanjutan. Termasuk juga pembinaan talenta-talenta muda berbakat di bidang desain, seperti pemenang lomba mendesain batik Palembang.

"Jangan berhenti karena ini adalah awal bagaimana kita mendorong masyarakat untuk semakin kreatif dan inovatif. Talenta bisa dari mana saja bahkan anak sekolah maupun mahasiswa. Mereka ini yang harus kita bina," tambah Elen.

Elen juga mengapresiasi bazar dan pameran produk UMKM ini untuk dapat mendorong perkembangan UMKM Sumatera Selatan menuju pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Lebih jauh Elen mengatakan, kegiatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pelaku UMKM di Sumatera Selatan terutama UMKM binaan Bank Indonesia, untuk memasarkan produk terbaiknya, agar dapat dikenal tidak hanya di Sumatera Selatan tetapi juga sampai ke



tingkat nasional bahkan sampai ke manca negara.

Kegiatan ini adalah wujud kepedulian Bank Indonesia kepada pelaku UMKM, terutama bagi UMKM binaan Bank Indonesia untuk dapat didorong menjadi UMKM naik kelas. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia terus berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

“Pada kegiatan ini, kita mengharapkan terjalinnya kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk mendorong perekonomian daerah melalui UMKM, yang menghadirkan para pelaku UMKM binaan Bank Indonesia dari wilayah Sumatera Selatan untuk dapat berkarya lebih maju,” paparnya.

Selaku pemerintah dan juga sebagai pembina UMKM, Elen mengatakan ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para pelaku UMKM yang terpilih dalam kegiatan semarak UMKM 2024 ini, seraya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Selatan yang sudah berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM.

“Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk terus mendukung dan membeli produk-produk UMKM Sumatera Selatan. Dengan mendukung dan membeli produk UMKM dari provinsi kita tercinta ini, maka kita tidak hanya membantu para pengusaha kecil untuk bertahan dan berkembang, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal serta melestarikan kekayaan budaya dan tradisi Sumatera Selatan,” imbuhnya.

Elen juga mengungkapkan harapannya agar kegiatan semarak UMKM Sriwijaya ini dapat memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk lebih berkembang, inovatif dan kreatif karena disini tempat bertemunya para pelaku usaha dengan berbagai produk unggulannya untuk dipromosikan.

Kegiatan semarak UMKM Sriwijaya 2024 ini dapat dijadikan ajang tukar menukar ilmu pengetahuan, me-

nambah wawasan kreativitas bahkan terjalinnya kemitraan antara pelaku UMKM serta memacu semangat para pelaku UMKM agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik dengan sentuhan kreativitas yang tinggi.

Sumsel dari berbagai bidang baik itu pangan, fashion, hingga kerajinan dan kuliner untuk dapat terus berkembang melalui inovasi, peningkatan kapasitas, penguatan akses pasar, pembiayaan dan ekspor se-



“Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memperluas jaringan kerja sama para pelaku UMKM binaan Bank Indonesia sehingga dapat bersaing tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan saja, tapi dapat dikenal secara nasional bahkan dapat bersaing di pasar global,” terangnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P. Gozali bahwa kegiatan Semarak UMKM Sriwijaya merupakan agenda tahunan BI dalam rangka mendorong UMKM

hingga menumbuhkan daya saing UMKM Sumsel.

“Hal ini juga menjadi komitmen BI dalam upaya pengembangan UMKM hijau dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut ditampilkan fashion show kain wastra Sumsel, penyerahan hadiah pemenang lomba desain batik Sumsel, serta simbolis penyerahan bantuan sarana dan prasarana produksi penunjang ketahanan pangan dan komoditas unggulan Sumsel. •

OPTIMISTIK PILKADA LANCAR

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama 17 kabupaten dan kota terus berkomitmen untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dan mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

Komitmen ini tertuang dalam rapat konsolidasi daerah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumsel untuk persiapan distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tahun 2024 di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Rabu (13/11/2024),

“Seluruh masyarakat Provinsi Sumsel dapat mencegah terjadinya kerawanan yang tidak diinginkan, mencegah terjadinya penyebaran hoax yang sudah diketahui akan dapat membahayakan pelaksanaan Pilkada, serta segala hal-hal lainnya yang dapat menghambat

pelaksanaan Pilkada,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi.

Elen mengungkapkan beberapa fokus utama yang menjadi atensinya selaku pemimpin daerah diantaranya Penguatan Koordinasi Antar Lembaga, Kesiapan Infrastruktur dan Logistik, pengamanan dan stabilitas keamanan, serta menjaga netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sinergi antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan kota, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya

menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi Pilkada ini,” imbuhnya

Menurut Pj Gubernur, ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan suara, distribusi logistik pemilu, hingga kesiapan teknologi informasi yang akan digunakan dalam proses penghitungan suara, harus dipersiapkan dengan matang agar tidak ada kendala teknis yang dapat menghambat jalannya Pilkada.

“PPK kita ada 1.205 orang ini adalah tulang punggung penyelenggaraan kita di Pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. Insya Allah ini sudah berjalan dengan baik, logistik Insya Al-



lah minggu ini sudah berjalan, yang paling penting kita antisipasi dan waspada adalah kerawanan. Sementara technical pelaksanaan insya Allah sudah aman dan berjalan dengan baik. Dukungan TNI, Polri, BINDA, pengadilan juga sudah siap sepenuhnya sehingga nanti pelaksanaannya berjalan lancar,” paparnya.

Peran Pemprov Sumsel dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan dengan lancar lanjut Elen diantaranya telah melakukan Deklarasi Netralitas ASN, Pendidikan Politik Bagi Pelajar SMA/SMK/MA, Pembentukan Tim Pemantauan, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pemberian dana hibah.

“Pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN tanggal 27 Desember 2023 di Palembang sebagai deklarasi yang pertama dilakukan secara serentak yang diikuti secara langsung dan daring oleh 180.751 pegawai ASN yang terdiri dari ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ASN Pemerintah kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, dan ASN Vertikal se Sumatera Selatan,” tambahnya.

Selain itu lanjut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan.

“Penandatanganan NPHD tersebut telah dilakukan secara serentak tercepat dan pertama di Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan pada tanggal 9 November 2023 di Palembang,” pungkasnya.

Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak

Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penerbitan SKB tersebut bertujuan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Dibuatnya SKB netralitas juga akan memudahkan ASN dalam memahami

hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik maupun disiplin pegawai. SKB diberlakukan bagi ASN di seluruh tingkatan instansi baik di pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, kota, provinsi diseluruh Indonesia,” jelas Sekretaris Daerah Sumsel) Drs. H. Edward Candra saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Sumatera Selatan.

Menurut Sekda Edward Candra, terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa ASN harus netral dalam pemilu. Salah satunya adalah mencegah konflik kepentingan. Netralitas ASN penting untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam upaya mendukung peserta pemilu tertentu. Alasan itu juga

mendasari peraturan yang mewajibkan netralitas aparat negara lainnya di pemilu, seperti anggota TNI/POLRI, Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara Ketua Komwil Forsesdasi Sumsel Drs. H. Apriyadi mengatakan tema yang diambil kali ini karena tahun ini merupakan tahun pertama diadakannya Pilkada serentak di Indonesia. Adapun isu yang hangat dibicarakan terkait Pilkada adalah soal netralitas ASN dan selalu jadi isu menarik.

“Karena itu untuk menyikapi ini kami Komwil menggelar rakor. Kami bertekad birokrat di Sumsel terutama Sekda sebagai komandan demokrasi agar dapat menjaga marwah ASN menjadi ASN yang netral dan profesional dalam menjalankan tugas,” tegasnya. ●





PALEMBANG BERPELUANG MERAH PENDANAAN MCA

Kota Palembang berjuang mendapatkan pendanaan Millenium Challenge Account Indonesia. Peluang terbuka. Tapi, perlu pula hitung-hitungan manfaatnya.

pemerintah provinsi tidak bertentangan. Alhamdulillah kita tidak ada kendala," kata Darmenta usai memaparkan rencana permohonan KKPR dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) RI Dwi Hariyawan.

Pemanfaatan permohonan KKPR ini, katanya mendapat "lampu hijau" dari Kementerian ATR BPN RI sehingga dalam waktu dekat akan langsung ada jawaban persetujuan kerja sama Transit Oriented Development (TOD). "Ini juga tujuannya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat ataupun mendapat moda transportasi lainnya seperti fasilitas pejalan kaki dan tempat pemberhentian moda transportasi," ujarnya.

Transit Oriented Development (TOD)

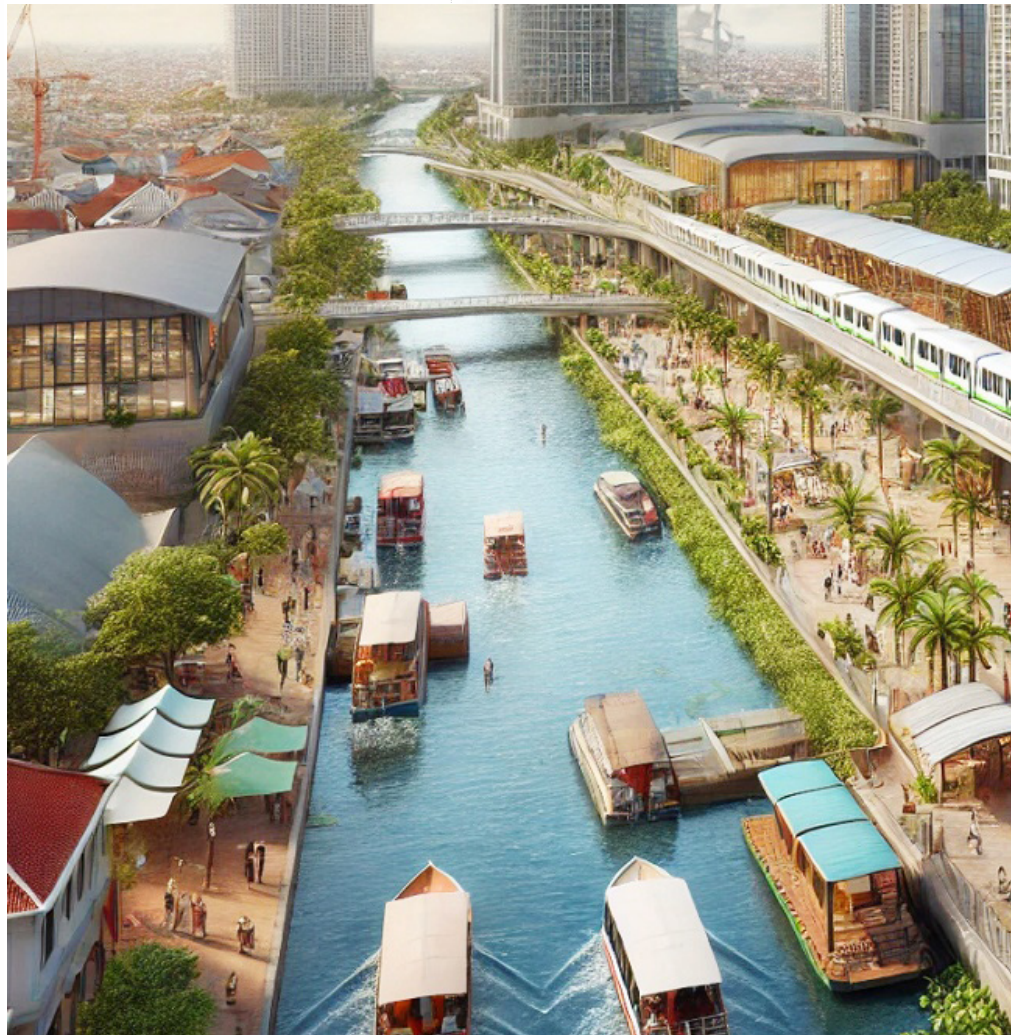
adalah konsep tata ruang kota yang mengintegrasikan area stasiun dengan kawasan hunian, perkantoran, dan area komersial. Konsep ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Tambahan pula, untuk Palembang, stasiun LRT (Light Rail Transit atau kereta layang ringan) Ampera bisa menjadi etalase yang menjadi penghubung sebagai kawasan wisata dan ritel. "Ini juga, kurang menariknya kawasan Ampera sebagai kawasan pariwisata dan ritel karena kurang baiknya perawatan kawasan, desain yang kurang menarik dari masalah keamanan hingga tidak optimalnya sirkulasi kendaraan dan parkir," ungkapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, menjadi satu dari lima kota di Indonesia yang menjadi kota proyek percontohan Pemerintahan Amerika Serikat untuk mendapatkan pendanaan dari Millenium Challenge Account (MCA). Pendanaan MCA Indonesia merupakan program yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Program ini merupakan bagian dari Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat dan Indonesia

Nah, menjadi kota proyek percontohan ini, Pemkot Palembang akan mendapatkan bantuan dana hibah senilai Rp.2 triliun dari Pemerintah AS. Untuk mendapatkan dana hibah ini, Pemkot Palembang telah memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan Pemerintah AS.

Penjabat Wali Kota Palembang Abdul Rauf Darmenta mengatakan, Pemkot Palembang harus mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk pengembangan kawasan kepada pemerintah pusat. "Untuk dapat hibah itu kita harus memenuhi kriteria, kita harus berbenah aspek ruang pemerintah kota dengan



Dengan penataan di kawasan itu, stasiun LRT Ampera ini akan terintegrasi antara stasiun LRT Ampera dengan destinasi di sekitarnya. "Meningkatkan integrasi LRT dengan moda transportasi umum lainnya seperti angkutan perkotaan, perahu sungai dan Transmusi, yang bermuara menjadi destinasi wisata tentunya sirkulasi kendaraan dan parkir aman, dan paling penting ramah lingkungan," jelasnya.

Sejauh ini, Pemkot menilai kawasan paling potensial adalah lahan yang terletak bersebelahan dengan Stasiun Light Rail Transit (LRT) Ampera Palembang menjadi kawasan potensial untuk dikembangkan. "Infrastruktur penghubung Stasiun LRT Ampera ini belum optimal dengan sangat fokus untuk meningkatkan kawasan tersebut melalui dana bantuan hibah itu nantinya, kita akan konsentrasi permohonan proyek berupa pengembangan Kawasan TOD antara lain hotel dan retail lifestyle (rencana kegiatan), pengembangan kawasan

Stasiun LRT Ampera," kata Damenta.

Dengan paparan itupun, Damenta optimistis peluang mendapatkan hibah ini pun terbuka lebar. "Besok sudah ada jawaban dari Kementerian ATR/BPN RI, setelah itu kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita akan menunjuk pihak yang akan menyelenggarakan itu, yaitu pihak independen untuk dilelang. Dana hibah itu kita fokuskan di satu titik dulu, baru akan merambah kawasan lainnya," kata Pj Wali Kota Palembang ini.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak menjelaskan, total dana hibah itu sebesar Rp.10 triliun, hanya saja dibagikan untuk lima kota. Palembang menjadi salah satu kota yang tengah berupaya

mendapatkannya. "Kalau lima kota saja, kemungkinan kota Palembang akan mendapat Rp.2 T dari dana Hibah MCA ini," katanya.

Dana ini akan difokuskan di infrastruktur dan UMKM. "Rp.1.5 T untuk infrastruktur stasiun LRT dan sisanya untuk UMKM, dengan bangunan Retail dan UMKM seluas 7.203 m2 untuk tiga lantai dan bangunan infrastruktur hotel dan retail 15.938 m2 untuk 8 hingga 15 lantai" ungkapnya.

Nah, tinggal hitung-hitungan manfaatnya sekarang. Berapa potensi perputaran ekonomi di kawasan yang hendak dikembangkan, dan jumlah warga Palembang yang menerima manfaatnya? Kita kembalikan kepada Pemkot dan MCA Indonesia. •





Bobby Nasution-Surya

AKSES KESEHATAN BERBEKAL KTP SUMUT

Maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) di Pilkada 2024, Bobby Nasution menggandeng Surya, Bupati Asahan.

Bobby-Surya membawa visi, Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan'. Dia juga memastikan masyarakat Sumut dapat mendapatkan akses kesehatan hanya dengan berbekal KTP Sumatera Utara.

Maju menantang petahana Edy Rahmayadi- Hasan Basri, pasangan ini di usung oleh 10 partai politik Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PAN, Golkar, Nasdem, Perindo, PPP, dan PSI.

Perjalanan politik dan sukses jadi pengusaha, Bobby mulai berkarier dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan dalam Pilkada serentak 2020. Ia terpilih sebagai Wali Kota Medan selama periode 2021-2024.

Memiliki nama lengkap Muhammad Bobby Afif Nasution lahir pada 5 Juli 1991 di Medan, Sumatera Utara. Putra almarhum Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero) IV, dan ibunya, Ade Hanifah Siregar.

Mengikuti tugas sang ayah, Bobby harus menghabiskan masa kecil dan sekolah-

ya dengan berpindah-pindah kota. Mulai dari pendidikan dasar di Pontianak, sementara pendidikan SMP dan SMA ditempuh di Bandar Lampung.

Bobby melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB), mengambil S-1 jurusan Agribisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

Sebelum memutuskan untuk berpolitik, Bobby berhasil terjun ke dunia bisnis properti dan menjalankan beberapa usaha di berbagai sektor.

Bobby membeli rumah bekas, kemudian direnovasi sebelum menjualnya kembali.

Bobby juga terlibat dalam proyek pembangunan apartemen Malioboro City di Yogyakarta. Pada tahun 2016, dan dipercaya untuk menjadi

Direktur Marketing Takke Group sambil melanjutkan studi S-2 di IPB.

Bobby resmi menjadi mentan Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)



setelah menikahi Kahiyang Ayu pada 8 November 2017 sehingga membuat namanya semakin dikenal.

Ayah tiga anak ini juga pernah menjadi manajer tim sepak bola Medan Jaya pada 2014.

Saat ini, dia menduduki jabatan sebagai komisaris PT Wirasena Cipta Reswara dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI).

Bobby memulai karier politiknya dengan terpilih sebagai Wali Kota Medan, berpasangan dengan wakilnya politikus Partai Gerindra Aulia Rachman dan dilantik pada 26 Februari 2021.

Sedangkan, untuk menjadi Cawagub Sumut 2024, Bobby berpasangan dengan Surya yang merupakan Wakil Bupati Asahan 2 periode yakni 2010-2015 dan 2016-2019 bersama almarhum Taufan Gama Simatupang. Kemudian menjadi Bupati Asahan yakni dari 2019- 2021 dan 2021 hingga saat ini.

Mempunyai nama lengkap H. Surya, B.Sc, ia merupakan seorang pendidik dan politikus yang lahir pada 22 Mei 1955 di Pulu Raja, Asahan, Sumatera Utara.

Surya sebelumnya adalah seorang guru di Sekolah Teknik Menengah (STM) Budi Darma Indrapura mulai 1980. Selanjutnya ia juga pernah menjadi Wakil Kepsek di sekolah tersebut.

Surya memulai perjalanan politiknya dengan bergabung Golkar dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik lokal. Surya berhasil mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan partai politik, yang membawanya pada posisi sebagai wakil dan menjadi Bupati Asahan.

Ia mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan. Kemudian pada tahun 2008 - 2009, Surya menjabat sebagai Ketua DPRD Batubara.

Karier Surya di Partai Golkar juga cemerlang di mana ia pernah menjabat Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Asahan dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batu Bara.

Karier politik Surya terus berkembang, termasuk menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan bersama Taufan

Gama Simatupang yang menjabat sebagai Bupati selama dua periode, yaitu 2010-2015 dan 2015-2019.

Setelah itu, Surya menjadi Plt Bupati Asahan pada tahun 2019, menggantikan posisi yang kosong setelah almarhum Taufan Gama Simatupang.

Bobby menjelaskan secara kepen-

"Kami ingin memastikan kalau kami diberi amanah dalam 2 tahun masa kepemimpinan kami, masyarakat Sumut akan mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera Utara. Tidak ada lagi sekolah yang tidak ada listriknya, akses internetnya tidak ada. Dan kami pastikan tidak ada lagi



dudukan, Sumatera Utara menempati posisi ke-4 terbesar. Namun dari jumlah penduduk yang banyak ini masyarakat masih sulit mendapatkan akses kesehatan.

"Kami keliling provinsi ini masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang mengeluh tentang pendidikan SMA, SMK. Para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan," kata Bobby.

kutipan-kutipan untuk SMA dan SMK," tutur Bobby.

Sementara itu, untuk mewujudkan visi tersebut Bobby-Surya memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga

stabilitas makro ekonomi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik dan ramah lingkungan serta memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh. ●



Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala

SUMUT UNGGUL, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

Kembali maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala siap menantang Bobby Nasution-Surya sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) 2024.

Nama Edy Rahmayadi memang sudah dikenal luas di Sumut setelah sukses menjadi Gubernur Sumut periode sebelumnya.

Edy adalah mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan tenaga ahli menteri agama. Pasangan Edy-Hasan diusung oleh enam partai politik, di antaranya PDIP, Hanura, PKN, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Gelora.

Dari partai pengusungnya hanya PDIP dan Hanura saja yang memiliki kursi di DPRD Sumut.

Dari total 100 kursi di

DPRD Provinsi Sumut periode 2024-2029, pasangan Edy-Hasan Basri mengantongi 26 kursi. Jika berdasarkan perolehan suara sah, pasangan Edy-Hasan didukung oleh 1.820.883 dari 7.351.389 suara sah pada Pileg 2024.

Pasangan ini telah memenuhi syarat minimal 20 kursi dan paling sedikit 7,5% dari total perolehan suara sah, dengan jumlah kursi dan perolehan suara sah yang dimiliki.

Pasangan Edy-Hasan nantinya akan menghadapi pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, yakni Bobby Nasution dan Surya. Kedua pasangan akan saling bersaing untuk memenangkan hati masyarakat Sumut.

Lantas, siapakah sosok Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala?

Putra dari pasangan Kapten Rahman Ishaq dan Ngadisah Kandar, Edy Rahmayadi merupakan pria kelahiran Sabang, Aceh pada 10 Maret 1961.

Pendidikan dasar Edy di mulai dari SD Slakso A Madiun. Kemudian

melanjutkan ke pendidikan menengah di SMP Angkasa Medan dan SMA Negeri 1 Medan. Setelah lulus, dia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sumatera Utara (Uinsu).

Setelah lulus dari Uinsu, Edy melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) dan lulus pada 1985. Setelah itu, dia menjalankan tugas di posisi pertamanya sebagai komandan batali-yon di jajaran Kopassus TNI Angkatan Darat.

Edy pernah menduduki sejumlah jabatan militer hingga kariernya dalam dunia militer perlahan terus mengalami peningkatan. Sampai pada 2015, Edy ditugaskan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) menggantikan TNI Mulyono yang telah menjadi KSAD.

Selain berpengalaman di dunia militer, Edy juga memiliki pen-



galaman di dunia sepakbola. Ia pernah menjadi pembina tim PSMS Medan yang berhasil membawa klub tersebut menjuarai Piala Presiden dan menyelesaikan permasalahan internal.

Dengan perolehan suara sebanyak 76 suara dalam kongres PSSI pada 10 November 2016, Edy terpilih sebagai ketua umum PSSI untuk periode 2016-2020.

Setelah itu, Edy memutuskan untuk pensiun dari militer pada 2018 dan memilih terjun ke politik. Ia berhasil memenangkan Pilgub Sumatera Utara 2018 dan dilantik sebagai gubernur. Lalu pada 20 Januari 2019, Pria berusia 63 tahun ini menyatakan mundur dari



jabatannya sebagai ketua PSSI.

Sementara, Hasan Basri Sagala, akrab disapa Hasan, lahir di Kota Pinang, Sumatera Utara pada 10 Juni 1997. Ia adalah putra dari Abdul Roni Sagala dan Fatimah Harahap.

Hasan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Pinang dan melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) untuk gelar S-1, kemudian meraih gelar S-2 di Universitas Indonesia.

Hasan menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di mana dia aktif memberikan saran dan masukan untuk kebijakan Kementerian. Selain itu, dia juga menjadi

komisaris independen di PT Victoria Alife Indonesia.

Di bidang organisasi, Hasan memiliki peran penting dalam berbagai lembaga. Ia menjabat sebagai kepala satuan koordinasi nasional (Kasatkornas) Barisan Ansor Serbaguna (Banser), ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), dan ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).

Sebelumnya, dia juga pernah menjadi sekretaris Lembaga Takmir Masjid

mengembangkan potensi sumber daya manusia, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pengelolaan kondisi darurat alam," tutur Edy.

Edy melanjutkan, dia dan Hasan akan membesarkan dan menjaga Sumut dalam rangka memajukan semua pembangunan dan sektor. Hal ini karena menurutnya Sumut memiliki geografi, demografi, dan kondisi sosial yang unggul.

Keduanya memiliki misi, membangun sumber daya manusia berkualitas,



(LTM) di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan wakil ketua umum Jaringan Bisnis Muslim Indonesia (JBMI) pusat.

Dalam dunia politik, Hasan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDIP untuk daerah pemilihan Sumut 2 pada Pileg 2024, tetapi mengalami kekalahan dari ketua PDIP Sumut di dapil yang sama.

Dalam Pencalonannya, pasangan ini memiliki visi adalah "Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan".

"Kami akan membangun Sumatera Utara menjadi provinsi yang unggul,

membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat dana tau bencana serta meningkatkan daya saing dan pengambilan peran strategis nasional.

Edy-Hasan mengingatkan pemilih untuk memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di Sumut. Hasan Basri menekankan bahwa Sumut merupakan salah satu provinsi terbesar di luar Pulau Jawa, yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. •

Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim

ONE JATIM, JAWABAN KEGELISAHAN MASYARAKAT

Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur (Jatim) nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim menyebut mereka adalah jawaban atas kegelisahan masyarakat selama ini.

Dikatakan Luluk bahwa warga Jatim mendambakan perubahan, mulai dari perekonomian yang sejahtera, pekerjaan layak hingga peningkatan pendapatan.

Lalu siapa sosok Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim?

Nama Luluk terdengar asing. Tidak mengherankan, perempuan kelahiran Jombang ini memang tidak pernah berpolitik di Jawa Timur.

Luluk merupakan politikus kelahiran Jom-

bang, Jawa Timur, pada 25 Juni 1971. Ia menamatkan pendidikan sarjana di tiga kampus terkemuka di Indonesia dan luar negeri.

Perempuan 53 tahun ini lulusan S1 Pendidikan Agama IAIN Sunan Ampel Malang dan S2 Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Luluk juga lulusan S2 Publik Administrasi Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura (LKYSPP).

Ia menjabat Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Luluk merupakan anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Ia juga anggota Badan Legislatif DPR RI.

Luluk dikenal aktif memperjuangkan kebijakan pro-rakyat di DPR RI. Ia selalu vokal dalam menyuarakan isu lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan sosial selama menjadi anggota parlemen.

Selama ini ia telah aktif di berbagai organisasi dengan mengemban jabatan penting. Di antaranya, menjadi Ketua Umum Korps Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri 1997-2000.

T a k
han-

ya itu, Luluk pernah menjadi wakil ketua sekretaris jenderal PP RMI-PBNU 2005-2010. Ia juga tercatat pernah menjadi pengurus di Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PP LKK NU) dan KNPI, serta menjadi konsultan Sekolah Citra Alam hingga Direktur Yayasan Masyarakat AHIMSA 2001-2010.

Luluk, maju dalam Pilkada Gubernur Jatim berpasangan dengan Lukmanul Khakim yang ternyata orang asli Jawa Timur.

Lahir di kota soto Lamongan pada 8 Januari 1983. Selama ini pria berusia 41 tahun ini dikenal sebagai kader dan politikus PKB. Jabatan mentereng pernah disandang, diantara-

ranya Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB dan Ketua Bidang Perindustrian & Perdagangan DPP PKB 2019-2024.

Bahkan Lukmanul Khakim pernah terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi



PKB 2014-2019 dari Dapil Jatim IX. Saat itu ia ditugaskan di Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi UKM dan perdagangan.

Lukman juga pernah mengisi posisi staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Lukmanul Khakim dikenal Aktivis NU Selain aktif di DPP PKB, Lukman juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) 2015-2020.

Ia memiliki latar belakang pendidikan lulusan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Jakarta.

Dalam Pilkada Gubernur Jatim, Luluk dan Lukmanul Khakim tegas menyebut jika terpilih memimpin Jatim, tidak akan ada lagi pengangguran dan semua masyarakat dapat hidup makmur.

Tidak hanya itu pula, dia menjelaskan pentingnya birokrasi yang tepat untuk mengelola pemerintahan yang fokus pada rakyat.

"Birokrasi dan kepemimpinan yang baru harus mampu mengakhiri kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, serta mengurangi penderitaan perempuan, ibu-ibu janda, dan anak-anak yatim," ungkapnya.

Lukman menyebut Pilkada 2024 ini merupakan momentum untuk mengevaluasi kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur periode sebelumnya. Ia pun menyebut bahwa Luluk-Lukman bisa menjadi jawaban terhadap masalah yang terjadi selama lima tahun terakhir.

"Hadirnya Luluk-Lukman adalah jawaban atas kegelisahan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Luluk menyampaikan bahwa gubernur dan wakil gubernur yang baru nanti harus mengatasi kemiskinan, anak-anak terlantar dan kelompok yang selama ini diabaikan.

"Pemerintahan baru di bawah Luluk-Lukman kelak adalah menghadirkan pemerintahan yang benar-benar efektif dan juga adil kepada seluruh rakyat," ucapnya.

Ia pun menegaskan apabila terpilih memimpin Jatim akan hadir untuk seluruh masyarakat Jatim. Bukan hanya untuk kelompok atau keluarga sendiri.

"Bukan untuk keluarga sendiri, bukan untuk kelompok sendiri. Tapi memastikan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran untuk seluruh rakyat Jawa Timur," tegas Luluk.

Tidak hanya itu, Luluk-Lukman juga berkomitmen tidak ada peraturan daerah (Perda) yang menyengsarakan rakyat.

Apabila ada perbedaan antara peran-

turan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait pengharmonisasi, pembulatan serta pemantapan konsepsi Raperda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

"Itu dikoordinasikan oleh menteri dalam hal ini Menteri Hukum kalau dulu Menteri Hukum dan HAM," jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tugas pemprov adalah memastikan tidak ada satupun peraturan daerah yang menyengsarakan rakyat.



cang undang-undang dengan pemprov terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Ia pun menjelaskan tentang asas lex superior.

Dalam asas tersebut, peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki pera-

Sementara itu, Lukman mengatakan Jatim akan memiliki terobosan baru untuk mempercepat proses birokrasi yakni One Jatim.

"Lewat aplikasi ini, pelayanan birokrasi masyarakat Jatim akan lebih bersih, mudah, cepat, dan praktis," ulasnya. •

Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak

PEMIMPIN KEBERLANJUTAN

Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, membawa visi misi terkait keberlanjutan menuju 'Indonesia Emas 2045'.

Visi Khofifah-Emil adalah Jatim Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju 'Indonesia Emas 2045'.

"Saya sampaikan Jatim siap menjadi gerbang baru nusantara, capaian itu tentu bisa kita dapatkan karena dukungan dari pemerintah pusat," kata Khofifah, beberapa waktu lalu.

Khofifah Indar Parawansa atau yang akrab disapa Khofifah lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 19 Mei 1965. Ia memiliki latar belakang pendidikan lulusan studi S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada bidang keilmuan yang sama.

Khofifah juga tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Sejak sekolah SMA dirinya aktif berorganisasi dalam Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Ketika kuliah di Surabaya, Khofifah menjadi Ketua Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kota yang sama.

Pada tahun 2000, ia terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, memimpin roda organisasi sayap perempuan NU selama empat periode.

Khofifah memulai karier politiknya saat usianya 20-an, ia berhasil men-

duduki kursi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1992 - 1998. Ia pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999 dan menjadi Ketua Komisi VII DPR RI pada tahun 2004.

Tidak hanya itu, Khofifah juga pernah dipercaya menjadi menteri. Pada 1999-2001 ia dipercaya sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Kemudian pada 2014-2018 sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Setelah itu, periode karier politiknya terus berlanjut ia dipercaya untuk memimpin Jawa Timur dengan menjadi Gubernur periode 2019-2024 bersama dengan pasangan wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak yang berhasil memenangkan Pilkada Jatim pada 27 Juni 2018.

Di bawah kepemimpinannya, komitmen pelayanan untuk masyarakat Jawa Timur tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya, yakni, sembilan program kerja Pemerintahan Provinsi

(Pemprov) Jawa Timur dan diimplementasikan dengan cara CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif).

Berdasarkan data, Khofifah berhasil mendapat sejumlah penghargaan dalam memajukan Jawa Timur selama masa jabatannya, diantaranya Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Terbaik Kedua Tahun 2022 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, penghargaan sebagai Provinsi Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 dan 2023 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam Pilkada Gubernur Jatim, Emil kembali direkomendasikan mendampingi Khofifah, khususnya oleh Partai Demokrat. Keduanya akan menjadi pasangan bakal cagub-cawagub Pilkada 2024 Jawa Timur.



telah mengantongi dukungan dari 15 partai politik, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN, PKS, PPP, PSI, PKN, PBB, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Prima.

Emil, yang juga calon inkumben, terakhir menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, setelah sebelumnya dipercaya menjadi Bupati Trenggalek dalam usia yang cukup muda.

Emil Elestianto Dardak atau yang akrab disapa Emil Dardak lahir di Jakarta pada 20 Mei 1984. Ia memiliki rekam jejak pendidikan yang baik, menyelesaikan sejumlah gelarnya di beberapa kampus di luar negeri atau study abroad dengan beasiswa.

Di usianya yang ke 22 tahun, Emil menyelesaikan studi S3-nya dan memperoleh gelar Doktor di Jurusan Ekonomi Pembangunan dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

Sebelum memasuki bidang politik, Emil pernah berkarier sebagai eksekutif muda dan seorang musisi. Salah satu lagu berjudul "Maaf" diciptakannya pada sekitar 2010.

Emil memulai karier politiknya saat mendaftarkan diri bersama Mochamad Nur Arifin menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Trenggalek pada Pilkada 2015 yang diusung oleh 7 partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Emil dan Mochamad Nur Arifin terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2019. Saat itu, ia dan wakilnya tercatat sebagai pasangan bupati dan wakil bupati termuda.

Setelah itu, karier politiknya terus berlanjut dan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 ia terpilih mendampingi Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur.

Emil Dardak merupakan anak dari pasangan Hermanto Dardak dan Sri Widayanti. Ayahnya, mendiang Herman-to Dardak, merupakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2009-2014.

Khofifah-Emil membawa sembilan misi pada Pilakda Jatim. Salah satunya, Jatim Sejahtera, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan di desa maupun kota. Dengan cara memperkuat

peran perempuan dalam program pemberdayaan dan memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan, seperti difabel serta para lanjut usia (lansia).

Selain itu, visi petahana tersebut adalah Jatim Kerja, yang menyangkut perluasan lapangan kerja melalui peningkatan kewirausahaan baru atau start-up, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi.

Kemudian, Jatim Cerdas, terkait pen-

guatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan untuk semua.

Selanjutnya, Jatim Sehat, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan untuk semua yang berkualitas, merata, dan mudah diakses, untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). •



Tri Rismaharini- Zahrul Azhar Asumta

JAWA TIMUR RESIK

Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur (Jatim) 2024-2029, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) diusung Partai PDI Perjuangan dan Partai Hanura.

Sebelum diusung sebagai cagub Jawa Timur Pilkada 2024, Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju pada 2020.

Lahir di Kediri, Jawa Timur pada 20 November 1961, Risma memiliki latar belakang pendidikan yang dekat dengan pembangunan. Ia lulusan studi S1 Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tahun 1987, dan melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Pembangunan Kota lulus tahun 2002 di universitas yang sama.

Pada 2015, Risma memperoleh gelar kehormatan doktor honoris causa dari ITS, untuk bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Risma meniti kariernya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak tahun 1990-an.

Selama di Pemkot Surabaya, sejumlah posisi pernah diemban oleh Risma, seperti

Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya, Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya, Kepala Bagian Bina Pembangunan, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Risma memulai karier politiknya saat mendaftarkan sebagai Wali Kota Surabaya pada Pilkada Surabaya 2010 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kadernya dan berhasil menang.

Kemenangan Risma di Pilkada, mengantarkannya dua periode memimpin Kota Surabaya, yakni periode 2010-2020. Di bawah kepemimpinan Risma, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan di antaranya penghargaan Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori Kota Metropolitan.

Tidak hanya itu, Risma menempati posisi tiga wali kota ter-

baik di dunia menurut World Mayor Project pada 2015, dan mendapat Tanda Kehormatan Bintang Jasa dari Presiden Tahun 2015-Bintang Mahaputera.

Pada 2020, Risma dipercaya sebagai Menteri Sosial (Mensos). Ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Julari Batubara yang ditangkap KPK atas kasus korupsi bantuan sosial.

Ia mendapat Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 14 Agustus 2024 sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan kontribusi signifikan dalam memajukan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dalam Pilkada Jatim 2024 ini, Risma berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab dipanggil Gus Hans sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim dan membuat manuver



mengejutkan di Pilgub Jatim 2024.

Karier politik Gus Hans terlihat sejak 2018 silam saat dirinya bergabung dengan Partai Golkar. Ia pun didapuk sebagai juru bicara Tim Sukses Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak (Khofifah-Emil) di Pilgub Jatim 2024.

Namun pada Pilgub Jatim 2024, ia seperti 'membelot'. Dulu membela Khofifah-Emil, kini justru melawan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2019-2024 tersebut.

Sikap politik Gus Hans juga berseberangan dengan Partai Golkar yang mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim.

Gus Hans Lahir pada 23 Maret 1976, Gus Hans sejak kecil dibesarkan lingkungan keluarga Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya bernama KH As'ad Umar dan ibunya Azah As'ad.

Gus Hans dikenal sebagai tokoh muda NU yang mengembang sebagai Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PW LKKNU) Jawa Timur. Gus Hans juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur.

Pesantren ini didirikan oleh leluhurnya. Selain itu, Gus Hans tercatat sebagai Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang.

Gus Hans memiliki latar belakang pendidikan jika dilihat dari gelar yang disandang sebagai lulusan sarjana Ilmu politik dan magister kesehatan, melansir dari unggahan Instagram Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang.

Pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang mendapat nomor urut 3, siap membawa perubahan besar bagi Jawa Timur dengan mengusung visi "Jawa Timur RESIK".

Pasangan ini menjanjikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan solutif, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berkepribadian, dan berkeadaban.

Risma dan Gus Hans memiliki visi Jawa Timur RESIK demi tercapainya masyarakat adil, makmur, berkepribadian, dan berkeadaban.

Dalam pencalonannya, pasangan ini membawa misi, Reformasi Birokrasi

untuk menghadirkan layanan publik yang bersih, anti korupsi, cepat, dan solutif dalam menyelesaikan masalah masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Ekonomi kerakyatan dan inklusif yang dicapai melalui anggaran pro rakyat dan kebijakan partisipatoris.

Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak melalui layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, mer-

ata dan terjangkau.

Infrastruktur berkualitas dan terkoneksi lintas wilayah untuk rakyat yang selaras dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan serta pemajuan kebudayaan yang menghormati eksistensi budaya lokal, hak-hak minoritas dan kebutuhan kelompok rentan. •



Andika Perkasa- Hendrar Prihadi

AKSES INTERNET UNTUK DAERAH TERPENCIL

Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) PDI Perjuangan (PDI-P) resmi mengusung mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai calon gubernur-wakil gubernur 2024.

Merupakan jebolan Akademi Militer (Akml) 1987, Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat 21 Desember 1964. Setelah lulus dari Akml, Andika langsung bergabung dengan satuan Korps Baret Merah, Kopassus.

Kariernya di Kopassus dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi

Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus (1991), Den 81 Kopassus (1995), Dan-
den-621

Yon 52 Grup 2 Kopassus (1997), Pama Kopassus (1998), dan Pamen Kopassus (1998).

Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus. Kembali bertugas dalam waktu singkat, ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051/WKT Dam Jaya.

Selama bertugas, Andika juga banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, lulusan S-1 sarjana ekonomi dalam negeri itu berada di Washington DC, Amerika Serikat, untuk memperoleh pendidikan militer.

Andika pernah mengenyam pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ekonomi di dalam negeri. Sementara gelar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), ia dapatkan saat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.

Andika juga lulusan The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University.

Setidaknya, Andika menyandang tiga gelar S2, yakni MA, MSc, dan MPhil, serta satu gelar S3 PhD.

Andika moncer sejak Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 2014. Hanya dua hari setelah Jokowi-JK dilantik, Andika langsung ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Pangkatnya naik menjadi mayor jenderal. Dua tahun ia mengawal Presiden Jokowi, pada 2016 Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura.

Jabatan itu ia emban kurang lebih selama dua tahun. Pada 2018, dia diangkat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad).

Pangkatnya dinaikkan menjadi letnan jenderal. Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Ia menggantikan Letjen Eddy Rahmayadi yang mundur untuk maju pada pemilu gubernur Sumatera Utara.

Menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini dilantik Jokowi sebagai KSAD. Tak berhenti sampai di sini, Jokowi kembali memberi jalan untuk Andika.

Pada 2021, Jokowi melantik Andika sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto. Andika

kemudian pensiun dari TNI pada 2022.

Setelah pensiun dari TNI, Andika lantas meneruskan petualangan hidupnya dengan terjun di dunia politik



praktis.

Pada Pilpres 2024, Andika ditunjuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Setelah Pilpres 2024 selesai, Andika langsung memutuskan bergabung ke PDI-P, Mei kemarin. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pun berpesan kepada mantan Andika agar tidak mbalelo atau berkhianat setelah resmi menjadi kader PDI-P.

Sedangkan pasangannya, Hendrar Prihadi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Pada Oktober 2022, Hendrar dilantik menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pelantikannya itu dilakukan oleh Presiden Jokowi, untuk menggantikan Abdullah Azwar sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hendi, panggilan akrabnya, lahir di Kota Semarang pada 3 Maret 1971. Ia adalah putra bungsu dari 10 bersaudara pasangan Sunarso dan Sutarmi, yang berasal dari keluarga TNI.

Mantan walkot semarang tersebut pernah mengenyam Pendidikan di di Universitas Katolik Soegijapranata. Ia kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 di program Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Sebelum terjun di dunia politik, Hendi sempat bekerja di sebuah perusahaan bidang alat kesehatan, CV Daya Prima.

Pada 1999, ia kemudian membuka perusahaannya sendiri, yaitu CV Sinar Mulia. Kemudian memasuki awal 2000-an, Hendi mulai melirik dunia politik.

Ia sempat ditunjuk menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Semarang selama dua periode (2004-2008 dan 2008-2011).

Setelah itu, Hendi mulai banyak bersinggungan dengan dunia politik. Ia akhirnya menjadi kader PDIP dan ikut dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2009) dan akhirnya duduk sebagai anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014.

Tak lama, Namanya kemudian dicalonkan PDIP untuk menjadi calon Wakil Wali Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang 2010, untuk mendampingi Soemarmo Hadi Saputro.

Hendi kemudian naik menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang setelah

Soemarmo dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 21 Oktober 2013, dia pun dipastikan menjadi Wali Kota Semarang setelah vonis terhadap Soemarmo berkekuatan hukum tetap.

Ia juga menjabat sebagai Ketua DPC

Langkah awal yang akan mereka lakukan adalah memastikan kebutuhan internet di seluruh desa terpenuhi, mengingat penetrasi internet di Jawa Tengah saat ini baru mencapai 82 persen terendah di antara provinsi-provinsi di Pulau



PDIP Kota Semarang sejak 2010 hingga saat ini. Jabatan terakhir Hendi yakni Wali Kota Semarang, di damping oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi mengusung jargon Acces Point High Power (APHP).

Andika Perkasa menjelaskan rencana mereka untuk menyediakan akses internet di desa-desa terpencil.

Menurutnya, koneksi internet yang memadai sangat penting untuk mendukung komunikasi dan respons cepat di wilayah pedesaan.

Jawa.

"Kami akan memenuhi kebutuhan koneksi internet di seluruh desa. Masalahnya, akses internet di Jawa Tengah masih terendah di Jawa karena hanya 82 persen penetrasinya," kata Andika.

Ia juga menekankan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif era Gubernur Ganjar Pranowo, seperti program "Lapor Gub," yang berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah provinsi untuk mendengar dan merespons aspirasi daerah-daerah yang sebelumnya minim akses internet. ●

Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen

NGOPENI NGELAKONI DI JAWA TENGAH

Dinilai sosok yang tepat menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah (Jateng), Partai Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mengusung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jateng di Pilkada 2024.

Sosok Ahmad Luthfi cukup dikenal di kalangan masyarakat, pria kelahiran Surabaya 22 November 1966 ini dilantik menjadi Kapolda Jawa Tengah pada 8 Mei 2020 silam. Kala itu Ahmad Luthfi menggantikan Irjen Rycko Amelza Dahniel yang didapuk menjadi Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Ahmad Luthfi pernah menyelesaikan pendidikan kepolisiannya di Sepa (Sekolah Perwira) pada 1989 dan Selapa (Sekolah Lanjutan Perwira) 2000, selanjutnya pada 2005 Ahmad Luthfi menyelesaikan pendidikan Sespim (Sekolah Staf dan Pimpinan).

Ia juga 2015 pula, dia menjabat sebagai Kapolresta Surakarta dan menyelesaikan menyelesaikan Lemhannas PPRA 56 (Lembaga Katahanan Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan) pada 2017 hingga menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2018.

Setelah itu, pada permulaan paruh kedua 2024, Ahmad Luthfi diangkat sebagai seorang Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.

Dilansir laman resmi Kementerian Perdagangan, pelantikan Ahmad Luthi sebagai Irjen Kemendag dilakukan pada Rabu, 14 Agustus 2024. Pengangkatan ini didasarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Ahmad Luthfi juga telah mengundurkan diri dari jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Irjen Kemendag) karena mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.

Dengan rekam jejak yang solid dan pengalaman yang luas di bidang keamanan serta kepolisian, Irjen Pol Ahmad Luthfi dianggap sebagai sosok yang mampu membawa Jawa Tengah menuju masa depan yang lebih baik.

Pengangkatannya sebagai calon gubernur oleh Koalisi Indonesia Maju mencerminkan kepercayaan yang besar terhadap kemampuannya dalam memimpin dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan di provinsi tersebut.

Dengan dukungan kuat dari Partai Gerindra dan partai koalisi lainnya, Luthfi diharapkan da-



pat melanjutkan pengabdianya kepada masyarakat Jawa Tengah dalam peran yang lebih besar, membawa visi dan program yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di tingkat provinsi.

Sementara Taj Yasin Maimoen sebagai Cawagub Jateng 2024 adalah seorang politisi asal Jawa Tengah yang lahir pada 2 Juli 1983. Dia merupakan putra dari ulama Nahdlatul Ulama (NU) Almarhum KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

Pria yang akrab disapa Taj Yasin ini dikenal sebagai mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Dia menjadi wakil dari Gubernur Jawa Tengah periode sebelumnya, Ganjar Pranowo.

Pria yang biasa disapa dengan panggilan Gus Yasin ini mulai berkiprah ke dunia politik dengan menjadi Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Sarang pada 2007-2009. Dia juga tercatat pernah menjadi Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah 2010-2012.

Alumnus Universitas Ahmad Kaftaro ini bahkan pernah terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah Komisi E dari fraksi PPP untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. Karier politiknya pun terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pada 2011, dia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah. Selanjutnya pada 2016, Gus Yasin menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PPP 2016 dan setahun kemudian menjadi Ketua DPP PPP Jawa Tengah periode 2017-2022.

Nama Gus Yasin semakin dikenal pada tingkat nasional setelah dipercaya menjadi tandem Ganjar Pranowo untuk Cawagub di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018. Kontestasi itu pun berhasil dimenangkan Ganjar-Taj Yasin.

Pada 11 Mei 2023, Gus Yasin mengundurkan diri dari Wakil Gubernur Jateng setelah resmi mendaftar menjadi anggota DPD Jawa Tengah.

Kini, Gus Yasin kembali ditunjuk untuk menjadi calon wakil Gubernur Jawa Tengah. Namun, kali ini dia diduetkan bersama Ahmad Lutfi dan diusung oleh 13 partai politik dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub 2024.

Dalam pencalonannya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin mengusung visi-misi Ngopeni dan Ngelakoni di Jawa Tengah. Dalam menjalankan visi-misi itu paslon ini telah merancang 6 misi dan 50 rencana aksi.

"Kami merancang 6 misi dan 50 rencana aksi yang kami tuangkan dalam 11 komitmen," kata Luthfi.

Hal itu kata dia dituangkan dalam 11

"Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana dicontohkan oleh presiden ke 7 yaitu bapak Joko Widodo yang mendukung kami," lanjutnya.

Sementara, Ngelakoni kata dia adalah bisa menyelesaikan masalah masyarakat, ada di tengah masyarakat, dan selalu tahu penderitaan masyarakat.



komitmen. Di antaranya membuat program subsidi pangan murah, kesehatan dan pendidikan gratis, serta 8 program Ngopeni.

"Ngopeni pesantren, ngopeni pekerja, Ngopeni UMKM, Ngopeni nelayan dan petani serta Ngopeni dengan hati," jelas dia.

Semua itu bisa terlaksana kata dia lewat tata kelola pemerintah baik dan bersih. Serta ditambah kepemimpinan masyarakat yang kuat dan bisa menyelesaikan masalah.

Hal itu kata dia menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Taj Yasin menambahkan, jika visi misinya itu dibuat berdasarkan pengalamannya. Dimana dirinya sejak 2019 telah banyak membangun program yang memberikan layanan kepada masyarakat.

"Tentu kami berharap semoga kami bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah, menyejahterakan masyarakat," pungkasnya. •

Deni Victoria

JADI PENGUSAHA SEJAK MUDA, RAJIN MEMBANTU ORANG SUSAH

Mengenal sosok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih yang juga merupakan peraih suara terbanyak di Pemilihan legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 lalu.

H Deni Victoria SH MSi yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kota Prabumulih. Siapa sangka anak jaksa yang pernah lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun ditolak karena ingin jadi pengusaha, justru menjadi orang nomor satu di DPRD kota Prabumulih periode 2024-2029.

Deni Victoria berhasil memecahkan rekor peraih suara tertinggi di Prabumulih dengan total 6.987 suara dari perolehan suara pribadi. Bahkan suami dari Leni Kartika SH MSi ini membuat partai

gai kontraktor sejak umur 24 tahun hingga berhasil sukses. Kini ia merupakan pemilik PT Cindo Abadi Perkasa (CAP) Group dan memiliki lebih dari 200 orang karyawan.

Usaha Deni dibawah CAP Grup antara lain batching plant Beton dan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang bersertifikat ISO lengkap areal perkantoran dan mushola, memiliki usaha SPBU di Jalan Lingkar Timur Prabumulih dan memiliki sejumlah toko.

Selain itu alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan S2 Taman Siswa Palembang ini memiliki bisnis properti yakni Deni Prabu Reciden (Perumahan DPR) dan usaha lainnya.

Tokoh sukses tersebut aktif di berbagai organisasi sejak muda antara lain pernah menjabat Ketua HIPMI Prabumulih, Ketua Jeep Prabumulih Community (JPC) dan Pembina DPD KNPI Prabumulih serta Karang Taruna Prabumulih.

Sebelum masuk Demokrat, pria akrab disapa DV itu pernah menjadi salah satu tokoh yang membuat nama Partai Golkar Prabumulih meraih kursi ketua di Periode 2019-2024.



berlambang mercy di Prabumulih meraih 5 kursi dari sebelumnya hanya 1 kursi.

Ayah dari Lovika Azlia Putri dan Zahra Talita Putri ini memulai karir dengan berbisnis dari 0 seba-



Berbagai prestasi telah diraih pria yang sering membantu orang susah itu, salah satunya pernah meraih penghargaan Tokoh Muda Sukses & Menginspirasi di kota Prabumulih dari media di Sumsel.

Partai Demokrat Pecahkan Rekor Pileg Raih Suara 5 Kursi dan Suara Terbanyak

Keberhasilan partai Demokrat kota Prabumulih yang berhasil mengukir sejarah dan menjadi partai pemenang bukan perjuangan yang mudah. Ini tak lepas berkat dari strategi jitu dan rasa kepedulian terhadap masyarakat Prabumulih yang ditunjukkan langsung Ketua DPC Demokrat Prabumulih Deni Victoria SH dan kadernya.

Berkat buah hasil kerja keras tersebut partai Demokrat kota Prabumulih pada pemilihan legislatif tahun 2024 ini berhasil meraih lima kursi.

Nah untuk peraihan lima kursi yang diraih Demokrat Prabumulih antara lain, kursi 1 diraih Deni Victoria dengan total perolehan suara pribadi mencapai sekitar 6.987 suara, kursi 2 diraih Iswanto dengan total suara pribadi sekitar 2.041 suara, kursi 3 Anisa Meida Shafira dengan suara pribadi sekitar 1.625 suara. Lalu kursi 4 Demokrat atas nama Erwandi dengan perolehan suara pribadi 1.523 suara dan kursi ke 5 Demokrat Prabumulih atas nama Nicko Adha Pranata dengan perolehan suara 1.316 suara.

Deni Victoria yang terus aktif turun untuk masyarakat. Bahkan seluruh kader digerakkan untuk menarik hati masyarakat dengan turun langsung ke rumah-rumah warga dan lebih dekat dengan hati rakyat.

Tidak hanya door to door mendekati hati rakyat, Demokrat bahkan memberi berbagai jenis bantuan serta peduli dengan rakyat tidak mampu. Dasar itulah Partai Demokrat dan nama Deni Victoria melambung dan harum ditengah masyarakat.

Deni Victoria mengatakan, kemenangan Demokrat ini adalah kemenangan untuk semua masyarakat dan untuk kader. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat kota Prabumulih yang percaya dengan Demokrat Prabumulih.

"Saya berharap kedepan partai Demokrat kota Prabumulih dapat terus berbuat baik untuk masyarakat dan dapat lebih perhatian untuk masyarakat

kota Prabumulih. Kami terus memohon doa dan dukungan semua masyarakat kota Prabumulih semoga kedepan

amanah yang diberikan masyarakat untuk melayani masyarakat dapat terus kami lakukan," pungkasnya. •



Herman Deru-Cik Ujang

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Herman Deru kembali maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Selatan (Sumsel), namun kali ini pria yang akrab disapa HD ini tidak lagi bersama Mawardi Yahya yang memutuskan menjadi penantang di Pilkada Sumsel 2024.

Setelah Mawardi Yahya (MY) memutuskan untuk “pisah ranjang” dengan HD, HD pun memutuskan untuk menggandeng mantan Bupati Lahat Cik Ujang (CU).

Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) mengusung Tagline Sumsel Maju Untuk Semua. Tagline ini sudah jauh dikenalkan Herman Deru semasa menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023.

Pasangan HDCU maju didukung oleh enam parpol yakni, Partai Nasdem, Demokrat, PKS, Perindo, PBB dan PSI. Sebagai petahana, HDCU berkomitmen meningkatkan kualitas masyarakat Sumsel melalui pendidikan, kesehatan dan inovasi.

Pasangan ini menargetkan peningkatan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal serta pengembangan infrastruktur terintegrasi antar kabupaten dan kota. Keduanya juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk mempercepat pelayanan publik

Tak sampai disitu, keduanya berjanji akan mewujudkan pembangunan yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya lokal Sumsel.

Mengenal lebih dekat sosok Herman Deru-Cik Ujang.

H Herman Deru memiliki karier cemerlang di dunia politik, sebelumnya HD ini adalah wiraswasta dan mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga menjadi Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Gubernur Sumsel.

Suami dari Febrita Lustia ini pada tahun 1987 diangkat sebagai ASN pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel. Setelah mengabdikan kurang lebih 11 tahun, pada tahun 1998 HD menanggalkan jabatannya sebagai ASN.

Ayah dari empat anak ini kemudian mengundurkan diri dan kembali fokus mengembangkan bisnisnya sebagai wiraswasta dan terlibat di sebuah organisasi.

Dia menjabat posisi strategis di berbagai organisasi. Beberapa di antaranya yaitu Dewan Pertimbangan Organisasi GM Kosgoro



Palembang, Komisi Ekonomi DPD KNPI Provinsi Sumsel.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Penyantun STIE Trisna Negara, Belitang, Ketua Bidang Koperasi BPC GAPENSI Kodya Palembang, Dewan Penasehat Taekwondo Indonesia Cabang Palembang, dan Dewan Penasehat Koperasi Trisna Negara Sejahtera OKUT.

Setelah banyak berkecimpung di organisasi, saat menjadi pengusaha HD tertarik berpolitik dan terjun ke panggung politik dengan mencoba keberuntungannya di Pilkada Bupati OKU Timur

HD mengabdikan dirinya hanya ada di kantor 2 hari saja dan 5 hari dia terjun ke desa-desa untuk merespon semua keluhan warganya di OKU Timur.

Dia bahkan lebih memilih tinggal di Belitang rumah ayahnya H Hamzah ketimbang di rumah dinas (rumdis) Bupati di Martapura.

Pola kerja itu dipuja-puja oleh warga OKU Timur dia dijuluki Bupati 25 dan dipercaya menjabat dua periode sebagai Bupati berikutnya. Ketika itu HD kembali maju sebagai petahana Bupati OKU Timur periode 2010-2015 berpasangan dengan Kholid Mawardi.

suara, dan Saifuddin Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah 11.35 persen suara.

Sedangkan, Cawagub Sumsel Cik Ujang adalah Mantan Bupati Kabupaten Lahat yang semakin populer di kalangan masyarakat Sumsel, usai dirinya dipinang untuk mendampingi petahana Herman Deru pada Pilkada Sumsel 2024.

Tentu pilihan tertuju kepada pria kelahiran Lebak Budi, Merapi Barat, Lahat Sumsel 2 Mei 1968 ini bukan tanpa alasan, jika melihat track record Cik Ujang sendiri tentu nya tidak bisa dipandang sebelah mata.



pada tahun 2005-2010.

Dia maju sebagai calon Bupati OKU Timur berpasangan dengan Kholid Mawardi dan diusung oleh PBB dan PNBK. Hal itu efek dari banyaknya pengalaman berorganisasi membuatnya jago melakukan strategi berpolitik dan memenangkan kompetisi menjadi Bupati OKU Timur.

Saat menjabat, uniknya HD mengeluarkan kebijakan penggunaan bahasa daerah Komerling, Jawa dan bahasa asli OKU Timur lainnya.

Penduduk OKU Timur wajib menggunakan bahasa daerah Komerling pada tanggal 5 setiap bulannya, bahasa Jawa pada tanggal 15, dan bahasa ibu atau daerahnya setiap tanggal 25.

Setelah itu HD melebarkan karier politiknya dengan mencoba keberuntungan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel pada tahun 2018.

Saat itu sebagai pasangan calon (Paslon) HD memilih Mawardi Yahya resmi diusung oleh tiga partai besar. Ketiga partai yang memberikan dukungan kemenangan paslon ini yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

HDMY memperoleh posisi puncak versi quick count. Berdasarkan data dari LSI, HDMY memperoleh 35,54 persen suara, Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda 32.10 persen suara, Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyudin 21.01 persen

Bagaimana tidak, saat menjabat sebagai Bupati Lahat, suami Lidyawati ini bisa dikatakan salah satu Bupati sukses di Sumsel menjalankan program-program yang dicanangkan.

Bahkan tidak bisa dipungkiri, peran Partai Demokrat memuluskan pencalonan dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur Sumsel mendampingi HD tentunya sangat besar dan memberikan jalan mulus untuk menuju dan menjadi orang nomor dua di Sumsel

Semenjak dilantik sebagai Bupati Lahat, ayah tiga anak ini menjalankan program dengan kerja nyata, terbukti banyaknya prestasi yang diukir dari mulai menjabat hingga akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati

• INFO PROFIL

(Wabup) Lahat Haryanto.

Banyak program kerja yang telah dicanangkan dan direalisasikan oleh Cik Ujang yang sudah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Lahat. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, perikanan, bibit, pupuk serta beragam program kerakyatan lainnya.

Sejak awal tahun 2019, tidak lama pasca dilantik, masyarakat Kabupaten Lahat sudah merasakan jalannya program sekolah dan berobat gratis. Bahkan dari sisi kesehatan, Cik Ujang ber-

yang lalu, Cik Ujang kembali keluaran program terbaru untuk pelajar, dengan mengulirkan bantuan seragam sekolah gratis, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang SMP.

Pada tahun 2023, di sektor pendidikan Cik Ujang kembali mengeluarkan program pro rakyat yaitu melalui program satu desa satu sarjana, tujuannya tentu sangat mulia, karena berharap putra-putri yang berasal dari kalangan warga yang tidak mampu, bisa menyambung pendidikan di perguruan tinggi agar bisa bersaing dan merubah taraf

kan, Cik Ujang mengatakan memang uang kita tidak banyak, dan pembangunannya dilakukan secara bertahap.

Disisi lain Cik Ujang mengakui, pada tahun 2020 hingga 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Lahat sempat melonjak, seiring efek dari Pandemi Covid-19, yang terjadi diakhir tahun 2019, namun pada tahun 2022 Pemkab Lahat berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan tersebut.

Di tahun 2021 penduduk miskin di Kabupaten Lahat sebanyak 68 ribu jiwa atau mencapai 16,46 persen, ta-



hasil menerima penghargaan Universal Health Coverage dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu karena dirinya dianggap sudah mewujudkan komitmen dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia, berkat program berobat gratis, masyarakat Kabupaten Lahat bisa dirujuk ke Rumah Sakit di Palembang, sudah banyak masyarakat merasakan program ini.

Untuk disektor pendidikan, selain program sekolah gratis, pada tahun 2022

hidup yang lebih baik lagi melalui program pendidikan tersebut.

Sedangkan khusus di bidang infrastruktur, Cik Ujang juga memiliki strategi jitu untuk bisa menyentuh wilayah yang puluhan tahun tidak tersentuh, dengan membangun infrastruktur jalan penghubung dari desa ke kota.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Lahat menyebut, jalan di Kabupaten Lahat di tahun 2023 dipastikan 87,5 persen mulus dan dirinya menyadari, memang masih ada jalan Kabupaten yang membutuhkan perbai-

hun 2022 turun jadi 65 ribu jiwa sebesar 15,61 persen, dan penurunan angka kemiskinan ini, merupakan yang tertinggi dalam kurun enam tahun terakhir.

Penurunan angka kemiskinan terjadi karena Pemkab Lahat mampu menekan inflasi di masyarakat, salah satunya adalah dengan cara menjalankan sejumlah program kerakyatan yang diperuntukan dan benar menyentuh langsung ke masyarakat yang membutuhkan.

Diakhir masa kepemimpinannya, Cik Ujang mengatakan, dirinya akan terus berupaya memberikan hal terbaik un-

tuk masyarakat Kabupaten Lahat, baik dari sisi kesejahteraan hingga pembangunan infrastruktur yang baik untuk masyarakat.

Jalan mulus Bupati Lahat yang merupakan kader Partai Demokrat, akhirnya dipercayai sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel menggantikan kepemimpinan Ketua partai Demokrat sebelumnya Ishak Mekki.

Namun berkat kepercayaan yang sangat besar partai Demokrat akhirnya nama Cik Ujang didukung 17 voter dari Kabupaten dan kota se-Sumsel dan dipastikan Cik Ujang menang secara aklamasi.

Cik Ujang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat 2 periode yakni 2009–2014 dan 2014–2019.

Sementara terkait program kerja HDCU, selaras dengan visi Sumsel 2025–2029.

Yakni Sumsel Maju Untuk Semua. Sumsel sebagai provinsi yang maju ekonominya, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, modern, tangguh, inovatif dan adil.

Selain itu, Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Juru bicara tim pemenang HDCU, H Alfrenzi Panggarbesi, menjelaskan setidaknya ada 7 visi misi membangun Sumsel ke depan.

“Pertama, mewujudkan masyarakat Sumsel yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing,” jelasnya.

Kedua, mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Ketiga, mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan

iklim,” terangnya.

Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Kelima, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk

Sedangkan 12 program strategis HDCU untuk pemerintahannya ke depan antara lain, yakni mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat.

Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP). Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Pendidikan Yang Berkeadilan.



menurunkan angka kemiskinan.

Keenam, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

“Terakhir atau ketujuh adalah mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Infrastruktur Tuntas Merata, Sumsel Interkoneksi, Mencetak 100.000 ‘Sultan’ Muda atau Wirausaha Muda Sumsel . Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya.

Sumsel Wonderfull 2030. Sumsel Berintegritas dan Melayani, Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak, Revitalisasi Pasar Tradisional. •

Eddy Santana Putra- Riezky Aprilia

SUMSEL CERAH

Majunya pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Pilkada Sumsel 2024, Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia bertekad untuk mewujudkan Sumsel CERAH (Cedas, Sehat dan Sejahtera).

Implementasi dari Sumsel CERAH ini dituangkan di dalam misi yang menyangkut semua kebutuhan dasar masyarakat Sumsel mulai dari jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan hingga hunian layak bagi masyarakat.

Pencalonan Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia atau ERA sebelumnya sempat membuat kejutan yang maju dalam Pilgub Sumsel 2024 tanpa dukungan Partai Gerindra, padahal pria yang akrab disapa ESP ini merupakan kader Partai Gerindra.

EDP lahir di Pangkal Pinang, 20 Januari 1957 ketika itu ayahanda sedang bertugas di sana. Ayahanda H. Animan Achyat (Alm) adalah seorang TNI dengan pangkat terakhir Kolonel Infanteri, pelaku sejarah dan ikut memimpin pasukan (Batalyon 30 Resimen 17) dalam rangka perang 5 (lima) hari 5 (lima) malam di Kota Palembang yang terjadi pada 1 Januari sampai 5 Januari 1947.

Ibunda, Hj. Chalidjah Animan (Alm) adalah Ibu Rumah Tangga biasa yang menyukai pekerjaan rumah tangga, menjaga dan merawat keluarga dan putra-putrinya sebagaimana layaknya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya.

ESP menempuh pendidikan di SD YKKP (Pusri) Palembang (1964-1969), lalu lanjut di SMP YSPP (Pusri) Palembang (1970-1972) dan SMA Xaverius 1

Palembang (1973-1975).

ESP merupakan lulusan Sarjana Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Palembang (1976-1984), Pasca Sarjana Teknis Pengairan Jurusan Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai di Bandung (1990-1991) dan Pasca Sarjana Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Jurusan Manajemen Sumber Daya Air di Palembang (2001-2004).

ESP menjadi Wali Kota Palembang termuda melalui mekanisme pemilihan DPRD Palembang pada tahun 2003. Kemudian terpilih kembali melalui mekanisme langsung pada tahun 2008.

Pada masa kepemimpinan ESP di Palembang mengalami banyak sekali kemajuan dan perubahan. Semua sektor dari pariwisata, transportasi, kesehatan, pendidikan sampai ke pengelolaan air minum.

Mengubah dan menertibkan kawasan kumuh di sekitar Jembatan Ampera menjadi kawasan yang bersih. Menjadikan kawasan tersebut menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dan masyarakat lokal yang ingin menghabiskan waktu menikmati Sungai Musi.

Memiliki kedekatan dengan ormas dan organisasi pemuda di



Palembang. Dengan kedekatan tersebut bisa menertibkan pasar 16 Ilir di pinggiran Jembatan Ampera.

ESP merupakan tokoh dan sosok di balik reklamasi kawasan Jakabaring, Palembang yang saat itu dia masih tercatat sebagai pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan.

Tidak hanya itu, ESP juga pernah menjabat sebagai Kasubsi Pembangunan Irigasi dan Pengairan Cabang Dinas PU Kabupaten Musi Rawas (1986-1988).

ESP juga pernah menjadi Staf Sub Dinas Pengairan Dinas PU Sumatera Selatan (1989-1992). Pimpro O dan P Jaringan Irigasi Kotamadya Palembang Dinas PU Sumsel (1992-1993). Pimpro Pengembangan Rawas (Reklamasi) Kotamadya Palembang Sub Dinas PU Pengairan Sumsel (1993-1998).

Pimpro Peningkatan/Pengembangan Situs Kerajaan Sriwijaya, Sub Dinas PU Pengairan Dati I Sumsel (1994-1998). Kasubdin Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan Dinas PU Pengairan Dati I Sumsel (1997-1998).

Kepala Dinas PU Kotamadya Palembang (1998-2001), Kepala Dinas Kimpraswil Kotamadya Palembang (2001-2002). Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang (2002-2003) hingga Wali Kota Palembang (2003-2008) dan Wali Kota Palembang (2008-2013) serta Anggota DPR RI Komisi V (2019-2024).

Sementara Partai PDI Perjuangan menurunkan kader perempuan terbaiknya Riezky Aprilia menjadi Bakal Calon Wakil Gubernur Sumsel di Pilgub 2024 mendampingi ESP.

Perempuan kelahiran Palembang 18 April 1983 ini memulai kariernya sebagai Financial Konsultan Astra CMG Life di Bandung pada tahun 2002 sampai 2003.

Pernah menjadi jurnalis sebagai staf Ardan Radio Main Works di Bandung tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya dia merambah ke dunia bisnis menjadi Owner Willa Ravi Housing Bandung, Owner Fabi Housing Bandung, Owner Kamo Housing Jakarta dan Owner Green Hill Mua Thai Sport Camp Jakarta.

Karier politik Riezky Aprilia dimulainya saat mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Dia mewakili daerah pemilihan Sumat-



era Selatan I, yang meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Saat itu juga Riezky mencampulung-

kan diri di dunia politik dan menjadi kader PDI Perjuangan dan duduk di Komisi IV DPR RI.

Dia pun akhirnya dipercaya oleh Moncong Putih untuk menjadi kader yang maju di panggung mega pertarungan

• INFO PROFIL

Pilgub Sumsel melawan kontestan lainnya.

ERA harus melawan pasangan Herman Deru - Cik Ujang (HDCU) dan pasangan Mawardi Yahya - Anita Noerenghati (MATAHATI) bertarung di Pilgub Sumsel 2024.

Sementara itu dari sisi pendidikan Riezky Aprilia bersekolah di Palembang sejak SD di Kartika 2 tahun 1987-1993 dan SMP Xaverius Maria tahun 1993-1996.

tahun 2007-2010.

Selanjutnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat tahun 2007-2010 dan Wakil Ketua BMI Sumatera Selatan tahun 2017-2022. Wajar saja dia tertarik ke dunia politik karena rentetan pengalamannya organisasinya tersebut.

ERA akan mengembangkan program Sumsel CERAH dengan beberapa misi mewujudkan pemerintahan Sumsel yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terbuka, dan melayani un-

ERA juga akan menciptakan sumber daya manusia yang tangguh lahir dan batin, kompeten, dan berdaya saing global dengan indeks pembangunan manusia yang baik.

Menata Sumsel sesuai dengan perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi melalui peningkatan dan keberlangsungan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan bidang pertambangan dan lingkungan, yang berbasis berkeadilan dan berke-



Kemudian dia melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 2004-2008 dan S2 di Universitas Padjadjaran tahun 2009-2011 di Jawa Barat.

PDI Perjuangan bukan organisasi pertama yang diikuti Riezky Aprilia, dia menjadi anggota Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Jawa Barat

tuk warga.

Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga melalui jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, membangun hunian yang layak bagi masyarakat, tersedianya transportasi publik yang nyaman dan ekonomis serta tercipta dan terse-dia lapangan pekerjaan.

hidupan sosial bagi warga.

Membangun Sumsel yang berbasis teknologi dan infrastruktur kelas dunia dengan warga yang berketuhanan, berbudaya, bergotong royong, berwawasan, toleran, partisipatif, dan inovatif.

Di dalam mewujudkan visi dan misi ini, ESP dan Riezky Aprilia akan melakukan

pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar menengah di seluruh wilayah Sumsel (SD-SMP-SMA) melalui pendidikan gratis dan biaya murah.

Selain itu juga menyediakan program beasiswa (SI-S2-S3) di dalam dan di luar negeri untuk masyarakat dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen.

Bahkan, ERA bertekad menghentikan pungutan liar di sekolah dan mencipta-

sejak dini.

ERA juga melaksanakan mewujudkan program berobat gratis dengan tetap mengkolaborasikan sistem BPJS Bidang UMKM, ERA akan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha dan melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Sumsel menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern.

Untuk bidang agropolitan yang meliputi Pertanian, Perikanan dan Peter-

rutin.

Selain itu, meningkatkan dan mengembalikan status bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Sumsel) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provinsi Sumsel sebagai destinasi pariwisata level internasional dan mengaktifkan bandara perintis sebagai upaya penunjang kegiatan wisatawan di sumsel, serta membangun Pelabuhan samudra Tanjung Carat yang selama ini menjadi mimpi rakyat Sumatera Selatan.



kan satu juta lapangan kerja.

Di bidang kesehatan, ERA akan menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Sumsel dengan biaya gratis bagi warga serta meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pencegahan stunting dan gizi buruk

nakan, ERA akan memperluas lahan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan di Sumsel dalam rangka mengembalikan produk lokal sebagai produk agrobisnis andalan Sumsel sehingga kejayaan Sumsel sebagai Provinsi perdagangan di era-sriwijaya bisa dicapai kembali.

Selain itu memberikan bantuan modal, teknologi, bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

Di bidang infrastruktur dan energi, ERA akan melakukan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara

Tak hanya itu, ERA juga akan membangun Taman Digital (Cyber Park) lengkap dengan fasilitas internet kecepatan tinggi dan didukung dengan teknologi canggih dan gratis, untuk memaksimalkan potensi kaum milenial dan Gen-Z di bidang UMKM digital, Gaming E-Sport maupun influencer.

Serta membangun pusat pendidikan di semua bidang teknologi agar dapat menciptakan kaum milenial dan Gen-Z yang berkualitas dan unggul yang dapat membantu memajukan daerah Sumatera Selatan menjadi yang terdepan dalam bidang Teknologi. •

Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati

SUMSEL BANGKIT BERSAMA

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya-Anita Noeringhati, maju dalam Pilkada Sumsel 2024 membawa slogan “Sumsel Bangkit Bersama” dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan serta membawa kemajuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan.



Dengan singkatan MATAHATI, pasangan ini menyebut akan berkomitmen mewujudkan Sumsel bangkit bersama.

Tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal karena itu adalah prinsip dari MATAHATI untuk menuju Sumsel lebih baik, Sumsel lebih sejahtera lagi dan Sumsel bangkit bersama seluruh masyarakat.

Mawardi Yahya merupakan mantan Wakil Gubernur Sumsel yang lahir pada 2 Maret 1958 bukan sosok baru dalam kancah perpolitikan di Sumsel.

Pria berambut putih yang akrab disebut Wak Uban ini, sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumsel sejak 1 Oktober 2018, sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Ogan Ilir selama 2 periode.

Mawardi Yahya menjabat Bupati Ogan Ilir pada periode 2005-2010 dan periode 2010-2015. Sebelum berkarir sebagai Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, periode 1999-2004.

Bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, Mawardi Yahya, merupakan sosok bapak pembangunan. Pada masa kepemimpinannya dibangun Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai.

Mawardi Yahya mengundurkan diri seba-

gai Bupati Ogan Ilir, pada 23 Juni 2015 dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Daud Hasyim hingga selesai pada tanggal 22 Agustus 2015. Pada akhir masa jabatannya, Kabupaten Ogan Ilir meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mawardi sendiri merupakan Ketua Tim Kemenangan Daerah Prabowo-Gibran di Sumsel. Berkat campur tangannya, Prabowo-Gibran menang di Sumsel dengan memperoleh 69,8%.

Karena itulah Mawardi percaya diri (PeDe) maju menyaingi Herman Deru yang sebelumnya adalah rekannya di Pilgub Sumsel 2018-2023 karena Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.

Sementara eks rekannya, Herman Deru yang juga Ketua DPW NasDem

Sumsel tak meraih hasil optimal bagi pasangan Anies Baswedan-Muhamdin Iskandar di provinsi tersebut.

Ketidakberpihakan di Pilpres lalu diduga membuat keduanya



“pisah ranjang”.

Sementara pasangannya, RA Anita Noeringhati adalah mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel sejak 2019 yang dikenal sebagai Singa Betina Parlemen Bumi Sriwijaya.

Perempuan tegas yang lahir dan besar di Klaten dan Yogyakarta Jawa Tengah ini, sebelum masuk ke parlemen menjadi anggota DPRD Sumsel pada tahun 2009 adalah seorang Advokat yang cukup dikenal oleh masyarakat kota Palembang.

Perempuan kelahiran 28 Juli 1963 ini menceritakan perjalanan kiprah dan peran RA Anita mulai dari Advokat hingga menjabat sebagai ketua DPRD Sumsel.

Anita merupakan istri Sigit Wibowo, mantan Kepala Dinas Kehutanan

ekspektasi.

Anita Noeringhati resmi menandatangani gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang setelah dikukuhkan oleh rektor Prof Dr Gunarto SH MHum dalam sidang senat terbuka di Auditorium Unissula Semarang, September 2023.

Anita berhasil menempuh studi doctoral tepat waktu, selama lima semester. Ia mampu meyakinkan penguji dan mempertahankan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Perda Anggaran (Studi Analisis

Hukum Berbasis Keadilan APBD Sumatera Selatan)”.

Karya ini semakin menasbihkan ia sebagai ahli di bidang hukum yang sudah ia tekuni sejak menjadi advokat dari tahun 1993.

Berkat kerja keras dan kerja nyata yang ditunjukkan oleh dirinya selama ini berbuah manis, dirinya dipercaya oleh masyarakat dan partai untuk mendampingi Mawardi Yahya, bertarung pada Pilgub Sumsel 2024 sebagai Wakil Gubernur Sumsel.

Dipilihnya Anita untuk mendampingi Mawardi Yahya sebagai Cawagub Sumsel banyak menyita perhatian



Pasangan MATAHATI memiliki 12 program kerja mulai dari, mengembalikan berobat dan pendidikan gratis.

Provinsi Sumsel, selalu memberikan penjelasan bahwa politik itu bukan hanya dunia milik kaum laki-laki, namun perempuan juga mampu duduk di kursi parlemen DPRD Sumsel.

Anita merupakan anggota DPRD Sumsel dari Partai Golkar, dikenal karena memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hal kesetaraan dan kemandirian.

Ibu Aryuda Perdana Kusuma dan Ardhia Putri Kusuma merupakan sosok yang tegas.

RA Anita Noeringhati berharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi perempuan. Ia ingin membuktikan bahwa kaum hawa memiliki potensi yang besar dalam dunia politik dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Perempuan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, bahkan melebihi



• INFO PROFIL

masyarakat Sumsel, karena sebelumnya, Mawardi Yahya telah mendeklarasikan diri maju di Pilgub Sumsel 2024 yang akan datang berpasangan dengan mantan Wali Kota Palembang Harjojo.

Kandasnya pencalonan Harjojo sebagai Cawagub Sumsel mendampingi Mawardi Yahya menimbulkan pertanyaan, hingga akhirnya muncul nama Anita Noeringhati sebagai pengganti.

Perjalanan politik Anita Noeringhati yang dilantik kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumsel pada 24 September 2019 bersama 74 orang anggota lainnya.

Pelantikan tersebut merupakan pelantikan ketiga yang dijalani Anita, setelah sebelumnya juga dilantik pada 24 September 2014 untuk periode 2014-2019 dan pada 24 September 2009 untuk periode 2009-2014.

Anita sudah menjalani periode ketiganya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel. Ia terpilih melalui Partai Golon-

gan Karya. Pada Pemilu 2019.

Dimana pada Pileg 2019 yang lalu dirinya berhasil meraup 16 ribu lebih suara sah di Daerah Pemilihan Sumsel 1.

Pelantikan yang ke ketiga kalinya ini menjadi terasa lebih istimewa ketika ia ditunjuk oleh partai Golkar untuk menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumsel.

Pada periode kedua sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel, Anita dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sumsel periode 2014-2019.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel oleh partainya.

Pada periode 2014-2019, Anita Noeringhati dipercaya oleh Partai Golkar untuk menjabat Ketua Komisi IV yang membidangi terkait pembangunan.

Anita menjabat sejak 27 April 2017 hingga akhir masa jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel. Ia

merupakan wanita pertama yang menduduki posisi tersebut.

Karena Dua komisi lainnya juga dijabat oleh anggota perempuan, yaitu Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi I-Bidang Pemerintahan dan Holda dari Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi III-Bidang Keuangan, ini yang mencerminkan adanya peran perempuan serta wujud kesetaraan gender di DPRD Provinsi Sumsel.

Ia memimpin DPRD Provinsi Sumsel didampingi oleh Giri Ramanda Kiemas dari PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua I, Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II, dan Muchendi Mahzareki dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua III.

Pasangan MATAHATI memiliki 12 program kerja mulai dari, mengembalikan berobat dan pendidikan gratis. Menyiapkan ekosistem pendukung untuk lapangan pekerjaan bagi milenial dan Gen-Z, mengembalikan bantuan Gubernur untuk desa.



Mengembalikan bantuan Gubernur untuk pondok pesantren, meningkatkan tunjangan pelatihan Penyuluh Pembantu Urusan Keagamaan (P2UKD) di tiap desa se-Sumatera Selatan.

Meningkatkan tunjangan insentif RT/RW di kelurahan se-Sumatera Selatan, meningkatkan tunjangan insentif bagi tenaga guru honorer. Meningkatkan infrastruktur dan ekonomi, meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM), meningkatkan investasi dan pelayanan sosial serta mengembalikan kejayaan event dan prestasi olahraga, seni, serta budaya di Sumatera Selatan.

Sedangkan untuk misinya, pasangan ini menetapkan delapan poin, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Memantapkan kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif serta infrastruktur.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah

sumber daya alam. Membangun pedesaan untuk pemerataan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Memperkuat reformasi dan tata kelola pemerintahan demi peningkatan pelayanan publik. Meningkatkan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama untuk menjaga Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. •



Ridwan Kamil -Suswono

DIUSUNG DAN DIDUKUNG KOALISI BESAR

Dengan dukungan cukup besar banyak yang memprediksi pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono akan memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasangan ini dianggap menjadi simbol bersatunya kekuatan demokrasi yang sempat panas di Pilpres 2024 lalu.

Ridwan Kamil merupakan eks Gubernur Jawa Barat yang purna tugas sejak 5 September 2023. Sementara itu, Suswono melalui PKS pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI dapil Jawa Tengah untuk periode 2004-2009. Suswono juga pernah menjadi Menteri Pertanian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat dari tahun 2009-2014.

Pasangan ini diusung koalisi besar. Ada banyak partai politik yang menyatakan dukungan kepada keduanya.

Di antaranya ada partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029. Selain itu, ada juga Partai Garuda dan Partai Gelora.

Sementara itu, ada partai-partai yang tidak tergabung dalam KIM di Pilpres 2024, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Perindo, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Semua partai tersebut mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta melalui Pileg 2024.

Besarnya dukungan untuk pasangan



RIDWAN KAMIL -SUSWONO
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI

Partai Pendukung



ini membuat Ridwan Kamil - Suswono selalu unggul di hasil survei.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia, menunjukkan elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut satu (1), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) unggul dibandingkan pasangan calon lainnya dengan angka 47,8 persen.

Sementara pasangan calon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapat elektabilitas sebesar 38 persen, dan pasangan calon nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana elektabilitasnya mencapai 4,3 persen.

"Namun, ada 9,9 persen pemilih yang ragu-ragu menentukan pilihannya," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, tingkat elektabilitas tiga pasangan calon masih bisa berubah hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024.

Berdasarkan survei itu, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono tampak turun 5,6 persen dibandingkan data elektabilitas perorangan Ridwan Kamil yang relatif kuat sebagai Cagub, yakni 53,4 persen.

Begitu pun elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang juga turun 14 persen dibandingkan elektabilitas perorangan Rano Karno yang signifikan sebagai cawagub, yakni 52 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa kedua tokoh, baik Ridwan Kamil maupun Rano Karno memiliki kesamaan masalah, yakni memiliki pasangan yang belum mampu mengimbangi kekuatan mereka," kata Adi.

Adi menyebutkan bahwa pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 cenderung lebih dominan memilih Ridwan Kamil-Suswono dengan persentase mencapai 61 persen.

Survei itu juga memotret para pemilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 paling dominan menjatuhkan pilihan kepada Ridwan Kamil-Suswono dengan angka 44,5 persen.

Di luar itu, hanya pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dominan menjatuhkan pilihan kepada Pramono Anung-Rano Karno.

"Pemilih yang mengaku mendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto

sementara ini cenderung lebih dekat ke pasangan nomor urut 1 dibandingkan pasangan nomor urut 2 dan 3. Sementara pendukung Ganjar lebih dekat ke pasangan nomor urut 3," ucapnya.

Melihat besarnya dukungan untuk mereka, RIDO menargetkan menang dalam satu putaran saja. Untuk itu mereka akan maksimal memenangkan pasangan Ridwan Kamil - Suswono salah satunya dengan memaksimalkan kampanye akbar.

Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ahmed Zaki Iskandar mengatakan kampanye akbar RIDO itu bertajuk Satuin Jakarta.

"Pada kampanye akbar ini paslon Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono akan mengintegrasikan seluruh dukungan dari Partai Koalisi KIM, terutama dari elemen masyarakat dan masyarakat umum sendiri," ucap Zaki.

Menurut dia, kapasitas masyarakat, pendukung, relawan, ormas, hingga para kader partai yang akan hadir dalam kampanye akbar dibatasi 20 ribu orang.

"Yang paling penting adalah sebetulnya masyarakat umum, agar bisa mendengarkan dan mengetahui secara pasti visi-misi pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono," kata mantan Bupati Kabupaten Tangerang ini. •



Dharma Pongrekun-Kun Wardana SIAPKAN PROGRAM UNGGULAN UNTUK WARGA

Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana membawa program Selamatkan jiwa bisa membuat perut kenyang demi memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat di Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2024.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengungkapkan sejumlah janji tentang penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Menurutnya program yang sudah ada sudah bagus sebenarnya tinggal perlu pengoptimalan saja.

Untuk mengatasi masalah transportasi kemacetan, ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan tinggal memaksimalkan manajemennya.

"Tidak perlu menambah armada, manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit. Kemudian, dipastikan keamanan, supaya disabilitas, lansia (lanjut usia), ibu-ibu hamil mendapatkan maintenance atau treatment khusus," ucap Dharma.

Sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, perlu membuat kawasan tersentralisasi, sehingga transportasi umum bisa terkonsolidasi. Selain itu perlu adanya mikro transportasi yang memiliki jarak

minimal 500 meter dari pemukiman untuk terhubung dengan transportasi massal, seperti MRT dan LRT.

"Kemudian juga, disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman, supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum, karena keamanan kendaraan yang tinggal (di parkir) itu terjamin," kata Dharma.

Dia juga memastikan penggunaan kendaraan harus nyaman, misalnya keberadaan AC yang berfungsi dengan baik dan aroma di dalam kendaraan tidak boleh pengap. Oleh sebab itu, dia menilai perlu menanamkan budaya antri kepada anak-anak sejak usia dini.

Dharma juga akan menghapus Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah eselon 4a dan karyawan swasta. Dengan penghapusan PBB maka uang warga golongan tersebut yang semestinya untuk membayar pajak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Kami memastikan penduduk Jakarta tidak boleh menganggur, perut mereka harus kenyang, semua sekolah, pengusaha besar jalan dan pengusaha kecil jalan, semua adil," kata Dharma.

Selain PBB, Dharma juga akan menghapuskan PB 1 atau penetapan tarif pajak restoran dari sebelumnya 10 persen menjadi satu persen saja. "Kami hilangkan nolnya, dari 10 persen jadi 1 persen," kata dia.

Kemudian itu, jika terpilih sebagai gubernur dia juga akan meng-



hilangkan pajak take away dari sebelumnya sebesar 10 persen. "Ini yang kami janjikan untuk warga Jakarta," kata dia.

Bentuk Tim Adab, Pengurusnya Guru Honorer

Dharma Pongrekun mengungkapkan keinginannya untuk membentuk tim pembina adab jika terpilih dalam Pilkada Jakarta. Tim ini akan menangani mulai dari masalah ekonomi dan kemandirian.

"Jadi nanti yang akan kami gunakan adalah mereka-mereka yang punya hati emas yaitu yang kami lihat adalah guru-guru honorer," kata Dharma.

Dharma menyatakan bahwa nantinya guru-guru honorer tersebut akan didampingi oleh ahli dalam mengerjakan tugasnya. Purnawirawan itu menyebutkan bahwa nantinya ia akan menggarap beberapa bidang tim adab, salah satunya adalah pertanian.

"Misalnya mau bikin pertanian, bagaimana pertanian kota supaya tercipta pangan mandiri? Harus dilatih, kami kasih bibitnya," ujar calon gubernur Jakarta jalur independen itu.

Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta, Kun Wardana, ingin menyaring konten negatif dalam penerapan program internet gratis yang digagasnya.

Penyaringan konten negatif ini, kata Kun, akan dilakukan melalui Domain Name System (DNS) filtering, yaitu metode pemblokiran terhadap situs-situs tertentu.

Kun mengatakan program internet gratis merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan digital.

"Kami menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps. Dan kami sudah buat kajian, kami akan menggratiskan itu," kata Kun.

Untuk diketahui Komisaris Jenderal (Komjen) Pol (purn) Dharma Pongrekun merupakan pria kelahiran Palu 12 Januari 1966. Dia merupakan pakar keamanan siber dan mengenyam pendidikan mulai SD dan SMP Bruderan Purwokerto, Jawa Tengah, lalu pindah ke Jakarta, menempuh pendidikan di SMAN 34 Jakarta dan lulus tahun 1984.

Dia kemudian memutuskan masuk ke Akademi Kepolisian (Akp) dan lulus pada 1988.

Selain di kepolisian, dia menambah pengetahuan di bidang akademik

dengan kuliah di Magister Manajemen Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, pada 2002 dan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2006). Dharma mendapatkan gelar doktor kehormatan bidang kemanusiaan dari MBC University, Depok, pada 2023.

Pada 2018, Dharma ditugaskan di luar kepolisian, menjadi Deputy Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lalu pada 2019 hingga 2021 menduduki posisi Wakil Kepala BSSN.



Sementara itu sang bakal calon wakil gubernur Dr Kun Wardana adalah seorang dosen tetap di Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta.

Kun Wardana lahir di Jakarta Pusat, 11 Agustus 1969, dengan delapan bersaudara. Ayahnya, Abiyoto Hadiprojo, merupakan seorang pensiunan pegawai negeri sipil dari Partai Golongan Karya yang bertugas di Departemen Dalam Negeri dan berkiprah sebagai pengacara.

Kun Wardana sejak kecil selalu mengiku-

ti program percepatan dalam menempuh pendidikan formal. Saat lulus dari taman kanak-kanak, ia langsung duduk di bangku kelas dua sekolah dasar. Duduk di kelas 3 dan kelas 4 sampai 6 hanya ditempuh setahun, sehingga ia menamatkan sekolah dasar di usia delapan tahun.

Ia melanjutkan sekolah di SMP Trunajaya II, Kramat Kwitang, dan selesai dalam dua tahun pada tahun 1980. Dia kemudian melanjutkan sekolah di SMA Trunajaya dan tidak lulus ebtanas. Dia kembali bersekolah di kelas 3 SMA Neg-

eri 3 Jakarta dan berhasil lulus pada tahun 1982.

Dia mulai kuliah di umur 12 tahun dan pada April 1988, Kun dinobatkan sebagai penerima gelar insinyur termuda di Universitas Trisakti. Kala itu, dia berusia 18 tahun, 238 hari.

Selanjutnya, Kun Wardana melanjutkan pendidikan jenjang S2 di Universitas Indonesia lulus tahun 1992. Terakhir, dia mengenyam pendidikan jenjang S3 di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1995. ●

Pramono Anung-Rano Karno

TAWARKAN 10 PROGRAM UNGGULAN

Meski hanya didukung PDIP namun kepercayaan diri tinggi ditampilkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 jika Pramono Anung dan Rano Karno. Pasangan ini menaruh perhatian besar di bidang lapangan kerja, pendidikan, kesehatan mental, hingga fasilitas untuk kaum disabilitas melalui 10 program unggulan mereka.

Pramono Anung dan Rano Karno, juga mencanangkan pembenahan sistem pendidikan di ibu kota, termasuk perbaikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan peningkatan kesejahteraan guru. Langkah ini dianggap positif dan mendesak, mengingat permasalahan pendidikan di Jakarta yang masih memerlukan banyak perbaikan.

Perhatian juga akan diberikan kepada para seniman. Dimana Pramono berencana menggunakan nama aktor sekaligus komedian Betawi, Benyamin Sueb, dalam sebuah penghargaan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Penghargaan tersebut, kata dia, sebagai bentuk penghormatan terhadap seniman besar tersebut.

Sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Sueb, pihaknya akan menyelenggarakan Benyamin S Awards. Yaitu singkatan dari Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera.

Untuk mengurangi angka pengangguran Pramono - Rano akan menggelar job fair atau bursa lowongan kerja di tiap kecamatan. Selain job fair, mereka juga bakal menggelar pelatihan kerja yang terintegrasi. Pelatihan ini disebutnya juga tersertifikasi.

Di bidang pendidikan, Pramono dan Rano Karno akan memastikan wajib



PRAMONO-DOEL
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI

Partai Pendukung



PDI PERJUANGAN



belajar tuntas 12 tahun, SD hingga SMA, tanpa kendala biaya. Tak hanya itu, pasangan ini juga akan menyediakan beasiswa kuliah hingga lulus tanpa perlu verifikasi tiap tahun.

"Kami sediakan beasiswa kuliah, tidak perlu verifikasi tiap tahun tapi langsung dikontrak hingga lulus kuliah," jelasnya.

Untuk tenaga pendidik, seluruh guru honorer di Jakarta akan dinaikkan kesejahteraannya. Mereka perlu diperhatikan demi keberlangsungan proses belajar mengajar lebih baik.

"Kami tak ingin melupakan kesejahteraan guru honorer yang hari ini menerima gaji Rp 2.000.000 setiap bulannya," ungkap Pramono.

Selain itu, ia juga tak mau guru honorer terjerat pinjaman online (pinjol) karena kurangnya pendapatan.

Komitmen sehatkan mental warga Jakarta. Pramono-Rano juga berkomitmen untuk menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling. Pihaknya akan memangkas waktu tunggu layanan BPJS Kesehatan dengan mengintegrasikan data antrian rumah sakit di seluruh Jakarta.

Sementara Rano Karno mengatakan jika mereka terpilih pemerintah akan dibuat seperti teman yang asik dan tidak ribet. Pihaknya berjanji membesarkan hal-hal rumit yang ada di Jakarta.

"Pemerintah itu harusnya kayak teman yang asik. Kalau mau bantuin, bantuin yang beneran. Kalau ada yang ribet, kite beresin," katanya.

Rano Karno juga menyebut jika mereka menang, pemerintahannya akan melanjutkan apa yang sudah ada, salah satunya aplikasi JAKI. "Gak perlu bikin aplikasi baru, tinggal kita lanjutin aja aplikasi JAKI jadi lebih canggih dan lebih responsif. Kita bikin layanan untuk warga Jakarta cukup dalam satu genggam saja," ujarnya.

Wujudkan Jakarta aman dan nyaman. Pramono - Rano akan membuat Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman dengan pemasangan kamera pengawas 24 di setiap RT.

"Kita wujudkan Jakarta yang aman dan nyaman dengan CCTV 24 jam setiap RT," ungkapnya.

Mereka juga ingin membangun ke-

sadaran warga Jakarta untuk bangga dengan kotanya.

"Kami ingin warga Jakarta merasa 'Gue bangga tinggal di sini. Gue bisa sekolah, gue bisa bekerja, gue bisa tersenyum bahagia di sini'. Mari kita wujudkan Jakarta Kota Global."

Pramono juga berjanji akan meningkatkan fasilitas bagi kaum disabilitas yang ada di Jakarta demi menyamakan kesejahteraan masyarakat.

"Persoalan disabilitas di Jakarta dan Bandung kurang lebih sama tidak ada keberpihakan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menangani mereka," kata Pramono.

Untuk diketahui Pramono Anung dikenal sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia sejak 12 Oktober 2015. Pramono lahir di Kediri, 11 Juni 1953. Ia pernah menempuh pendidikan S1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia juga mendapat gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia meraih gelar doktor komunikasi dari Universitas Padjajaran (Unpad). Pramono juga dikenal sebagai politikus PDIP. Ia pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (2009-2014). Kemudian menjadi Sekretaris Kabinet selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Sementara Rano Karno lahir di Jakarta, 8 Oktober 1960. Sebelum terjun ke dunia politik, Rano lebih dulu dikenal dengan julukan 'Si Doel' berkat perannya dalam sinetron 'Si Doel Anak Sekolah'. Rano Karno kemudian terjun ke politik. Ia pernah menjadi Anggota MPR RI (1997-2002).

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tangerang sampai 2011 (2008-2013) dan Wakil Gubernur Banten (2012-2017). Kemudian sempat menjadi Plt Gubernur Banten (2014-2015) hingga Gubernur Banten (2015-2017). Rano Karno selanjutnya menjadi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten III. ●





KESEJAHTERAAN DESA INDIKATOR KEMAJUAN INDONESIA

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan platform Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa atau P2KTD sebagai bagian dari solusi untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan, platform P2KTD diharapkan dapat semakin memantapkan upaya dalam mengevaluasi dan menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada di desa.

P2KTD juga menjadi wadah memudahkan desa dalam mengoptimalkan tingkat belanja, pembangunan, menghidupkan perekonomian, pemanfaatan potensi desa, bahkan membangun kerja sama dengan para profesional. Sehingga memudahkan kepala desa beserta unsur-unsur yang terlibat di desa menyiapkan dan mematangkan perencanaan yang baik untuk desa.

Kementerian Desa PDT melalui berbagai program, termasuk P2KTD, berupaya memastikan desa dapat mengoptimalkan potensi mereka masing-masing dan diharapkan tumbuh menjadi pelaku yang

ekonomi yang cukup besar yang juga harus dimanfaatkan oleh desa. Sehingga, desa bukan hanya penerima program, tapi juga terlihat dalam penyediaan aspek-aspek penting yang dibutuhkan dalam program tersebut," kata Yandri saat peluncuran platform P2KTD di lapangan Balai Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Senin, 11 November 2024.

Hal itu juga akan menggerakkan perekonomian daerah dan benar-benar menciptakan swasembada pangan dari desa, penyediaan lapangan kerja di desa, mengatasi pengangguran, hilirisasi produk yang tujuan akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Yandri menyatakan kesejahteraan desa menjadi indikator tentang kemajuan Indonesia.

"Desa ini menjadi ujung tombak p e m -
ban-

ikut meng-
gerakkan perekono-
mian, bukan sebagai
penerima manfaat
saja.

Dia mencontohkan, Presiden Prabowo Subianto telah merancang program makan bergizi gratis yang tentunya membutuhkan bahan baku pangan tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan seluruh Indonesia.

"Hal tersebut membuat pergerakan



gunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia,” kata Yandri.

Yandri pun mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa. Hal itu merupakan indikator utama kemajuan Indonesia dan menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak, sebab Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.

Seluruh kepala desa juga diajak agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa. Audiensi publik seperti itu memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka.

Upaya tersebut juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.

“Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Tidak bisa, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu,” kata dia.

Yandri juga menjelaskan, desa-desa di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam mencapai kemandirian pangan dan air. Untuk mewujudkan tujuan mulia itu, pemerintah telah merumuskan visi yang ambisius, yaitu Desa Daulat Pangan di 2030.

Visi itu bertujuan untuk menghapuskan kelaparan dan memastikan bahwa setiap desa di Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, termasuk menyukseskan cita-cita pemerintah untuk swasembada pangan.

Yandri juga meminta semua pihak untuk menghilangkan ego sektoral

demi membangun desa. Menurut dia, membangun desa membutuhkan dukungan dari seluruh pihak baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pihak swasta, maupun elemen masyarakat. Pembangunan tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah atau bahkan pemerintahan desa saja.

Kerja sama tersebut begitu pent-

bada air atau di desa tempat banyak produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi produk-produk desa.

Oleh karena itu, Yandri meminta seluruh kepala desa untuk memetakan potensi daerah masing-masing, tentang keterlibatan dalam penyediaan makan siang bergizi tersebut baik



ing demi percepatan pembangunan desa. Apalagi desa menjadi faktor penting menentukan kemajuan bangsa ke depan karena wilayah Indonesia didominasi oleh pedesaan beserta kompleksitas yang ada.

Di sisi lain, Yandri meminta desa jangan hanya menjadi penonton dan penerima manfaat program makan siang bergizi. Desa mesti menjadi tempat lumbung pangan ketahanan pangan, ketahanan energi swasem-

sebagai produsen komoditas pokok, industri pengolahan hingga hilirisasi.

“Semua bisa bergerak untuk menyuplai bahan baku makan siang bergizi, program itu besar sekali putaran ekonominya, baru dimulai dengan anggaran Rp71 triliun, nanti akan sampai ke angka hampir atau lebih dari Rp300 triliun. Artinya itu uang tiap hari untuk masak di dapur, tentu kita tidak mau desa jadi penonton,” ujarnya. •

PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS JALAN MENUJU INDONESIA SEHAT

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan program pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara gratis mulai 2025 yang akan menyasar 52 juta penduduk Indonesia.

Pemeriksaan kesehatan awalnya akan diutamakan adalah masyarakat di atas usia 50 tahun dan yang memiliki potensi mengidap tuberkulosis atau TBC. Estimasi anggaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis sekitar Rp5 triliun. Dalam lima tahun, program pemeriksaan kesehatan gratis ini ditargetkan untuk 200 juta orang.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis bertujuan untuk mendeteksi lebih awal penurunan kondisi kesehatan masyarakat, sehingga mereka segera mendapat penanganan dan tidak memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit.

"Pemeriksaan kesehatan gratis harus kita lakukan agar memastikan kita bisa mendeteksi secara lebih dini kalau ada kondisi kesehatan yang menurun dari masyarakat kita.

Kondisi kesehatan yang menurun ini harus bisa ditangani cepat, sehingga bisa menghindari masyarakat harus dirawat di rumah sakit," kata Budi dalam upacara Hari Kesehatan Nasional di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa, 11 November 2024.

Menurutnya, inisiasi yang merupakan satu dari tiga program percepatan (quick win) Presiden Prabowo Subianto bidang kesehatan ini menjadi prioritas yang harus diterapkan kepada seluruh masyarakat dari semua kelompok usia.

Masyarakat akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang berbeda-beda sesuai kelompok usianya. Kelompok usia dewasa akan diperiksa kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Lalu, untuk kelompok lansia juga akan dideteksi risiko kanker. Sementara bayi mendapat pemeriksaan hipotiroid dan G6PD.

Budi mengungkapkan, Kementerian Kesehatan mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp13 triliun dimana Rp1,7 triliun dari anggaran tambahan tersebut akan dialokasikan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis. Pelaksanaan program ini nantinya akan dilakukan secara bertahap.

"Kita dapat tambahan Rp13 triliun ya dari anggaran kita kan Rp90-an triliun. Kita dapat tambahan Rp13 triliun, Rp8 triliun buat TBC, sekitar Rp3 triliun buat rumah sakit, sekitar Rp1,7 buat skrining," ujarnya.

Dia menambahkan, Kemenkes juga tengah melengkapi alat kesehatan di puskesmas yang menjadi tempat dilakukannya pemeriksaan kesehatan gratis.

"Sekarang kita sedang siapkan termasuk (bantuan pengadaan alkes) dari Bank Dunia itu kita melengkapi 10 ribu puskesmas dengan alat-alat lab darah," ucap Budi.



Langkah Maju

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat merupakan langkah maju pemerintah yang patut diapresiasi. Inisiatif ini tidak hanya memberikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti deteksi dini penyakit, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, dan mengurangi beban pembiayaan penyelenggaraan pengobatan atau kuratif," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Mohammad Adib Khumaidi.

Selain itu, secara luas, program pemeriksaan kesehatan gratis juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan.

"IDI memandang program ini merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Indonesia yang sehat. Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat, program pemeriksaan kesehatan gratis dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Sebagai organisasi profesi dokter, IDI menyatakan senantiasa siap menjadi mitra strategis pemerintah dan berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan program ini untuk mewujudkan Indonesia yang sehat.

"Mari bersama-sama kita dukung dan kawal program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Adib.

Namun, IDI juga tetap mengingatkan adanya potensi permasalahan. Studi kasus di negara Jepang yang juga menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan bagi penduduknya, teridentifikasi sejumlah masalah. Salah satunya termasuk kurangnya standar yang seragam untuk informasi hasil pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, Jepang juga menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya platform terpadu untuk me-

nyimpan dan berbagi informasi, pengelolaan data informasi mengenai bayi dan siswa secara terpisah atau tidak terpadu, serta manajemen informasi dan pendidikan kesehatan dari bayi hingga pekerja dan lansia belum dilakukan.

Oleh sebab itu, untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia, PB IDI merekomendasikan sebelas hal yang

masyarakat.

Kemudian, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, melakukan kampanye sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika



perlu dilakukan pemerintah.

Rekomendasi IDI itu antara lain menjamin ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan peralatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan, melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis untuk meningkatkan keahlian dalam deteksi dini penyakit, memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan, memperluas cakupan program ke daerah-daerah terpencil dan masyarakat marginal, menambahkan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan

diperlukan, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Selanjutnya, memaksimalkan fungsi dan manfaat aplikasi SATU Sehat dari Kementerian Kesehatan sebagai platform yang mengelola data pemeriksaan kesehatan seumur hidup terpadu untuk memantau pemeliharaan dan sarana promosi kesehatan, serta sosialisasi pada masyarakat untuk memanfaatkan Personal Health Record (rekam medis individu) yang berisi informasi kesehatan. •

SETOP BANSOS SEBELUM MASA COBLOS

Kementerian Dalam Negeri setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai dihelat. Surat Edaran resmi terkait hal itu mulai diterbitkan dan diedarkan pada 13 November 2024.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyambut baik usulan Komisi II DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dan sejumlah pejabat kepala daerah pada Senin, 11 November 2024.

"Pak Bima Arya sampaikan bahwa teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju. Langsung setuju sekali," kata Tito dalam RDP Komisi II DPR bersama pejabat kepala daerah se-Jawa Timur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024.

Meski begitu, Tito meminta agar sejumlah wilayah tetap mendapat penyaluran bansos selama kurun waktu

jelang Pilkada 2024 hingga selesai dihelat, di antaranya di wilayah terjadinya bencana alam erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah tersebut terdapat sekitar lebih dari 12 ribu orang yang mengungsi yang memerlukan bansos.

Sebelumnya, Bima Arya Sugiarto menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai digelar. Menurutnya, usulan tersebut sangat baik agar pemberian bansos tidak disalahgunakan.

Bima mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menghentikan terlebih dahulu penyaluran bansos dalam kurun waktu tersebut agar tidak mendelegitimasi hasil Pilkada 2024.

"Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri," ujarnya.

Dia me-



nambahkan penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu juga dilakukan terhadap semua jenis bansos.

"Semuanya, kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal hal yang kemudian menjadi pertanyaan kami akan koordinasikan lagi, tapi substansi-nya adalah seperti itu, pengecualian hanya pada daerah bencana," ujarnya.

Dia menegaskan setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November, maka penyaluran bansos baru akan diperbolehkan lagi.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan akan mengikuti apabila Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan penundaan sementara jadwal distribusi bansos menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

Mensos semula menyatakan pihaknya mengupayakan akan tetap melanjutkan proses penyaluran bansos yang sudah memasuki triwulan keempat 2024 dan berlangsung sejak Oktober hingga Desember.

Hal itu sempat disampaikan Gus Ipul meskipun telah menerima masukan dari Komisi VIII DPR untuk mempertimbangkan ulang jadwal pencairan bansos demi mencegah potensi penyalahgunaan sebagai alat politik oleh oknum tertentu menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

Kendati demikian, Gus Ipul menyatakan akan mengikuti apabila Mendagri mengeluarkan arahan mengenai penundaan penyaluran bansos jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

Ia menambahkan, pihaknya akan menunggu konfirmasi sekaligus penerbitan surat edaran dari Kemendagri tersebut yang nantinya akan berlaku di tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Gus Ipul juga menegaskan Kemensos menyambut baik wacana penundaan penyaluran bansos yang bertujuan untuk menghindari perdebatan serta kontroversi mengenai isu politisasi bansos.

"Bisa jadi ini untuk menghindari kontroversi. (Supaya) semua tenang, sete-

lah itu kita pilkada. Ini kami sambut baik saja lah sekarang gitu ya," imbuhnya.

Sedangkan, terkait daerah yang mengalami bencana, pihaknya meyakini Kemendagri pasti telah mempertimbangkan kebijakan khusus terkait mekanisme penyaluran bansos di wilayah yang mengalami bencana dan membutuhkan penyaluran bansos tepat waktu.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu

dampaknya terhadap upaya meredam politisasi bansos dan risiko pelaksanaan kebijakan ini di lapangan," kata Annisa.

Dia mengungkapkan dalam banyak kasus, bansos bisa dijadikan alat kampanye oleh petahana atau kandidat tertentu untuk meraih dukungan masyarakat. Dengan memberhentikan bansos, dia berharap tidak ada potensi penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan politik



dan Demokrasi (Perludem),

Annisa Alfath,

mengatakan, pem-

berhentian bansos men-

jelang pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 merupakan upaya pemerintah meredam politisasi dan risiko di lapangan.

"Terkait usulan DPR dan persetujuan Kemendagri mengenai pemberhentian bansos selama masa pilkada, terdapat beberapa poin yang perlu dianalisa secara kritis, terutama terkait dengan

yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik lokal.

Menurutnya, langkah tersebut memang memiliki potensi untuk mengurangi politisasi bansos. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan di lapangan.

"Jika kebijakan penghentian bansos tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat, tetap ada peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk membagikan bantuan secara ilegal atau tidak resmi, dengan dalih bantuan pribadi atau inisiatif sosial," katanya. •



KOMITMEN MENJAGA NETRALITAS PILKADA 2024

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sepakat untuk menjaga netralitas mereka di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Selain itu mereka juga berkomitmen untuk menjaga Kabupaten Muba menjadi tempat yang aman, damai dan zero conflict.

ASN dan Kepala Desa dengan tegas menyatakan komitmen mereka untuk bersikap netral dan bersatu dalam mendukung Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi. Mereka bertekad mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis serta tidak Golput pada November 2024.

Komitmen ini ditandai dengan pembacaan Ikrar Netralitas ASN dan Kepala Desa, serta penandatanganan Pakta Integritas terkait netralitas ASN dan Perangkat Desa.

"Saya berharap, sebanyak 6.229 ASN di Kabupaten Muba ini dapat menjaga netralitas. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada tidak hanya bergantung pada integritas dan profesionalisme penyelenggara dan peserta, tetapi juga harus didukung oleh netralitas para ASN demi terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Muba," ungkap Pj Bupati Muba, H Sandi

Fahlepi.

Sandi Fahlepi juga menekankan pentingnya penggunaan media sosial yang bijak. Jangan sampai menjadi alat pemecah belah hanya karena beda dukungan di medsos.

"Jangan menyebarkan atau memposting informasi hoaks. Sebagai pegawai ASN, kita harus mengedepankan netralitas dan menjadi contoh baik bagi masyarakat dengan menjaga kondusifitas," tambahnya.

Kepala Badan Kesbangpol Muba, Joni Martohonan AP MM, juga menegaskan pentingnya menjaga marwah ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk menjaga marwah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok ter-

tentu. Netralitas ASN adalah objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu tetapi juga oleh Komisi ASN dan masyarakat umum,” tegasnya.

Acara penandatanganan deklarasi netralitas ASN dan Aparatur Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 ini dihadiri oleh Forkopimda Muba, termasuk paparan dari Kapolres Muba melalui Wakapolres Muba, Kompol Iwan Wahyudi SH, dan paparan langsung Kajari Muba, Roy Riadi SH MH.

Serukan Ajakan Netralitas

Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, Aparatur Sipil



ASN terutama Sekda harus menjadi netral dan profesional dalam menjalankan tugas Pemerintahan, terlebih jelang Pilkada serentak 2024 nanti.

Negara (ASN) diminta untuk menjaga netralitas dan andil menjaga kondusifitas di lingkungan kerja masing-masing.

Hal ini juga ditegaskan Ketua Komisarariat Wilayah (Komwil) Forum Sekretaris Daerah Indonesia (FORSESDASI) Sumsel, Drs Apriyadi yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Muba.

“ASN terutama Sekda harus menjadi netral dan profesional dalam menjalankan tugas Pemerintahan, terlebih jelang Pilkada serentak 2024 nanti,” tegas Apriyadi.

“Mudah-mudahan Sekda di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel tetap netral dan turut menyukseskan Pilkada di Sumsel dengan aman dan tertib,” tuturnya.

Sementara itu, Pengawas Komwil Forsesdasi Sumsel yang juga Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, Drs Edward Candra menegaskan, Sekda merupakan barometer ASN di masing-masing daerah untuk menjaga netralitas Pilkada.

“Jadi kalau Sekda tidak netral tentu dapat memicu ketidaknetralan ASN lainnya,” pungkasnya. •





BUKAN SEKADAR PEKERJA MIGRAN

Peran pekerja migran sudah bukan perdebatan. Dari sisi ekonomi saja, devisa yang dihasilkan oleh perantau yang meninggalkan Tanah Air itu memang signifikan.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengemukakan, jumlah devisa yang dihasilkan pada 2022 tercatat Rp135,9 triliun. Setahun berikutnya, per 2024, melonjak hingga Rp227 triliun. "Kita harus mengetahui bahwa ada yang mengatakan Rp223,3 triliun, ada yang mengatakan Rp257 triliun itu adalah devisa terbesar kedua setelah migas. Jadi luar biasa," ungkap Karding saat per-

menunjuk Karding sebagai menterinya didampingi dua wakilnya: Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla

Nah, sebagai Menteri Karding menginginkan kementeriannya dapat menguatkan kompetensi Pekerja Migran Indonesia melalui program vokasi. Oleh sebab itu, ia ingin memasukkan sebuah unit di bawah Direktorat Jenderal yang berfokus pada vokasi.

Lebih dari itu, ia memberikan arahan agar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI dapat memperkuat kerja sama di luar negeri. "Di penempatan saya berharap kerjasama G to G (Government to Government), kita utamakan kita perkuat Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) kita di sana. Atnaker jangan cuma melayani pejabat yang ke sana. Atnaker punya fungsi strategis. Dia harus mampu promosi dan membangun kerja sama di luar negeri. Yang kedua, dia harus mampu berdiplomasi. Ketiga dia harus mampu memahami hukum internasional dan jaringan di luar

2019. Satu hal yang bisa saya sampaikan, beliau orang baik," ungkapnya.

Dalam pengalamannya sebagai Anggota DPR RI yang telah berkunjung ke 41 negara, Christina juga memandang kementerian ini harus terus memperkuat perlindungan, terutama terkait peningkatan kompetensi kepada pekerja migran.

Sedangkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyebut amanah yang ia emban merupakan panggilan untuk mengabdikan kepada bangsa. "Panggilan kenegaraan ini kami maknai dengan panggilan untuk melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa. Mohon kerjasamanya semoga harapan luar biasa dari Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran dapat kita tunaikan secara baik ke depannya nanti" ujarnya.

Dalam masa transisi dari Badan, Kementerian P2MI masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Meski begitu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga tetap berjalan.

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik (APIK) BP2MI, Agustinus Gatot Hermawan memimpin Konsinyering Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Grand Melia Hotel, Jakarta, 23-25 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Deputi Gatot Hermawan mengatakan, dari transformasi banyak fungsi yang harus ditambahkan pada lembaga ini. "Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI ini akan sangat fokus terhadap Pekerja Migran Indonesia dr A-Z, rencananya akan ada empat fungsi utama dalam Kementerian ini, yakni Fungsi Penempatan, Fungsi Pelindungan, Fungsi Pemberdayaan, dan Fungsi Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri yang akan diusulkan dalam rancangan SOTK," ucap Gatot.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Hu-



tama kali

bertatap muka dengan seluruh pejabat dan pegawai kementeriannya di Aula Abdurrahman Wahid, Selasa, 22 Oktober 2024.

Boleh jadi karena sumbangan besar itulah, maka Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berubah menjadi Kementerian. Presiden Prabowo lantas

sana harus mereka kuasai," ujarnya.

Menyambung sambutan Karding, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani, menuturkan kegembiaraannya dapat bekerja membantu Menteri Karding. "Kami senang sekali diamatkan dapat membantu Pak Menteri. Kami sudah kenal cukup lama sejak

mas). Kepala Biro Hukum dan Humas, Hadi Wahyuningrum, turut menyampaikan, "Dalam konsinyering ini kita harus melakukan pembahasan secara intensif dari setiap fungsi yang akan dituangkan dalam SOTK."

Diskusi berlangsung intensif dengan fokus pada peningkatan dan penguatan fungsi pelayanan publik, serta optimalisasi sumber daya manusia. "Mari kita bekerja sama dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tegas Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Eropa dan Timur Tengah, I Ketut Suardana.

Hadir juga dalam rapat ini, Sekretaris Utama, Rinardi; Deputi Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Asia dan Afrika, Lasro Simbolon; Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Eropa dan Timur Tengah, I Ketut Suardana; serta jajaran Direktur BP2MI yang turut membahas rancangan SOTK yang baru.

Penyusunan SOTK baru memang relevan karena Kementerian P2MI akan selaras dengan dinamika global yang kian terbuka dengan pekerja lintas negara. Sebagai gambaran, dari Januari hingga Oktober 2024 tercatat penempatan PMI ke berbagai negara mencapai lebih dari 250 ribu orang.

Dari jumlah itu, hampir 178 ribu merupakan perempuan pekerja migran. Sedangkan dari daerah asalnya, yang terbanyak tercatat dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Untuk negara penempatan, yang terbanyak adalah Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Semuanya merupakan data resmi yang tercatat. Boleh jadi, masih ada yang tak tercatat dan belum tercakup dalam pelindungan. Yang tercatat resmi pun masih memerlukan pendalaman apakah pelindungannya sudah benar-benar optimal dan terukur.

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti sistem perekrutan pekerja migran yang terjadi di Indonesia selama ini. "Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah

satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini," ujarnya di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Toh Nurhadi mendukung peningkatan vokasi yang menjadi salah satu prioritas Menteri Karding. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja

migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil. Tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja," ujarnya.

Tentu segenap jajaran Kementerian P2MI maklum. Banyak yang berharap kinerja kementerian baru ini lebih baik dari badan serupa di masa sebelumnya. ●

Penempatan PMI 2024

Data KP2MI, periode 1 Januari-11 November 2024

Total
257.078

Jenis kelamin



Perempuan

177.225



Laki-laki

79.853

Sebaran



Asia dan Afrika

237.596



Eropa dan Timur Tengah

18.185



Amerika dan Pasifik

1.297

Tujuan terbanyak



Hong Kong

88.146



Taiwan

74.837



Malaysia

41.366

Daerah asal terbanyak



Indramayu

19.144



Cilacap

11.588



Cirebon (kab)

10.398

Skema penempatan



Perusahaan swasta

205.452



Perseorangan

41.570



Kerja sama pemerintah

8.912



Perpanjangan kontrak kerja

1.144

Penempatan pekerja migran 2024

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 2024 mencapai lebih dari 250 ribu ke berbagai negara dengan sebaran paling banyak di Asia dan Afrika.



Program kementerian untuk PMI

Perluasan negara tujuan penempatan, seperti AS, Kanada dan Jerman, untuk meningkatkan pasar kerja PMI.

Memastikan PMI terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

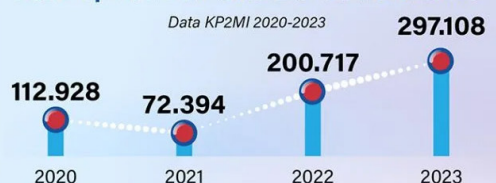
Pengawasan ketat terhadap perusahaan penempatan PMI.

Penyediaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pembiayaan calon PMI berangkat ke luar negeri.

Pembentukan tim reaksi cepat untuk menangani permasalahan PMI.

Penempatan PMI dalam 5 tahun terakhir

Data KP2MI 2020-2023



Kami terus berupaya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran secara fisik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mereka di berbagai aspek kehidupan."

Abdul Kadir Karding

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia





JAGA HUBUNGAN BAIK CHINA DAN AMERIKA SERIKAT

Prabowo Subianto melakukan lawatan penting ke China dan Amerika Serikat di awal masa jabatannya sebagai Presiden RI 2024-2029. Hasil kunjungan kenegaraan di dua negara raksasa dunia ini diyakini bisa menentukan ekonomi Indonesia ke depan.

Saat melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang istimewa. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok yang telah berjalan selama beberapa abad.

Prabowo menggarisbawahi bahwa Tiongkok tidak hanya dipandang sebagai kekuatan besar, tetapi juga sebagai peradaban besar yang telah lama terjalin dengan Indonesia.

Prabowo menyampaikan komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka kesejahteraan dan stabilitas di Asia. Dia meyakini bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok akan menciptakan suasana kondusif di ka-

wasan Asia.

Sebagai bagian dari hubungan yang semakin kuat, Prabowo juga menyebut Tiongkok sebagai mitra ekonomi strategis utama Indonesia dan salah satu investor terbesar di Tanah Air.

Prabowo pun membawa pulang investasi USD10,07 miliar atau sekitar Rp157 triliun (asumsi kurs Rp15.660) dari kunjungannya ke China yang mencakup 7 poin kerja sama yang disepakati kedua negara. Penandatanganan perjanjian digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing, China, disaksikan Prabowo dan Presiden Xi Jinping.

Kerja sama itu digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Tiongkok (KIKT). Kolaborasi itu melibatkan 20 perusahaan dari dua

negara di bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan.

Prabowo menegaskan Indonesia ingin bekerja sama dengan siapa pun dan selalu menghormati semua kekuatan besar dunia.

"Hanya perdamaian yang dapat membawa kemakmuran. Mari kita bekerja untuk saling pengertian, perdamaian, dan kemakmuran untuk rakyat kita masing-masing, dan rakyat di seluruh Asia dan dunia. Terima kasih. Panjang umur untuk persahabatan kita," ujarnya.

Usai dari China, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC, Selasa, 12 November 2024. Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam hubungan diplomatik antara kedua negara yang

mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali saat kami membutuhkan. Oleh karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat," ucap Prabowo.

Di sisi lain, Presiden Biden menekankan pentingnya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa kemitraan kedua negara saat ini lebih kuat dari sebelumnya.

"Saya bangga bahwa kemitraan antara negara kita adalah yang terkuat yang pernah ada, dan hari ini kita akan membahas bagaimana melanjutkan kemitraan ini," kata Biden.

Biden juga mengidentifikasi beberapa fokus kerja sama, termasuk memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, mendukung

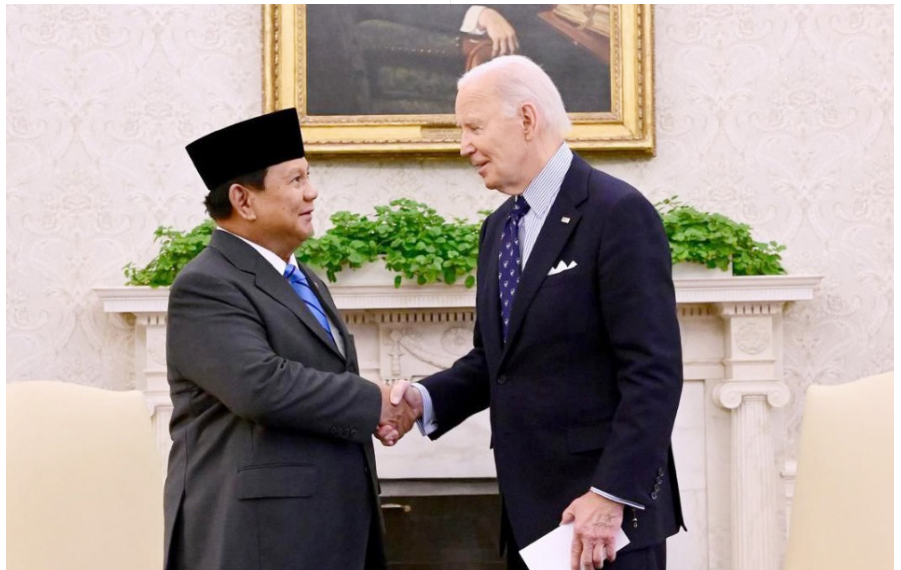
dengan The United States Indonesia Society (USINDO) di Washington DC.

USINDO adalah organisasi nonpemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang AS, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya.

Pertemuan ini digelar secara santai dengan dihadiri oleh 25 pihak baik dari AS maupun Indonesia. Dalam pertemuan itu, hadir pula beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport McMoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi dan Caterpillar.

Prabowo pun mendorong perusahaan-perusahaan besar di AS tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia.

Dukungan Makan Bergizi Gratis



Amerika Serikat bagi kami adalah teman yang sangat baik. Amerika Serikat mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali saat kami membutuhkan.

telah berjalan selama 75 tahun.

Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Biden atas undangannya untuk berkunjung dan melakukan pertemuan di Amerika Serikat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas hubungan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang telah berlangsung sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kepala Negara menekankan komitmen pemerintahannya untuk terus meningkatkan hubungan Indonesia-Amerika Serikat.

"Amerika Serikat bagi kami adalah teman yang sangat baik. Amerika Serikat

transisi energi bersih di mana Indonesia berperan penting, serta membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. Biden menegaskan pentingnya kemitraan strategis komprehensif yang mencakup pendalaman kerja sama keamanan antara kedua negara.

"Kami juga membahas tantangan global termasuk situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan," tutur Biden.

Di sisi lain, Prabowo menilai para pimpinan perusahaan AS percaya dengan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan

Dalam pertemuan dengan Xi Jinping dan Joe Biden, Prabowo mendapatkan dukungan dalam program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji kampanyenya di Pilpres 2024.

Xi Jinping mengaku akan ikut mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis yang termuat dalam Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia yang disepakati 10 November 2024.

Sementara, pernyataan Biden yang mendukung program Makan Bergizi Gratis dimuat dalam Joint Statement atau pernyataan bersama usai pertemuan yang diunggah di situs resmi Gedung Putih, 12 November 2024. ●



NFO PILKADA

PILGUB SUMSEL RASA PILPRES

Euforia Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan
terus dirasakan publik layaknya pertarungan di
Pilpres 2024 lalu.



Lantaran pertarungan terjadi antara tiga tokoh beken dan tenar di Sumsel yakni Herman Deru vs Eddy Santana Putra vs Mawardi Yahya.

Ketiganya pun memiliki latar dukungan dari mantan presiden dan presiden saat ini, yang turut memanaskan tensi kompetisi di Pilgub Sumsel 2024.

Herman Deru didukung oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Eddy Santana Putra didukung oleh Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri sedangkan Mawardi Yahya didukung Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

Diketahui, Herman Deru mendapatkan dukungan dari Jokowi setelah datang langsung ke kediamannya di Solo. Bahkan putra bungsunya Kaesang Pangarep membalas kunjungan ke Palembang untuk memberikan dukungan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Disisi lain, Eddy Santana Putra adalah satu-satunya Cagub Sumsel mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Eddy Santana Putra juga tak segan-segan pindah kapal dari Gerindra ke Moncong Putih yang membuatnya mendapatkan rekomendasi langsung dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sementara, Mawardi Yahya diusung Gerindra sebagai Cagub Sumsel karena prestasinya sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Alhasil dari semua kader di Gerindra Mawardi Yahya kader yang mendapatkan dukungan Prabowo Subianto.

Hal-hal itu membuat kompetisi Pilgub Sumsel 2024 semakin panas dan seru layaknya pertarungan Pilpres 2024. Wajar saja animo dan antusias publik Sumsel dari berbagai kalangan dan umur menyoroti perkembangan Pilgub Sumsel semakin meningkat.

Dalam Pilgub Sumsel nomor urut 1 Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), nomor urut 2 Eddy Santana Riezky Aprilia (ERA) dan nomor urut 3 Mawardi Yahya- RA Anita Noeringhati (MATAHATI).

Menurut Pengamat Politik Sumsel Ade Indra Chaniago, pertarungan Pilgub Sumsel 2024 seru. Hal itu karena bukan hanya semata-mata pertarungan partai dan elektabilitas saja. Pertarungan terjadi antara figur kontestan dan figur dibelakangnya.

"Pilgub Sumsel bukan dilihat dari elektabilitas siapa yang paling tinggi atau partai saja. Disini pertarungan antar figur atau ketokohan mereka. Dari Herman Deru, Eddy Santana Putra dan Mawardi Yahya figur ketokohan siapa yang lebih dipercaya nantinya,"kata dia

Nah itulah membuat pertarungan Pilgub Sumsel 2024 tidak kalah seru dari Pilpres 2024. Unikny disini Herman Deru mantan Gubernur Sumsel juga melawan Mawardi Yahya yang merupakan mantan Wakil Gubernur Sumsel. Keduanya awalnya digadang-gadang akan menjadi rival terpanas dan saling menyerang.

Namun tidak disangka nama Eddy Santana Putra tokoh Sumsel dengan pesona kuat tiba-tiba muncul, bahkan tidak segan-segan melakukan serangan untuk keduanya. Eddy Santana Putra berstatus bukan petahana tan-



Dilanjutkannya hadirnya pasangan dari ketiga calon seperti nama-nama Cik Ujang, Riezky Aprilia dan RA Anita Noeringhati tidak cukup membantu. Masyarakat Sumsel tetap menyoroti figur utamanya.

"Kalau wakil-wakilnya tidak terlalu berpengaruh, tetap di Pilgub Sumsel yang dilihat masyarakat figur calon gubernurnya. Makanya kenapa seru konsentrasi pemilih tinggi kepada calon gubernurnya soalnya tadi ketokohan mereka menjadi magnet,"ucapnya lagi.

pa sungkan menkritik keras pemerintahan di era Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai kepala daerah di Sumsel periode 2018-2023.

Sementara itu KPU Sumsel telah menjalankan Debat Pilgub Sumsel 2024 mulai dari Debat Pertama duel antara Cagub dan Debat Kedua duel antara Cawagub. Kedua debat sudah berlangsung dan berjalan sangat panas dan super seru.

Debat Publik Pertama Pilgub Sumsel 2024 berjalan super ketat antara Herman Deru, Eddy Santana Putra

• INFO PILKADA

dan Mawardi Yahya di Ballroom Novotel Palembang Senin 28 Oktober 2024 malam.

Ade Indra menambahkan hasil debat dua kontestan Mawardi Yahya dan Eddy Santana Putra dinilaiimbang, sedangkan Herman Deru menjadi tumbal kedua kontestan tersebut.

"Kalau kata saya hasil debat pemenangnya Mawardi dan Eddy keduanya bisa disebutimbang. Sedangkan Herman Deru sesuai prediksi menjadi musuh bersama dan hanya jadi tumbal saja," ungkapnya.

Kemenangan Mawardi Yahya dis-

intihan sebelumnya,"ungkapnya.

Dia menilai Herman Deru melakukan dua kali blunder besar di debat. Yakni pembangunan tanpa menggunakan dana di luar pemerintahan di kawasan Jakabaring dan pelabuhan Tanjung Carat.

Dalam sesi tanya jawab Eddy Santana Putra bertanya apakah ada pembangunan dibuat oleh swasta di Sumsel tanpa APBD.

Herman Deru menyatakan di era kepemimpinannya ada pembangunan atas kerja sama pemerintahan dan swasta dibuat tanpa APBD.

artinya selama ini kita selalu satu, bersatu dalam gerak, bersatu dalam pikiran juga bersatu untuk memajukan provinsi yang sangat kita cintai ini," ucapnya.

Herman Deru mengajak semua masyarakat Sumsel pada tanggal 27 November 2024 pada Pilkada Serentak memilih dirinya bersama Cik Ujang.

Sedangkan, Eddy Santana Putra mengajak semua masyarakat Sumsel meninggalkan zaman lama. Dia mengajak masyarakat Sumsel memilih pemimpin baru untuk menghapus-

**H. HERMAN DERU
DAN H. CIK UJANG**

DITERIMA HARI SELASA (27/8/2024)
PUKUL 11.14 WIB

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

**H. EDDY SANTANA PUTRA
DAN RIEZKY APRILIA**

DITERIMA HARI RABU, (28/8/2024)
PUKUL 15.54 WIB

PARTAI POLITIK PENGUSUL

**H. MAWARDI YAHYA
DAN HJ. RA. ANITA NOERINGHATI**

DITERIMA HARI KAMIS, (29/8/2024)
PUKUL 15.06 WIB

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

The infographic displays the logos of the political parties supporting each candidate pair. For Herman Deru and Cik Ujang, the parties are Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Perindo, PKS, and PKS. For Eddy Santana Putra and Riezky Aprilia, the parties are PKS Perjuangan. For Mawardi Yahya and Hj. Ra. Anita Noeringhati, the parties are Gerindra, Partai Golkar, PAN, Hanura, PKB, Partai Ustaz, Gelora Indonesia, and PKS.

ebutnya bisa membalikkan serangan Eddy Santana Putra menjadi kesalahan Herman Deru. Lalu kemenangan Eddy Santana Putra tanpa beban bisa menyerang Herman Deru dan Mawardi Yahya.

"Mawardi Yahya saat ditanya Eddy soal apa yang sudah dibangun menggunakan dana di luar pemerintah, dia menjawab belum ada. Namun dia menjawab di era Pak Alex sudah ada itu membalikkan serangan Eddy ke Herman Deru. Apapun diserang Eddy bisa di balikannya ke Herman Deru. Sedangkan kemenangan Eddy Santana dia terlihat bersinar di debat karena tanpa cela bisa mengkritik pemer-

"Pak Mawardi tadi bilang tidak ada perusahaan swasta yang ikut andil di pembangunan Sumsel! Pak Mawardi lupa ya, ada 11 bangunan stadion olahraga di Sumsel," ucap Herman Deru.

Herman Deru berharap semua masyarakat Sumsel bersatu untuk mengajak kembali mewujudkan zero konflik dan memajukan Sumsel bersama Herman Deru dan Cik Ujang di masa depan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sumatera Selatan, para tokoh para ulama dan semua warga. Dimana saat ini Sumatera Selatan terkenal dengan zero konfliknya

kan penderitaan dan kemiskinan.

"Sumsel adalah rumah kita semua! Mari kita meninggalkan era lama menuju era baru menuju Sumsel Cerah. Kami berkomitmen untuk membawa perubahan nyata, niat kami tulus, niat kami baik untuk memajukan Sumsel. Kami percaya dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh rakyat Sumsel kita dapat mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih baik lebih sejahtera dan berdaya saing," kata dia.

Eddy Santana menyebutkan Sumsel daerah kaya, anehnya kenapa masyarakatnya bisa miskin. Dia mengajak semua masyarakat Sumsel

memilihnya untuk masa depan yang lebih cerah.

Sementara, Mawardi Yahya kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menerapkan kembali program-program unggulan yang pernah diusung oleh mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Ia berjanji untuk menghidupkan kembali Sekolah Gratis dan Berobat Gratis, yang merupakan dua produk andalan dari mantan Gubernur tersebut.

Disisi lain, Cawagub Sumsel Riezky Aprilia dan RA Anita Noeringhati dinilai sama kuat aliasimbang saat debat publik kedua.

Dijelaskan Ade Indra, hasil debat dimenangkan dua Cawagub perempuan dengan hasilimbang. Sedangkan Cik Ujang satu-satunya Cawagub pria banyak blunder.

"Riezky dan Anita keduanyaimbang, mereka sangat layak menjadi Cawagub Sumsel. Dari segi penguasaan panggung dan penyampaian materi sama-sama baik dan kapasitas akademik juga keduanya sama. Kalau Cik Ujang banyak blunder dan dinilai dari kapasitas kemampuan di debat tadi terlihat jelas sangat jauh dari Riezky dan Anita," kata dia.

Ade Indra menilai Riezky Aprilia memiliki keunggulan sedikit dari Anita Noeringhati saat debat yakni soal keberanian. Kendati dia tetap menilai keduanya masih mendapatkan hasil yangimbang di Debat Kedua Pilgub Sumsel 2024.

"Riezky Aprilia mengutarakan siap mundur apabila selama 2 tahun tidak bisa menghentikan praktek pungli di Sumsel. Itu sedikit nilai plus Riezky saat debat dibandingkan Anita," tuturnya.

Dilanjutkannya Cik Ujang dinilai melakukan blunder sebanyak tiga kali saat debat. Yakni, jawaban tidak nyambung, membuang waktu dan suara terlalu kecil.

Debat Publik Kedua Pilgub Sumsel 2024 memiliki empat sesi yakni pertama sesi penyampaian visi misi, kedua sesi membacakan pernyataan dari panelis (dari kertas yang tersegel), ketiga sesi tanya jawab (para paslon) dan keempat sesi terakhir closing

statement.

Pada sesi ketiga tanya jawab para paslon, Anita Noeringhati memberikan pertanyaan kepada Cawagub Cik Ujang.

Anita Noeringhati berkata saat menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel dia sering mendapatkan keluhan dari masyarakat Lahat di bawah kepemimpinan Cik Ujang sebagai Bupati Lahat. Hal itu berhubungan dengan apa yang akan ditanyakannya.

"Masyarakat mengeluhkan kepada saya soal pencemaran sumber air. Masyarakat mengeluhkan air mereka menjadi hitam mengganggu paso-

Diungkap Ade Indra dari hasil kedua debat itu dijumlahkan sama-sama mendapatkan skor 2-2 aliasimbang didapatkan oleh pasangan Eddy Santana Putra-Riezky Apilia dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati. Sedangkan pasangan Herman Deru-Cik Ujang mendapatkan skor 0.

Sementara dalam debat Ketiga menjadi kesempatan terakhir Herman Deru-Cik Ujang untuk melakukan counter attack atau serangan balik. Apabila menang dengan empat lawan sekaligus otomatis mendapatkan skor tinggi bernilai 4, sehingga membalikan kedudukan.



kan air bersih dan berdampak kepada kesehatan. Nah yang saya tanyakan kalau Anda menjadi pemimpin Sumsel bagaimana penyelesaian ini! Terlebih masalah ini pastinya tidak hanya terjadi di Lahat saja, semua wilayah di Sumsel bisa saja terdampak soal pencemaran tersebut," tanya Anita Noeringhati.

Namun saat menjawab Cik Ujang sempat membuang waktu beberapa detik sembari memegang mic merasa ada gangguan dari sumber suaranya tersebut.

"Namun saat saya jadi Bupati untuk menghentikan debu di Kabupaten Lahat itu, saya minta DLH untuk membuat mobil penyedot debu. Mobil itu menyedot debu dari kota Lahat sampai Muara Enim, dari Muara Enim ke kota Lahat setiap malam," jawabnya.

Skor akan didapatkan Herman Deru-Cik Ujang menjadi 4-2-2 dari kedua lawannya pasangan Eddy Santana-Riezky Aprilia dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati di skor akhir Debat Pilgub 2024.

Namun saat dibincangi Herman Deru mengatakan, untuk Debat Ketiga nantinya dia tidak melakukan persiapan khusus.

Dia menilai Debat Ketiga pastinya kedua lawannya akan banyak bertanya kepadanya. Dia hanya akan menjawab kedua lawannya itu dengan cara yang sangat santuy saja.

"Biasanya kita itu sebagai incumbent pasti akan melayani kandidat lain yang ingin tahu dan bertanya. Tetapi intinya debat nanti kita menjelaskan kepada publik bukan hanya kepada kandidat saja," tuturnya. •

DINAS

Gunawan Effendi

Pada masyarakat industri, akhir tahun adalah masa liburan. Jadi, sudah tepat jika pada pertengahan November 2024 muncul kebijakan pengurangan perjalanan dinas bagi kementerian dan lembaga beserta jajarannya. Masa liburan koq dinas?

Dari sisi etimologi, asal-usul kata, dinas berasal dari dienst –kosa kata bahasa Belanda yang berarti mempekerjakan. Sedangkan liburan padanannya dalam bahasa Belanda adalah vakantie, ya pakansi. Toh pakansi juga dapat dipadankan dengan lowong atau lowongan kerja. Tetap jelas bahwa dinas dan lowong masih relevan.

Nah, soal penghematan biaya perjalanan dinas memang sudah mengemuka dalam Rapat Kabinet di Kantor Presiden. “Saya minta Menkeu, semua Menko dan semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA,” ungkap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang berlangsung pada Kamis, 24 Oktober 2024.

DIPA adalah singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dokumen dinas ini berisi rincian pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah.

Nah, menyangkut perbendaharaan, maka urusannya adalah Menteri Keuangan yang biasa disebut pula sebagai Bendahara Negara. Begitulah maka Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai Bendahara Negara menerbitkan surat edaran yang meminta menteri hingga pimpinan lembaga untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas.

Surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Isinya, meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024.

Dalam surat edaran itu Bu Bendahara Negara menyampaikan, pertama, meminta para menteri atau pimpinan lembaga untuk meninjau kembali kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2024 yang masih bisa dihemat.

“Ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas dalam mencapai target program di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L),” ungkai kutipan dari surat tersebut yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua, penghematan minimal 50 persen harus diterapkan pada sisa pagu anggaran perjalanan dinas dalam DIPA 2024, berlaku sejak surat ini diterbitkan. Ketiga, jika ada kebutuhan perjalanan dinas mendesak setelah penghematan, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan izin penggunaan sisa anggaran kepada menteri keuangan.

Keempat, penghematan anggaran perjalanan dinas 50 persen dikecualikan untuk dua jenis perjalanan, yakni perjalanan bagi unit yang tugas utamanya memang memerlukan perjalanan dinas dan perjalanan dinas tetap, seperti penyuluh pertanian, penyuluh agama, serta perjalanan di kedu-

taan atau atase. Kelima, K/L diminta mengendalikan belanja perjalanan dinas secara mandiri dan mencatatnya pada halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. K/L juga harus mengoordinasikan pelaksanaan penghematan ini dengan instansi atau satuan kerja di lingkungan masing-masing.

Keenam, revisi pencatatan di halaman IV.A DIPA harus dilakukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Ketujuh, agar pembatasan dilakukan se-

cara mandiri, kementerian/lembaga/satuan kerja dilarang mengajukan permintaan pembayaran perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencatatan di halaman IV.A DIPA.

Nah, pada November dan Desember 2024, agaknya pengurangan perjalanan dinas untuk menghemat anggaran memang layak diterapkan. Di masa lalu, saat Menkeu dijabat almarhum Mar’ie Muhammad, upaya penghematan anggaran sempat menjadi plesetan namanya menjadi Mari Menghemat. Alasannya, saat itu pertumbuhan ekonomi malah sedang menanjak

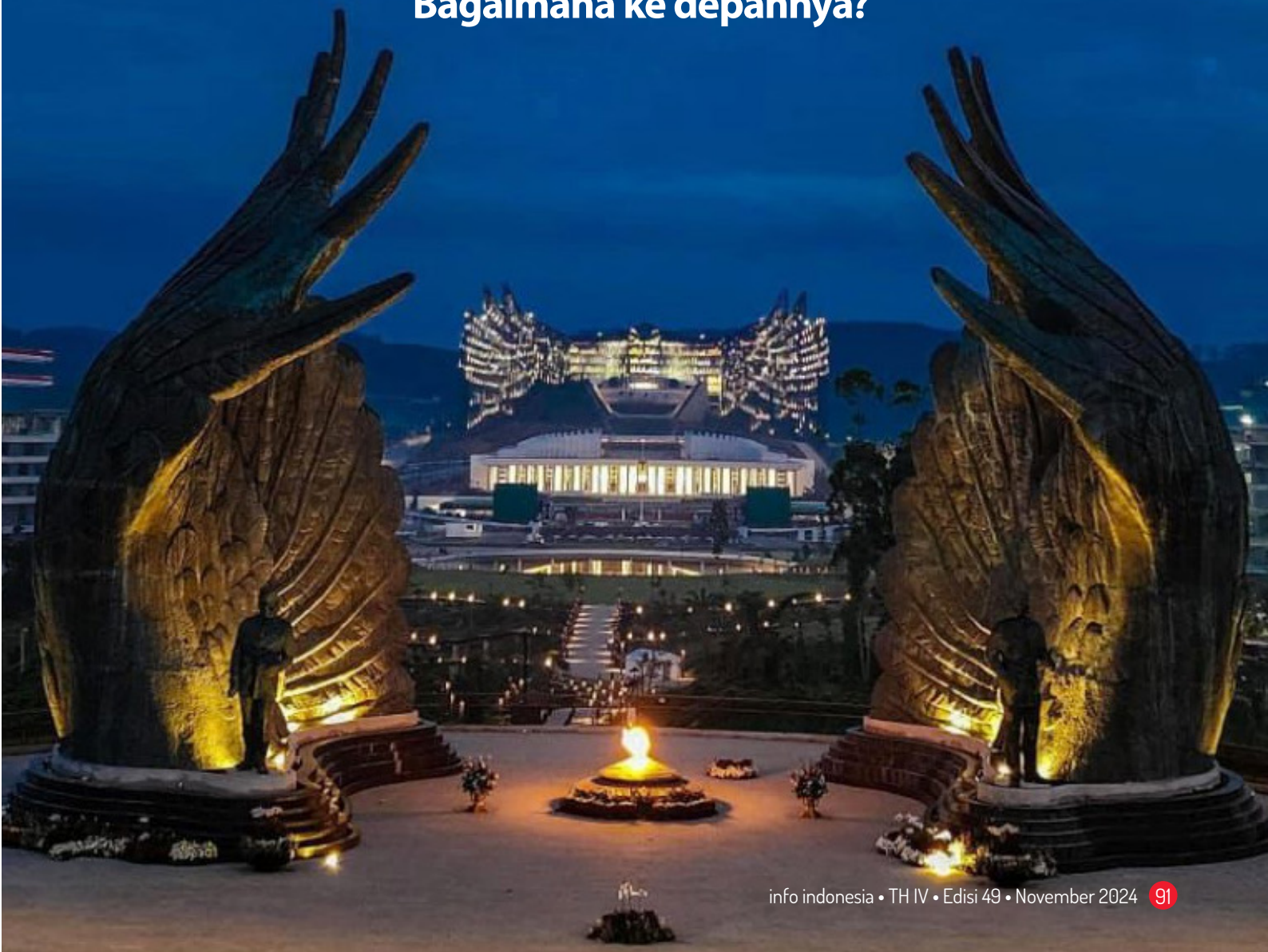
Ke depan, perjalanan dinas tetap perlu dengan catatan. Catatannya, harus ada ukuran baku mengenai manfaat perjalanan dinas untuk pejabat dan rakyatnya sekaligus. Harap maklum, dienst dengan padanan dinas dalam bahasa ternyata berasal dari kata dienen yang berarti melayani. Perjalanan dinas hendaknya berfungsi melayani rakyat. ●





AWAS TARGET PEMBANGUNAN MELESET

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Poinnya antara lain pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target. Bagaimana ke depannya?



Dalam penjelasan resminya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebutkan 19 Indikator RPJMN 2020-2024 (11 di antaranya diperkirakan tidak tercapai) telah disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI. Meski begitu,

dipengaruhi antara lain oleh faktor pandemi dan pengaruh global.

Kementerian PPN/Bappenas mengemukakan, penyampaian kinerja itu berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Nah, memasuki tahun akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, ke-

antarnegara; (3) kebijakan proteksionisme atau perubahan dalam aturan perdagangan internasional; serta (4) dampak perubahan iklim. Berbagai tantangan tersebut berpengaruh terhadap akselerasi pencapaian target pembangunan.

Toh berdasarkan seluruh data capaian hingga tahun 2023, secara umum



19 indikator tadi hanya menggambarkan sebagian kecil dari 505 indikator pembangunan RPJMN 2020-2024.

Perkiraan ketidaktercapaian untuk 11 indikator tersebut, bukanlah suatu kegagalan atau tidak berarti nilai buruk, karena proses pembangunan adalah suatu upaya perbaikan yang kontinu, berkesinambungan dan berkelanjutan. Capaian indikator juga sangat bergantung dari target, asumsi, dan situasi kondisi saat proses pencapaian target. Hal ini sebagaimana telah disampaikan

luarlah hasil Evaluasi Kinerja RPJMN 2020-2024 yang memuat hasil pengukuran kinerja 505 indikator pembangunan.

Dalam evaluasi itu, perkembangan pencapaian kinerja RPJMN 2020-2024 menghadapi berbagai tantangan antara lain (1) pandemi dan krisis kesehatan global yang berdampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan stabilitas sosial termasuk prioritas pengalokasian anggaran APBN dan APBD; (2) ketegangan geopolitik atau konflik

kinerja pembangunan telah menunjukkan perbaikan. Dihadapkan dengan pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan global, tingkat kemiskinan berhasil turun menjadi satu digit sebesar 9,36 persen pada 2023. Ekonomi Indonesia juga mampu tumbuh 5,05 persen (per tahun year on year/yoy) di tengah risiko resesi dan pelemahan ekonomi global. Pemerintah juga telah meletakkan fondasi pembangunan yang kuat melalui pembangunan infrastruktur secara masif di antaranya pembangunan jalan tol, jalan

baru, pelabuhan, dan bandara untuk memperkuat konektivitas wilayah. Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan akses air minum dan akses sanitasi layak.

Status derajat kesehatan masyarakat juga terus membaik. Prevalensi stunting menunjukkan penurunan yang signifi-

mi dan investasi, memperkuat industri pengolahan, menurunkan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Di samping itu, langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan energi dan pangan juga perlu mendapatkan perhatian optimal. Untuk men-

kan langsung soal keselarasan capaian indikator pembangunan 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. "Apa yang kami sampaikan di sini bersama kawan-kawan ada baseline tahun 2019, capaian tahun



kan menjadi 21,5 persen pada 2023. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat signifikan menjadi 95,92 persen pada 2023, yang berarti kondisinya hampir universal. Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia menunjukkan perbaikan positif, ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, upaya yang perlu menjadi perhatian ke depan yaitu mendorong pertumbuhan ekono-

capai hasil pembangunan yang lebih baik, pemerintah terus memperkuat desain program pembangunan yang lebih terintegrasi, mempertimbangkan faktor risiko-risiko pembangunan, serta memperkuat langkah-langkah pengendalian pelaksanaan pembangunan. Pencapaian target RPJMN periode sebelumnya akan terus diperkuat dan disinergikan dalam RPJMN 2025-2029.

Di hadapan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan

2023, dan target RPJMN (2020-2024), dan RKP (2024)," kata Pak Menteri dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung pada Selasa, 12 November 2024.

Ia menambahkan, Bappenas juga sedang mengevaluasi (hasil capaian pembangunan). Dengan basis evaluasi itu, kata Menteri Rachmat, kementeriannya merencanakan akan melakukan apa yang menjadi visi-misi pemerintahan baru. "Apa yang kita kerjakan bersama adalah kelanjutan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

• INFO KHUSUS

Pertama, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, seluruh indikator yang termuat dalam kategori perekonomian diperkirakan tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk Pertumbuhan Ekonomi, capaian pada 2023 sebesar 5,05 persen dengan baseline tahun 2019 yaitu 5,02 persen. Adapun target dalam RPJMN 2020-2024 berkisar 6,2-6,5 persen dan RKP 2024 diproyeksikan sebesar 5,3-5,7 persen, yang berarti indikator ini diperkirakan tak tercapai hingga akhir tahun sesuai target.

Selanjutnya, indikator Pertumbuhan Investasi dengan baseline 2019 sebesar 4-5 persen. Sedangkan capaian 2023 sebesar 4,4 persen, serta target RPJMN 6,6-7 persen, dan RKP 2024 diproyeksikan mencapai 6,2-7 persen.

target.

Indikator Tingkat Kemiskinan memiliki baseline 9,22 persen dengan capaian 9,36 persen, RPJMN 6-7 persen, dan RKP 6,5-7,5 persen. Sedangkan Indeks Rasio Gini (ketimpangan penghasilan) dengan baseline 0,38, capaian 0,388, RPJMN 0,36-0,374, dan RKP 0,374-0,377. Untuk Indeks Rasio Gini, angka ketimpangan dianggap tinggi jika mencapai 0,4 atau 40 persen.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai baseline 71,92 persen dengan capaian 73,55 persen, RPJMN 75,54 persen, dan RKP 73,99-74,02 persen. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan baseline 100,90, capaian 112,46, RPJMN 105, dan RKP 105-108, yang berarti sesuai target.

capaian hanya 13,21 persen dari target RPJMN 23 persen dan RKP 19,5 persen.

Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), telah tercapai sesuai target dengan baseline 24,92 persen. Angka capaiannya tercatat 27,82 persen pada 2022. Sedangkan target RPJMN serta RKP yang masing-masing 27,27 persen.

Terakhir, ada dua indikator yang mencapai target dan sisanya tak sesuai dengan sasaran dalam kategori sumber daya manusia. Dua indikator yang diperkirakan tercapai sesuai target ialah Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 16 Tahun ke Atas dengan baseline 8,75 tahun, capaian 9,13 tahun, RPJMN 9,18 tahun, dan RKP 9,29 persen.

Kemudian, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran menetapkan



Kemudian Share (Porsi) Industri Pengolahan dengan baseline 2019 sebesar 19,7 persen. Angka capaiannya tercatat 18,67 persen, sedangkan RPJMN 21 persen.

Begitu pula dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang memiliki baseline 5,23 persen. Angka capaiannya tercatat 5,32 persen, RPJMN 3,6-4,3 persen, dan RKP 2024 diproyeksikan mencapai 5-5,7 persen.

Selanjutnya, tiga indikator yang terdapat dalam kategori kesejahteraan sosial juga diprediksi tak tercapai selaras dengan target. Namun, satu indikator sesuai

Menyangkut kategori energi dan pangan, ada dua indikator yang mencapai target dan sisanya tak sesuai dengan ketentuan sasaran. Baseline Skor Pola Pangan Harapan sebesar 87,19, capaian 94,1, RPJMN 95,2, dan RKP 95,2, yang diperkirakan tercapai sesuai target.

Di sisi lain, Ketersediaan Beras diperkirakan tidak tercapai sesuai target dengan baseline 38,4 juta ton, capaian 38,32 juta ton, RPJMN 46,8 juta ton, dan RKP 46,84 juta ton. Sama halnya dengan indikator Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional yang memiliki baseline 9,19 persen, namun

baseline tahun 2015 sebesar 305, capaian tahun 2020 yaitu 189, lalu RPJMN dan RKP yang masing-masing 183 per 100 ribu kelahiran.

Di sisi lain, dua indikator lain yang diperkirakan tak tercapai sesuai target adalah Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (IPT) dengan baseline 30,28 persen, capaian 31,45 persen, RPJMN 37,63 persen, dan RKP 32,28 persen. Selanjutnya, Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita mempunyai baseline 27,67 persen, capaian 21,5 persen, serta RPJMN dan RKP yang masing-masing 14 persen.

"Demikian evaluasi capaian yang kami sempat catat. Semua yang menjadi bagian yang kami sampaikan tadi kita buat dalam buku peringkasan evaluasi kinerja RPJMN 2020 hingga 2024. Ini merupakan kinerja makro dan agenda pembangunan yang telah disusun oleh rekan-rekan kami," kata Rachmat Pambudy.

Menanggapi evaluasi kinerja itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengemukakan ini adalah proses awal menuju pembangunan ke depan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo memiliki target yang cukup ambisius, sehingga seluruh pihak harus benar-benar mendukung dan memastikan target ini bisa tercapai.

"Misalnya pertumbuhan ekonomi delapan persen. Nah oleh sebab itu kita kan harus melihat dalam lima tahun terakhir kemarin, 2019-2024, seperti apa. Sehingga kita startnya menjadi lebih jelas," kata Hanif.

Politisi yang pernah menjadi Menteri Ketenagakerjaan itu mengungkapkan penting untuk mengetahui sektor mana saja yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk memastikan agar ke depan ini seluruh rencana pembangunan nasional bisa berjalan sesuai dengan target.

Legislator Dapil Jawa Tengah X ini mengungkapkan potensi masalah yang bisa menghambat RPJMN ke depan bisa saja muncul dari masalah internal. Misalnya saja, muncul dari besarnya struktur kelembagaan atau kementerian saat ini.

"Kelembagaan yang kecil saja masalahnya besar. Nah sekarang kelembagaannya kan menjadi lebih luas, katakanlah begitu. Nah ini kan juga menciptakan problem tersendiri sehingga memerlukan kewenangan yang dalam tanda petik itu lebih untuk memastikan agar seluruh perencanaan pembangunan nasional itu benar-benar bisa dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga. Kemudian juga bisa disinkronisasikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ungkapnya.

Toh Rachmat Pambudy mengaku tugas yang ia emban ke depan yakni mengkoordinasikan target pembangu-

nan kementerian/lembaga (K/L) plus penambahan nomenklatur di struktur terbaru, yakni Kabinet Merah putih memang bukan soal ringan. "Kalau boleh saya jujur ini pekerjaan berat sekali," kata Pak Menteri PPN.

Rachmat mencontohkan, Bappenas mengemban tugas merencanakan target-target pembangunan di tujuh

berubah dan bertambah. Akibatnya, hasil evaluasi lengkap memang belum sampai kepada para wakil rakyat di Parlemen. Selain itu, evaluasi pun masih berlangsung.

"Izinkan kami sampaikan setelah evaluasi kami sampaikan secara digital, dan evaluasi ini masih yang lama kementerian yang masih digabung. Semetnara



Kementerian Koordinator (Kemenko). Tak sampai situ, Kemenko tersebut juga memiliki kementerian di bawahnya dan jumlahnya bertambah.

"Jadi Kemenkop dan UKM sudah dibagi dua. Itu harus kami layani. Kementerian kehutanan juga sudah dibagi jadi Kehutanan dan [Kementerian] Lingkungan Hidup. Pariwisata juga demikian," kata Rachmat.

Alhasil, memang akan ada perbedaan format evaluasi jika nomenklatur K/L

untuk perencanaan, ini kami rencanakan kementerian yang sudah terpisah," kata Menteri Rachmat.

Toh intinya sama. Pembangunan perlu perencanaan. Sedangkan pembangunan yang sukses tergantung kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Semakin tinggi target yang tercapai, semakin berhasil pula pelaksanaan pembangunan. Jadi, hendaknya pelaksanaan sesuai atau melampaui target. Jangan sampai meleset. ●



BERHARAP EKONOMI KREATIF MENGHELA PERTUMBUHAN

Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama. Targetnya menghelela pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di balik pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tersirat harapan munculnya mesin baru penghelela pertumbuhan ekonomi pada 2024 dan selanjutnya. Dalam hal ini Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menyatukan visi dan upaya bersama dalam mendukung ekonomi kreatif memenuhi harapan itu.

“Untuk pertama kalinya ekonomi kreatif menjadi sebuah kementerian dalam sejarah Indonesia. Tentu kami melihat maksud dan tujuan dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo, bahwa sektor ekonomi kreatif akan didorong menjadi mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional,” ujar Menekraf Riefky dalam Rapat Koordinasi Teknis kementerian

tersebut, Rabu, 13 November 2024.

Harapan itu, kata dia, tetap lekat dengan potensi pariwisata dan juga ekonomi kreatif di seluruh daerah di Indonesia untuk berkembang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Hingga semester I tahun 2024, sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan capaian yang positif mencapai Rp749 triliun atau 55 persen dari target Rp1.347 triliun.

Nilai ekspor produk ekonomi kreatif mencapai 12 miliar dolar AS atau 45 persen dari target 27,5 miliar dolar AS. Kontribusi terbesar berasal dari empat subsektor, yakni fesyen (setara 6,7 miliar dolar AS), kriya (setara 4,7 miliar dolar AS), kuliner (setara 830 juta dolar AS), dan penerbitan (setara enam juta dolar AS).

Hadir dalam Rakornis kali ini antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Ward-

hana; Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar; juga Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Tampak pula Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara Dosmar Banjarnahor; Wali Kota Madiun, Jawa Timur 2019–2024, Maidi; dan Pjs. Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Marlyna.

Dalam kesempatan itu Menteri Riefky mengemukakan, ekonomi kreatif ditargetkan menjadi motor penggerak baru perekonomian nasional yang diproyeksikan tumbuh hingga delapan persen sampai 2029. Hal tersebut juga perlu didukung dengan terciptanya ruang dan peluang investasi ekonomi kreatif di daerah. Adapun penyerapan tenaga kerja di sektor ini terus meningkat, dengan total 24,9 juta tenaga kerja pada 2023.

Nah, ekonomi kreatif Indonesia memiliki 17 subsektor yang kita ketahui

bersama memiliki kekuatan dan menunjukkan perkembangan luar biasa. Data yang tercatat oleh kementerian, nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia sepanjang 2023 mencapai angka 23,96 miliar dolar AS atau 88,91 persen dari target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk nilai tambah ekonomi kreatif, mencapai Rp1.414,8 triliun atau sebesar 110,44 persen dari target. Capaian dan potensi tersebut kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto secara khusus menempatkan ekonomi kreatif di dalam struktur nomenklatur kementerian/lembaga saat ini, untuk mendorong peranan ekonomi kreatif sebagai pilar penting untuk mencapai Asta Cita pemerintah terutama dalam hal kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis inovasi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada enam kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Salah satunya adalah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kr. Kita harus menyadari ada tren baru di dunia yang mulai masuk ke daerah-daerah kita. Jika dulu tambang emas dan batu bara menjadi andalan, kini potensi tambang pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus dimanfaatkan,” kata Pak MenEkraf.

Ia juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri sudah ada sejak masa VOC era 1890, digerakkan oleh sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang padat karya. Kini, perekonomian Indonesia dan dunia bergerak ke arah ekonomi yang padat cipta dengan UMKM yang disentuh dengan inovasi dan teknologi dapat menjadi ekonomi kreatif.

Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani, mengatakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pandangan, mengajukan ide-ide inovatif, dan mencari solusi atas tantangan investasi yang dihadapi. Dalam Rakornis ini juga terdapat sesi diskusi panel interaktif dengan menghadirkan narasumber

untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tren investasi terkini, tantangan, serta peluang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Harapan kami, pemerintah daerah dapat menghasilkan proyek investasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas sehingga mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang,” ujar Rizki Handayani.

Sebelumnya, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (KemenEkraf/Bekraf) menegaskan penguatan kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Kolaborasi ini merupakan upaya mewujudkan ekonomi kreatif sebagai “new engine of growth” yang mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas waktu untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Kami tentu senantiasa menyesuaikan arahan-arahan Bappe-

nas dan juga target dari Presiden,” kata Menteri Riefky di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Rabu, 6 November 2024.

Koordinasi dan kolaborasi, kata Menteri Riefky sangat penting sebagai tindak lanjut pembahasan program dan target sektor ekonomi kreatif ke depan. Ia menjelaskan, dalam RPJPN, target rasio produk domestik ekraf bruto ekonomi kreatif ditargetkan mencapai 8,37 persen dalam lima tahun ke depan.

Adapun sasaran dan indikator program pembangunan 2029 yang ditetapkan adalah laju pertumbuhan produk domestik bruto ekonomi kreatif mencapai 6,12 persen, pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif hingga level 5,9 persen, tenaga kerja ekonomi kreatif sekitar 27,6 juta, dan pertumbuhan investasi ekonomi kreatif sebesar 8,08 persen.

“Untuk mencapai target ini, telah disusun lima kegiatan pembangunan atau



• INFO KHUSUS

KP. Yakni penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, kemudian juga ada penguatan untuk ekosistem fesyen dan kriya. Selain itu juga ada penguatan ekosistem aplikasi dan gim serta penguatan ekosistem kuliner,” ujar Menteri Riefky.

Menteri Riefky menjelaskan, penetapan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dilan-

Pertama yakni dukungan penambahan alokasi anggaran tahun 2025 untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bappenas. “Secara paralel kami juga menyusun program kegiatan yang selaras dengan prioritas Presiden yang tercantum dalam asta cita,” ujar Riefky.

Selanjutnya, KemenEkraf berharap dukungan sinkronisasi perencanaan kegiatan pembangunan terkait ekraf termasuk koordinasi antar kementerian/

lembaga, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan terkait ekonomi kreatif. Kemudian, Kementerian PPN/ Bappenas diharapkannya juga memberikan pendampingan secara intensif kepada KemenEkraf/Bekraf.

Menteri Riefky juga mengatakan, KemenEkraf berkomitmen penuh untuk menggunakan data sebagai basis acuan dalam setiap penyusunan kebijakan atau data driven decision making, sehingga peran BPS menjadi sangat penting dalam mendukung formulasi kebijakan ekraf. Terkait dengan data, kata Menteri Riefky, kerja sama dengan BPS diperlukan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk pengembangan basis data ekonomi kreatif dan pengukuran capaian indikator strategis ekonomi kreatif.

Misalnya, kata dia, indikator strategis ekonomi kreatif tersebut adalah penghitungan nilai PDB, ekspor, jumlah tenaga kerja ekraf dan nilai investasi; penyusunan neraca satelit ekraf; survei khusus ekraf, serta penyusunan model dinamik

ekraf. “Dalam pelaksanaannya, KemenEkraf/Bekraf siap menjadi mitra strategis dan berkontribusi pada Survei Sensus Nasional Tahun 2026. Kami berhadapan kolaborasi ini dapat mendorong terwujudnya capaian seperti harapan Presiden bahwa ekonomi kreatif sebagai new engine of growth ekonomi kreatif,” ujar Menteri Riefky.

Dengan data dan informasi sejauh ini, diharapkan ekonomi kreatif menjadi penghela atau mesin baru pertumbuhan merupakan hal yang masuk akal. Tinggal bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya. Terlebih lagi, cakupan ekonomi kreatif meliputi lapisan bawah hingga atas bangsa ini. Ringkasnya, semua harus kreatif untuk pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa pula pemerataan manfaatnya. ●



daskan atas banyak hal. Mulai dari landasan yuridis/teknokratik, landasan akademis, juga landasan empiris serta politis.

“Karena itu di dalam asta cita, ekonomi kreatif dan industri kreatif disebutkan lebih dari 20 kali. Dan ini membuat saya yakin bahwa Presiden pasti mempunyai harapan yang besar terhadap ekonomi kreatif ke depan. Kami meyakini bahwa arahan asta cita itu adalah untuk mempersiapkan ekonomi kreatif sebagai new engine of growth dalam perekonomian Indonesia,” ujar Teuku.

Lebih lanjut Menteri Riefky mengatakan, selaras dengan masa transisi yang berjalan. Yakni pemisahan entitas antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, pihaknya berharap dukungan besar dari Kementerian PPN/ Bappenas.



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



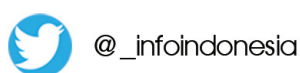
*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786



INOVASI UNTUK NEGERI
nfo indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #49 NOVEMBER 2024

SIAPA ~~X~~ MENANG

PILKADA RASA PILPRES

